LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2023

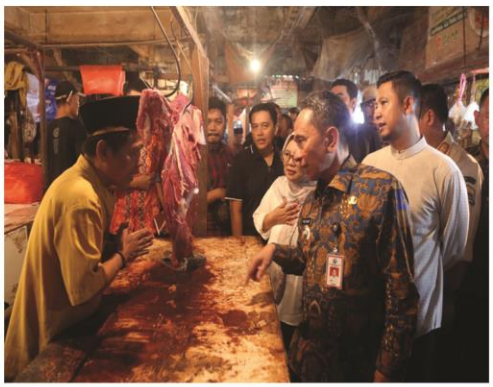

KATA PENGANTAR

YEDI RAHMAT, SE
Pj. Wali Kota Serang

Segala Puji hanya milik Allah SWT, Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Rosulullullah SAW karena berkat limpahan dan rahmatnya, Pemerintah Kota Serang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2023. Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat dengan tujuan untuk menginformasikan secara rinci upaya yang telah dilakukan dan capaian yang telah diraih yaitu dengan mengukur hasil pencapaian indikator-indikator sasaran misi pada dokumen RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Serang yang dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama tahun 2023, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Serang.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Serang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang ini dapat menjadi cermin dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah

Kota selama Tahun 2023, namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu Pemerintah Kota Serang mengharapkan kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun yang akan datang. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang teppplah membenkan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Kota Serang Tahun 2023. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Serang.

Serang, 28 Maret 2024

PJ. WALIKOTA SERANG

YEDI RAHMAT, SE

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PEMERINTAH KOTA SERANG

INSPEKTORAT

Jl. Jendral Sudirman No. 5 Serang - Banten Telp. (0254) 207538 Fax. (0254) 207538

Serang, Maret 2024

Nomor : 18/Insp.CHR-700/III/2024
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyampaian Catatan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (CHR LKjIP) Kota Serang Tahun 2023**

Kepada :
Yth. **Tim Penyusun LKjIP Kota Serang**
Melalui
Kepala Bagian Organisasi Setda
Kota Serang
di –
SERANG

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Serang nomor 7001.2/SPT.30-INSP/II/2024. Inspektorat Kota Serang telah melaksanakan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Kota Serang selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 29 Februari s.d. 15 Maret 2024

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan dengan hormat Catatan Hasil Reviu (CHR) untuk diberikan tanggapan/klarifikasi. Tanggapan/komentar mohon disampaikan 1 (satu) hari setelah CHR ini diterima dan diproses menjadi Laporan Hasil Reviu (LHR).

Demikian atas perhatiaaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Inspektur Pembantu II
selaku
Wakil Penanggung Jawab

Drs. Rama Pramadia S, MM
NIP. 19660318 199312 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Serang telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai saranan yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap OPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2023 merupakan tahun kelima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018–2023, dan Keputusan Walikota Serang Nomor 060/Kep.49-Huk/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023.

Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis meningkatnya derajat pendidikan masyarakat memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 99,38% dengan kriteria ***Sangat Tinggi*** dan realisasi anggarannya mencapai 90,07%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 9,37%.
2. Sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat memiliki capaian kinerja sebesar 100,66% dengan kriteria ***Sangat Tinggi*** dan realisasi

anggarannya mencapai 88,96%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 18,88%.

3. Sasaran strategis meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah memiliki capaian kinerja sebesar 98,61% dengan kriteria ***Sangat Tinggi*** dan realisasi anggarannya mencapai 96,32%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 2,32%.
4. Sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan indikator Capaian Penanganan timbunan sampah memiliki capaian kinerja sebesar 85,19% dengan kriteria ***Tinggi*** dan realisasi anggarannya mencapai 95,93%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya efisiensi sebesar -12,61%.
5. Sasaran strategis meningkatnya pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau (RTH) dengan indikator Capaian ketersediaan RTH memiliki capaian kinerja sebesar 74,81% dengan kriteria ***Sedang*** dan realisasi anggarannya mencapai 94,43%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya tidak efisiensi sebesar -26,22%.
6. Sasaran strategis menurunnya resiko bencana dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana memiliki capaian kinerja sebesar 59,88% dengan kriteria ***Rendah*** dan realisasi anggarannya mencapai 95,69%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya kurang efisiensi sebesar -59,80%.
7. Sasaran strategis meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 109,63% dengan kriteria ***Sangat Tinggi*** dan realisasi anggarannya mencapai 96,66%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya tidak efisiensi sebesar 11,82%.
8. Sasaran strategis meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 99,00% dengan kriteria ***Sangat Tinggi*** dan realisasi anggarannya mencapai 93,35%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya efisiensi sebesar 5,71%.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun 2023 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.614.656.217.614,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.508.593.945.639,- yang terdiri dari Belanja Operasi ditargetkan sebesar Rp. 1.365.179.412.874 dengan realisasi sebesar Rp. 1.287.454.147.324,00 atau 94,31% dan Belanja Modal sebesar Rp. 248.070.817.669,00 dengan realisasi sebesar Rp. 219.848.431.315,00 atau 88,62% serta Belanja tidak terduga sebesar Rp. 1.405.987.071,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.291.367.000,00 atau 91,85%.

Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kota Serang dapat terwujud berkat dukungan semua elemen masyarakat Kota Serang, yang akan terus dipelihara dan pencapaian yang masih rendah akan ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik.

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iv

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR GRAFIK xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 2
1.3. DASAR HUKUM 3
1.4. GAMBARAN UMUM KOTA SERANG 5
1.5. ISU STRATEGIS KOTA SERANG 18
1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN 20

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA **22**

2.1. RENCANA STRATEGIAS TAHUN 2018-2023 22
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 36
2.3. PROGRAM DAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023 38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **47**

3.1. CAPAIAN KINERJA KOTA SERANG 48
3.2. REALISASI ANGGARAN 182
3.3. PENGHARGAAN KOTA SERANG 188

BAB IV PENUTUP **196**

LAMPIRAN **198**

1. LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2023.....
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2023.....

3. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023…….

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan ……	9
Tabel 1.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Serang Tahun 2019-2023	9
Tabel 1.3	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Serang Tahun 2019-2023 .....…….....	10
Tabel 1.4	Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2019-2023	10
Tabel 1.5	Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Jenis Kelamin 2019-2023 .....……	11
Tabel 1.6	Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Kelompok Umur 2019-2023 .....……....	11
Tabel 1.7	Sebaran Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan di Kota Serang Tahun 2019-2023 ….....	12
Tabel 1.8	Sebaran Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Di Kota Serang Tahun 2019-2023 .....……....	12
Tabel 1.9	Komposisi Penduduk Pemeluk Agama di Kota Serang Tahun 2019-2023 .....…..……....	13
Tabel 1.10	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 ……..……....	14
Tabel 1.11	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 …….....	15
Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Serang Tahun 2018-2023 …….....	27
Tabel 2.2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Serang Tahun 2018-2023……....	29
Tabel 2.3	Penataan Fokus Pembangunan Berdasarkan Prioritas RKPD Tahun 2023 ...…….....	31
Tabel 2.4	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 …….....	37
Tabel 2.5	Rencana Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 ……	39
Tabel 2.6	Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2023 ....…...	39
Tabel 2.7	Rencana Anggaran Perubahan Per Program Tahun 2023 …….....	39
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	47
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Sasaran Strategis……....	48

Tabel 3.3 Capaian Pengukuran Kinerja Tujuan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ……..... 49
Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Kota Serang Tahun 2023..... 51
Tabel 3.5 Capaian Pengukuran Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023 ……..... 54
Tabel 3.6 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017-2023 54
Tabel 3.7 Indeks Pembangunan Manusia Dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 ……..... 55
Tabel 3.8 Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Msayarakat Tahun 2023 58
Tabel 3.9 Indikator Sasaran Srategis Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 …….. 59
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2023 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD ….. 60
Tabel 3.11 Faktor Penghambat dan Pendorong Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat ……..... 63
Tabel 3.12 Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Tahun 2023.....……..... 65
Tabel 3.13 Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 ..…….... 66
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2023 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD…….... 66
Tabel 3.15 Kinerja Mutu Pelayanan Indeks Kepuasan Layanan Infrastuktur ……..... 73
Tabel 3.16 Capaian Pengukuran Kinerja Indeks Kepuasaan Layanan Infrastruktur (IKLI) Tahun 2023 73
Tabel 3.17 Nilai IKLI Kecamatan se-Kota Serang Tahun 2023 .....…….... 74
Tabel 3.18 Perkembangan nilai IKLI Kecamatan se-Kota Serang Tahun 2019-2023……..... 74
Tabel 3.19 Realisasi dan Target IKLI dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 …….. 76
Tabel 3.20 Capaian Kinerja Kepuasan Layanan Insfratuktur Tahun 2023 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD ……..... 76
Tabel 3.21 Realisasi dan Target Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 ……..... 79

Tabel 3.22 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Tahun 2023 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD 79
Tabel 3.23 Capaian Pengukuran Kinerja Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah Tahun 2023..... 80
Tabel 3.24 Uraian Pengukuran Kinerja Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah Tahun 2023..... 83
Tabel 3.25 Rumus Perhitungan IKLH 87
Tabel 3.26 Nilai Interval dan Kategori IKLH..... 87
Tabel 3.27 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 87
Tabel 3.28 Realisasi dan Target IKLH dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 88
Tabel 3.29 Rekapitulasi Hasil Pengujian Kualitas Air Tahun 2023..... 89
Tabel 3.30 Hasil Analisa Indeks Kualitas air Tahun 2023..... 89
Tabel 3.31 Rekapitulasi Hasil Pengamatan dan Pengujian Kualitas Udara Kota Serang Tahun 2023..... 90
Tabel 3.32 Rekapitulasi Hasil Analisa Tutupan Lahan Kota Serang Tahun 2023..... 91
Tabel 3.33 Nilai Hasil IKLH Tahun 2023..... 92
Tabel 3.34 Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2023 95
Tabel 3.35 Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 96
Tabel 3.36 Capaian Kinerja Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2023 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD 96
Tabel 3.37 Luas Ruang Terbuka Hijau yang Terpelihara oleh Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 100
Tabel 3.38 Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana Tahun 2023..... 105
Tabel 3.39 Indikator Sasaran Strategis Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 106
Tabel 3.40 Capaian Kinerja Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana Tahun 2023 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD 106

Tabel 3.41 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Penanganan Bencana di Kota Serang 109
Tabel 3.42 Capaian Pengukuran Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Serang Tahun 2023 111
Tabel 3.43 Realisasi dan Target LPE dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 111
Tabel 3.44 Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD 112
Tabel 3.45 Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2023 114
Tabel 3.46 Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 116
Tabel 3.47 Capaian Kinerja Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2023 Terhadap Kondisi akhir RPJMD 116
Tabel 3.48 Rekapitulasi Inflasi di Kota Serang pada Triwulan III Tahun 2023…..... 120
Tabel 3.49 Program Koordinasi Dalam Menjaga Kestabilan Inflasi Triwulan IV Tahun 2023..... 124
Tabel 3.50 PDRB Kota Serang atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2023……..... 130
Tabel 3.51 Pencapaian Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2018-2023…….. 138
Tabel 3.52 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2020-2022……..... 139
Tabel 3.53 Hasil antara Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2020-2022..... 139
Tabel 3.54 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2017-2022 140
Tabel 3.55 Komponen Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2017-2022 140
Tabel 3.56 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2023..... 141
Tabel 3.57 Realisasi dan Target Indeks Reformasi Birokrasi dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023..... 141
Tabel 3.58 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi General Tahun 2023 Pemerintah Kota Serang…..... 142

Tabel 3.59 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023 Pemerintah Kota Serang…..... 154
Tabel 3.60 Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 159
Tabel 3.61 Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Perubahan RPJMD 2018-2023..... 160
Tabel 3.62 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 terhadap Kondisi Akhir RPJMD..... 160
Tabel 3.63 Nilai Persepsi, Interval IKM, Internal Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan..... 163
Tabel 3.64 Capaian Pengukuran Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023..... 163
Tabel 3.65 IKM Kota Serang Berdasar Indikator Komposit Triwulan I-IV Tahun 2023..... 168
Tabel 3.66 Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016-2022..... 169
Tabel 3.67 Hasil Evaluasi AKIP Kota Serang Tahun 2017-2023..... 170
Tabel 3.68 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi AKIP…..... 176
Tabel 3.69 Capaian dan Target Indikator Sasaran Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Perubahan RPJMD 2018-2023..... 180
Tabel 3.70 Komposisi Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2023 (*Anaudited*)..... 182
Tabel 3.71 Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Serang Persasaran Strategis Tahun 2023 (*Anaudited*)..... 185
Tabel 3.72 Daftar Penghargaan Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023 ……..... 190

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Peta Administrasi Kota Serang	6
Gambar 3.1	Peta Proses Bisnis Kota Serang.....	52
Gambar 3.2	Crosscutting untuk Mewujudkan Tujuan dan Sasaran strategis Pemerintah Kota Serang.....	52
Gambar 3.3	Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Mewujudkan Manusia, Sehat, Cerdas dan Berbudaya.....	53
Gambar 3.4	Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Derajat Pendidikan.....	58
Gambar 3.5	Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat..... ….….	62
Gambar 3.6	Logical Frame Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat..... ……..	62
Gambar 3.7	Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat..... ……...	65
Gambar 3.8	Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	67
Gambar 3.9	Logical Frame Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat …….....	68
Gambar 3.10	Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Infrastruktur …….....	72
Gambar 3.11	Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur wilayah.....	79
Gambar 3.12	Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Daerah.....……..	85
Gambar 3.13	Logical Frame Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.....……	85
Gambar 3.14	Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup.....……	86
Gambar 3.15	Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Pengelolaan Persampahan dan ruang Terbuka Hijau (RTH).....	95
Gambar 3.16	Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	102
Gambar 3.17	Logical Frame Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).....…….	102
Gambar 3.18	Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Menurunkan Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana..	104

Gambar 3.19 Proses Bisnis Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana..... 108

Gambar 3.20 Logical Frame Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana ……..... 108

Gambar 3.21 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Berbasis Keunggulan Lokal..... 110

Gambar 3.22 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat..... 114

Gambar 3.23 Proses Bisnis Sasaran Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat 117

Gambar 3.24 Logical Frame Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat..... 118

Gambar 3.25 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Pengendalian Laju Inflasi..... 118

Gambar 3.26 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima..... 137

Gambar 3.27 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik..... 159

Gambar 3.28 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..... 161

Gambar 3.29 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 162

DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 3.1	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023	51
Grafik 3.2	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017-2023	55
Grafik 3.3	Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2017-2023	60
Grafik 3.4	Capaian Harapan Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2017–2023	61
Grafik 3.5	Capaian Usia Harapan Hidup Kota Serang Tahun 2017–2023	67
Grafik 3.6	Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Serang Tahun 2019–2023	75
Grafik 3.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2017–2023	88
Grafik 3.8	Persentase Jumlah Penanganan Sampah Kota Serang Tahun 2018–2023	98
Grafik 3.9	Persentase Ketersediaan RTH Kota Serang Tahun 2018–2021	100
Grafik 3.10	Perkembangan Indeks Resiko Bencana Kota Serang Terhadap Provinsi Banten Tahun 2017–2023	107
Grafik 3.11	Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Serang Tahun 2017-2023	112
Grafik 3.12	Laju Inflasi Kota Serang Tahun 2023-2024	119
Grafik 3.13	Laju Inflasi Kota Serang Terhadap Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2017–2023	120
Grafik 3.14	Indeks Daya Beli Kota Serang Tahun 2018-2023	123
Grafik 3.15	PDRB PerKapita Kota Serang Tahun 2017-2023	131
Grafik 3.16	Indeks Gini Kota Serang Terhadap Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2018-2023	132
Grafik 3.17	Persentase Penduduk Miskin Kota Serang Terhadap Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2017-2023	134
Grafik 3.18	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Serang Terhadap Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2018-2023	135

Grafik 3.19 IKM Kota Serang berdasar Unsur Triwulan I-IV Tahun 2023…….. 164

Grafik 3.20 Capaian IKM Kota Serang Tahun 2018-Triwulan IV Tahun 2023..... 165

Grafik 3.21 Perbandingan Capaian IKM Kota Serang berdasarkan Unit Pelayanan Tahun 2023……..... 166

Grafik 3.22 Capaian Nilai AKIP Kota Serang Tahun 2017-2023 ...……. 170

Grafik 3.23 Capaian Nilai AKIP Kota Serang Berdasarkan Komponen Tahun 2017-2023 ...…….. 172

BAB 01 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bertitik tolak dari RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKjIP Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai

dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKjIP Kota Serang Tahun 2023 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota kepada Presiden ini disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2023 yaitu tahun kelima RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 memiliki maksud sebagai upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel. Sedangkan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 memiliki tujuan:

a. Mewujudkan akuntabilitas instansi Pemerintah Kota Serang dan sebagai bentukpertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Serang kepada Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat;
b. Memberikan informasi umum terkait dengan capaian kinerja keseluruhan Pemerintah Kota Serang sepanjang pelaksanaan RKPD Kota Serang pada Tahun Anggaran 2023;
c. Memberikan informasi capaian kinerja berupa angka capaian indikator-indikatormisi yang terukur serta dapat memrepresentasikan kinerja Pemerintah Kota Serang yang sesungguhnya;
d. Memberikan berbagai informasi dan rekomendasi terkait capaian indikator kinerja sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan serta pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan pelaksanaan misi RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023;
e. Sebagai salah satu proses perbaikan dalam sistem perencanaan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran danEvaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Kementrian Negara/Lembaga;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang;
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Serang Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Walikota Serang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pedoman Rekonsiliasi Data Transaksi Realisasi Anggaran Dalam Penyusunan Laporan Keuangan;
18. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Walikota Serang Nomor 74 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;
20. Peraturan Walikota Serang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instnasi Pemerintah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah KotaSerang;
21. Peraturan Walikota Serang Nomor 69 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Serang Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023;

22. Peraturan Walikota Serang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2023.

1.4 GAMBARAN UMUM KOTA SERANG

1.4.1 DATA GEOGRASIS WILAYAH

Kota Serang merupakan wilayah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Serang sebagai kabupaten induk. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, Kota Serang memiliki luas wilayah keseluruhan ± 266,74 $Km^{2,}$ atau 26.674 Ha. Luas wilayah Kota Serang mengalami penyesuaian peta berdasarkan rekomendasi Badan Informasi Geospasial (BIG) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040, dimana luas semula sebesar 266,74 km^2 menjadi 266,18 km^2. Namun demikian perubahan luas wilayah ini belum disesuaikan dengan data yang dikeluarkan oleh instansi-inastansi vertikal lainnya seperti BPS dan BPN, sehingga data luasan wilayah yang dirilis masih menggunakan data luas wilayah yang lama.

Kota Serang memiliki luas 26.670 Ha yang secara astronomis terbentang diantara 5˚99'6˚22' Lintang Selatan serta di sepanjang 106˚07'106˚25' Bujur Timur. Berdasarkan sistem koordinat UTM (*UniversalTransfer Mercator*) Zona 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 m dari Barat ke Timur, serta pada 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Jika ditarik garis lurus dari utara ke selatan, maka jarak terpanjang yang didapat adalah sekitar 21,7 Km. Sementara itu jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 km. Letak wilayah Kota Serang secara geografis berbatasan denganLaut Jawa di sebelah Utara, sementara di bagian yang lain berbatasan dengan Kabupaten Serang. Relief topografi Kota Serang di dominasi dataran rendahdengan ketinggian kurang dari 500 mdpl.

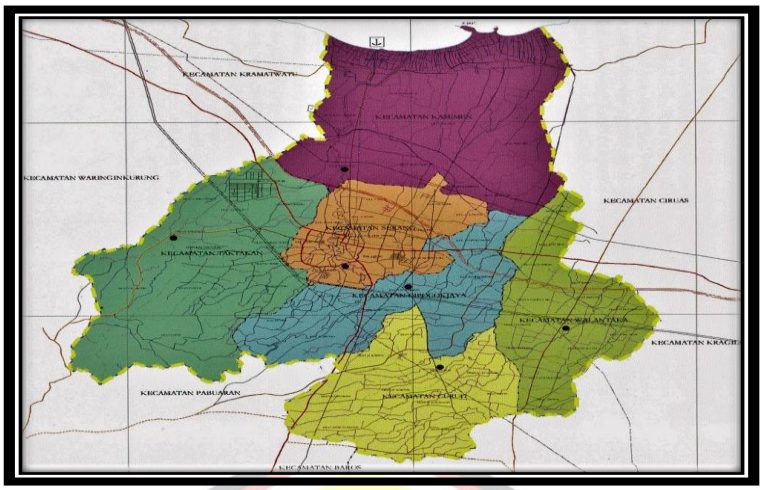

Gambar 1.1.
Peta Administrasi Kota Serang

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, Kota Serang mempunyai batas-batas wilayah :

1) Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Banten;
2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang, KecamatanCiruas, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikuesal, KecamatanPetir, Kecamatan Baros Kabupaten Serang; dan
4) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, KecamatanWaringin Kurung, Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang.

Cakupan wilayah Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan dan 67 kelurahan,yaitu:

a. <u>Kecamatan Curug</u>

1. Kelurahan Kamanisan,
2. Kelurahan Pancalaksana,
3. Kelurahan Tinggar,
4. Kelurahan Cipete,
5. Kelurahan Curugmanis,
6. Kelurahan Sukalaksana,
7. Kelurahan Sukawana,
8. Kelurahan Curug,
9. Kelurahan Sukajaya, dan

b. <u>Kecamatan Kasemen</u>

1. Kelurahan Kasemen,
2. Kelurahan Warung Jaud,
3. Kelurahan Mesjid Priyayi,
4. Kelurahan Bendung,
5. Kelurahan Terumbu,
6. Kelurahan Sawah Luhur,
7. Kelurahan Kilasah,
8. Kelurahan Margaluyu,
9. Kelurahan Kasunyatan, dan

10. Kelurahan Cilaku

c. <u>Kecamatan Cipocok Jaya</u>

1. Kelurahan Gelam,
2. Kelurahan Dalung,
3. Kelurahan Tembong,
4. Kelurahan Karundang,
5. Kelurahan Cipocok Ja
6. Kelurahan Banjarsari,
7. Kelurahan Banjaragung, dan
8. Kelurahan Panancangan

e. <u>Kecamatan Taktakan</u>

1. Kelurahan Cilowong,
2. Kelurahan Sayar,
3. Kelurahan Sepang,
4. Kelurahan Pancur,
5. Kelurahan Kalang Anyar,
6. Kelurahan Kuranji,
7. Kelurahan Panggung Jati,
8. Kelurahan Drangong,
9. Kelurahan Taktakan,
10. Kelurahan Umbul Tengah,
11. Kelurahan Lialang,
12. Kelurahan Taman Baru, dan
13. Kelurahan Cibendung

10. Kelurahan Banten

d. <u>Kecamatan Serang</u>

1. Kelurahan Serang,
2. Kelurahan Cipare,
3. Kelurahan Sumurpecung,
4. Kelurahan Cimuncang,
5. Kelurahan Kotabaru,
6. Kelurahan Lontarbaru,
7. Kelurahan Kagungan,
8. Kelurahan Lopang,
9. Kelurahan Unyur,
10. Kelurahan Kaligandu,
11. Kelurahan Terondol, dan
12. Kelurahan Sukawana

f. <u>Kecamatan Walantaka</u>

1. Kelurahan Lebakwangi,
2. Kelurahan Cigoong,
3. Kelurahan Tegalsari,
4. Kelurahan Pasuluhan,
5. Kelurahan Pabuaran,
6. Kelurahan Walantaka,
7. Kelurahan Pengampelan,
8. Kelurahan Pipitan,
9. Kelurahan Kiara,
10. Kelurahan Pageragung,
11. Kelurahan Kalodran,
12. Kelurahan Kepuren,
13. KelurahanTeritih, dan
14. Kelurahan Nyapah,

Secara astronomis Wilayah Kota Serang terbentang di antara 5^0 99' – 6^0 22' Lintang Selatan serta di sepanjang 106^0 07' – 106^0 25' Bujur Timur. Berdasarkan sistem koordinat UTM (*Universal Transfer Mercator*) Zona 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 m dari Barat ke Timur, serta pada 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Jika ditarik garis lurus dari utara ke selatan, maka jarak terpanjang yang didapat adalah sekitar 21,7 Km. Sementara itu jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 Km. Letak wilayah Kota Serang secara geografis berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, sementara di bagian yang lain berbatasan dengan Kabupaten Serang.

Kota Serang memiliki peranan yang fundamental, selain merupakan pusat pemerintahan provinsi Banten, jarak dari Kota Jakarta yang hanya sekitar 70 km, menjadikan Kota Serang juga sebagai daerah alternatif dan penyangga (*hinterland*) Ibukota Negara. Relief topografi Kota Serang didominasi dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 500 mdpl. Pengaruh iklim tropis menghasilkan variasi temperatur dengan amplitudo yang tidak terlalu ekstrem. Suhu minimum sepanjang 2023 adalah 20,60^{0}C, terjadi di bulan Desember, sedangkan suhu maksimum tercatat pada bulan Oktober,sebesar 37,40^{0}C. Suhu rata-rata harian tertinggi tercatat pada bulan April yaitu 28,10^{0}C dan suhu rata-rata harian terendah pada bulan Februari sebesar 27,10^{0}C.

Kelembaban relatif terendah di Kota Serang pada tahun 2023 sebesar 31% terjadi pada bulan September. Kelembaban relatif tertinggi tercatat pada bulan Januari, Februari, Maret, Juni, Juli dan November yaitu 99%. Kelembaban relatif rata-rata terendah tercatat pada bulan September, yaitu 68,50%. Sedangkan kelembaban relatif rata-rata tertinggi tercatat pada bulan Februari, yaitu 81,90%. Tekanan udara sekitar 1.000,30 mb – 1.012,70 mb; sertatingkat penyinaran matahari berkisar antara 3,2 – 7,9% per tahun. Tekanan udarateren dah di Kota Serang pada tahun 2023 tercatat pada bulan Mei, yaitu1.000,30 mb. Sedangkan tekanan udara tertinggi, tercatat di bulan Maret, yaitu 1.012,70 mb. Pada tahun 2023 di Kota Serang, curah hujan terendah tercatat pada bulan September yaitu 0,50 mm^3. Sementara curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Agustus dan Oktober yaitu 8.888,00 mm^3.

Dilihat dari proporsi cakupan penggunaan lahan Kota Serang pada tahun 2023, persentase penggunaan lahan paling rendah adalah untuk hutan yaitu sebesar 0,66%, sedangkan penggunaan lahan yang terbesar adalah untuklahan pertanian, yaitu sebesar 69,75%. Sedangkan lahan yang digunakan untuk perumahan mencapai 20,62%.

Dengan luas wilayah mencapai 266,74 km^2, Kota Serang dibagi atas 6 Kecamatan dan 67 Kelurahan sebagaimana tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km^2)	Luas Kota (%)
1.	Serang	12	25,88	9,7
2.	Cipocok Jaya	8	31,54	11,82
3.	Kasemen	10	63,36	23,75
4.	Taktakan	13	47,88	17,95
5.	Walantaka	14	48,48	18,18
6.	Curug	10	49,60	18,59
	Jumlah	**67**	**266,74**	**266,18**

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Serang

1.4.2 KONDISI DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Kota Serang Tahun 2023 berjumlah 735.651 jiwa. Dari jumlah tersebut 374.563 jiwa (50,92%) adalah penduduk laki-laki dan 361.088 jiwa (49,08%) adalah penduduk perempuan, dengan kepadatan penduduk sebesar 2.764 jiwa/km^2 terlihat pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Serang Tahun 2019 –2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	CipocokJaya	91.996	96.549	99.710	103.679	105.853
2	Curug	53.625	56.940	59.249	62.004	63.299
3	Kasemen	97.430	102.368	106.737	111.205	113.979
4	Serang	224.546	229.901	232.787	235.355	234.993
5	Taktakan	92.361	97.250	101.629	105.768	108.129
6	Walantaka	92.234	98.004	102.116	106.541	109.398
	Jumlah	**652.192**	**681.012**	**702.228**	**724.552**	**735.651**

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, 2024

Tabel 1.3
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Serang
Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
1	Jumlah Penduduk Tahun (t)	652.192	681.012	702.228	724.552	735.651	699.127
2	Jumlah Penduduk Tahun (t-1)	642.589	652.192	681.012	702.228	724.552	680.515
3	**Laju Pertumbuhan Penduduk (%)**	**1,49**	**4,42**	**3,12**	**3,18**	**1,53**	**2,75**

Sumber : Disdukcapil Kota Serang, 2024

Tabel 1.4
Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tingkat Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Cipocok Jaya	2.916,80	2.831,35	2.924	3.040	3.104
2	Curug	1.081,15	1.461,50	1.521	1.591	1.625
3	Kasemen	1.537,72	1.486,83	1.550	1.615	1.655
4	Serang	8.676,43	8659,17	8.768	8.865	8.851
5	Taktakan	1.929,01	1.590,09	1.662	1.729	1.768
6	Walantaka	1.902,52	2.680,63	2.793	2.914	2.992
Rata-rata		**2.445,05**	**2.558,46**	**2.638,00**	**2.722,00**	**2.764**

Sumber : Disdukcapil Kota Serang, 2024

Dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin besarnya *sex ratio* penduduk Kota Serang pada tahun 2023 adalah 1,04. Hal ini berarti bahwa penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan perbandingan 374.563 jiwa (50,92%) adalah penduduk laki-laki dan 361.088 jiwa (49,08%) adalah penduduk perempuan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan	Sex Ratio
2019	652.192	332.912	319.280	1,04
2020	681.012	346.829	334.183	1,04
2021	702.228	357.349	344.879	1,04
2022	724.552	368.808	355.744	1,04
2023	735.651	374.563	361.088	1,04

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, 2024

Komposisi penduduk Kota Serang menurut kelompok umur pada tahun 2019-2023 terlihat pada Tabel 1.6:

Tabel 1.6
Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Kelompok Umur
Tahun 2019-2023

Kelompok Umur	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
0 – 4	54.994	58.410	59.555	63.362	62.396
5 – 9	63.247	68.557	69.859	71.500	72.689
10 – 14	56.459	63.757	65.512	66.860	68.478
15 – 19	41.716	48.873	52.109	53.462	48.867
20 – 24	62.151	63.260	63.690	64.484	65.771
25 – 29	62.172	63.833	66.099	67.299	67.213
30 – 34	59.870	60.675	61.255	63.331	64.941
35 – 39	55.534	56.105	58.688	58.601	60.119
40 – 44	50.984	51.328	51.402	54.234	55.449
45 – 49	74.023	44.500	47.333	47.781	49.076
50 – 54	35.814	36.582	37.750	40.145	41.547
55 – 59	25.846	25.654	27.458	28.753	30.865
60 – 64	17.191	18.463	18.676	20.037	21.289
65 – 69	11.118	10.339	11.433	12.179	13.167
70 -74	5.514	5.553	5.887	6.538	7.236
75+	5.559	5.123	5.522	5.986	6.498
Jumlah	**652.192**	**681.012**	**702.228**	**724.552**	**735.651**

Sumber : Disdukcapil Kota Serang, 2024

Gambaran sebaran penduduk menurut tingkat pendidikan yangditamatkan di Kota Serang tahun 2019-2023 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.7
Sebaran Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
Kota Serang Tahun 2019-2023

PENDIDIKAN	2019	2020	2021	2022	2023
Tidak Punya Ijazah SD	207.635	234.930	246.553	258.286	262.904
Tamat SD / Sederajat	177.972	173.220	172.673	171.903	171.129
SMP / Sederajat	82.649	83.504	85.477	87.300	87.584
SMA / Sederajat	137.449	140.939	146.605	153.140	157.586
Akademi/Diploma I/II/III/Sarjana Muda	11.462	11.652	11.811	12.052	12.193
Diploma IV / Strata I	31.743	33.325	35.452	37.919	40.043
Strata II	3.128	3.276	3.482	3.752	4.001
Strata III	154	166	175	200	211
JUMLAH	**652.192**	**681.012**	**702.228**	**724.552**	**735.651**

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, 2024

Selanjutnya komposisi penduduk Kota Serang apabila dilihat menurut jenis pekerjaan pada Tahun 2019-2023 terlihat pada berikut:

Tabel 1.8
Sebaran Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan
Di Kota Serang Tahun 2019-2023

No	PEKERJAAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Belum/Tidak Bekerja/Ibu Rumah Tangga	336.693	360.717	375.291	390.406	399.250
2	Pelajar/Mahasiswa	97.738	101.595	102.686	105.800	104.466
3	Pensiunan	3.035	2.642	2.703	2.840	2.947
4	PNS/TNI/POLRI, Perangkat Desa	18.534	18.451	18.506	18.699	18.699
5	Petani/Pekebun/Nelayan /Peternak	6.049	4.207	5.617	6.217	6.243
6	Wiraswasta	62.804	61.340	58.565	56.235	56.825
7	Karyawan Swasta, BUMN/BUMD	53.414	53.742	52.749	56.205	53.544
8	Buruh Harian Lepas	53.142	56.574	62.004	69.588	70.289
9	Dosen/Guru/Peneliti/Tenaga kesehatan	5.101	3.357	5.879	4.380	6.607
10	Pedagang/Pialang	2.014	1.961	1.984	1.957	1.962
11	Lainnya	13.668	16.426	16.244	12.225	14.819
	JUMLAH	**652.192**	**681.012**	**702.228**	**724.552**	**735.651**

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, Tahun 2024

Perkembangan Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten berdampak pada heterogenitas penduduknya, walaupun Kota Serang memiliki landasan paradigma dan perspektif agamis dalam menjalankan visidan misinya, namun tetap menghargai agama dan keyakinan lain yang diakuioleh negara. Toleransi dari keberagaman kehidupan beragama telah tumbuh di Kota Serang, hal ini ditandai dengan berdampingannya mayoritas pemeluk Islam di Kota Serang dengan pemeluk-pemeluk agama lain, komposisi penduduk pemeluk agama di Kota Serang pada tahun 2023 terlihat pada (Tabel 1.9)

Tabel 1.9
Komposisi Penduduk Pemeluk Agama di Kota SerangTahun 2019-2023

No	Agama	2019	2020	2021	2022	2023
1	Islam	638.474	666.611	687.316	709.106	720.037
2	Kristen Protestan	8.003	8.530	9.008	9.470	9.701
3	Kristen Katolik	2.934	3.045	3.085	3.163	3.184
4	Hindu	246	273	293	308	309
5	Budha	2.532	2.541	2.512	2.491	2.405
6	Konghucu	2	11	14	14	14
7	Kepercayaan	1	1	-	-	1
TOTAL JUMLAH		**652.192**	**681.012**	**702.228**	**724.552**	**724.552**

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, 2024

1.4.3 SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah KotaSerang berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang Tahun 2023 sebanyak 5.106 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.588 orang dan perempuan sebanyak 3.518 orang, sebagaimana Tabel 1.10 berikut :

Tabel 1.10

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

Ruang	REKAP SELURUH PEGAWAI																			
	PNS								CPNS				PPPK						JUMLAH	
	GOL. I		GOL II		GOLIII		GOL IV		GOL II		GOL III		GOL VII		GOL IX		GOL X			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
A	0	0	1	1	132	280	207	444			0	0							1588	3518
B	0	0	14	6	101	251	177	447			0	0								
C	1	0	28	31	150	318	29	30	0	0										
D	2	0	27	23	347	645	3	2												
E							0	0												
													7	15	360	1019	2	6		
Jumlah	3	0	70	61	730	1494	416	923	0	0	0	0	7	15	360	1019	2	6	5106	
	3		131		2224		1339		0		0		22		1379		8			
	3697								0				1409							

Sumber : BKPSDM Kota Serang, 2024

Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Serang berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 1.11 berikut:

Tabel 1.11
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2023

TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		PPPK		SUB TOTAL		%
	L	P	L	P	L	P	
SD	1	0	0	0	1	0	0,02%
SLTP	10	0	0	0	10	0	0,20%
SLTA	45	27	0	0	45	27	1,41%
SLTA KEJURUAN	5	4	0	0	5	4	0,18%
Diploma I	0	4	0	0	0	4	0,08%
Diploma II	15	16	0	0	15	16	0,61%
Diploma IIII	50	126	12	10	62	136	3,88%
Diploma IV	12	78	0	2	12	80	1,80%
S-1	742	1839	355	1020	1097	2859	77,48%
S-2	332	382	2	8	334	390	14,18%
S-3	7	2	0	0	7	2	0,18%
JUMLAH	**1219**	**2478**	**369**	**1040**	**1588**	**3518**	**100%**
	3697		**1409**		**5106**		

Sumber : BKPSDM Kota Serang, 2024

Berdasarkan tabel di atas tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Kota Serang yang memperoleh pendidikan Strata 1 menduduki peringkat pertama dengan 77,48%, disusul pendidikan Strata II sebesar 14,18%.

1.4.4 SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, sebagai berikut :

1. **Sekretariat Daerah**, merupakan Sekretariat Daerah tipe B terdiri dari unit kerja yaitu :
   a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
   b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
   c. Asisten Administrasi Umum.

2. **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
3. **Inspektorat** merupakan Inspektorat tipe B;
4. **Dinas Daerah**, yaitu:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
   b. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
   d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta bidang pertanahan;
   e. Satuan Polisi Pamong Praja Pemukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Sub bidang ketentraman dan ketertiban umum serta sub bidang kebakaran;
   f. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
   g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
   h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KeluargaBerencana;
   i. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
   j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   k. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
   l. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
n. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga Tipe Amenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata serta bidang kepemudaan dan olahraga;
o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
p. Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan;
q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;

5. **Badan Daerah**, yaitu :
   a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
   b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan;
   c. Badan Pendapatan Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan;
   d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
   e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik intensitas sedang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. **Kecamatan**, yaitu :
   a. Kecamatan Serang dengan Tipe A;
   b. Kecamatan Cipocok Jaya dengan Tipe A;
   c. Kecamatan Kasemen dengan Tipe A;
   d. Kecamatan Curug dengan Tipe A;
   e. Kecamatan Walantaka dengan Tipe A;

f. Kecamatan Taktakan dengan Tipe A.

1.5 ISU STRATEGIS KOTA SERANG

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Atas dasar penelaahan terhadap dokumen-dokumen perencanaan nasional, Provinsi Banten dan Kota Serang, maka isu strategis pada Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

a. Geostrategis dan demografi Kota Serang

Sebagai ibu kota Provinsi Banten serta berada pada lintasan antar kota di wilayah Provinsi Banten dan lintasan antar Jawa-Sumatera, Kota Serang berpotensi menarik minat pendatang untuk tinggal di Kota Serang yang akan berpengaruh tidak hanya terhadap pertumbuhan penduduk, namun juga mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi dan lingkungan, khususnya dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, serta upaya penyediaan infrastruktur dasar. Kota Serang memiliki daya tarik alamiah yang dapat dioptimalkan untuk kepentingan pembangunan daerah di masa mendatang. Sebagai pusat aglomerasi bagi daerah sekitarnya, Kota Serang saat ini berkembang sebagai kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa bagi produk-produk dan komoditas yang dihasilkan kawasan *hinterland*.

b. Kota Metropolitan Serang

Pembangunan Kota Metropolitan Serang menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2023 yang akan menjadikan Kota Serang yang lebih maju, cerdas dan berkelanjutan. Untuk membangun Kota Metropolitan Serang perlu upaya pembangunan menyeluruh yaitu pembangunan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan pemenuhan infrastruktur wilayah, hal ini diperlukan dalam upaya mengurangi dampak yang kurang baik dari pembangunan Kota Metropolitan Serang. Namun demikian diyakini apabila pembangunan Kota Metropolitan Serang nantinya dapat meningkatkan daya saing Kota Serang di segala sektor pembangunan. Disamping itu didukung oleh beberapa proyek strategis Pemerintah Provinsi

Banten di Kota Serang, diantaranya Sport Centre, Kampus Terpadu Untirta, dan pengembangan Danau Ciwaka.

c. Kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat berfokus pada pembangunan pendidikan dan kesehatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dan penanggulangan permasalahan sosial yang masih menjadi permasalahan pembangunan di Kota Serang, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang berpengaruh pada seluruh sendi kehidupan baik perekonomian maupun pendidikan dan kesehatan.

d. Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah

Peningkatan daya saing perekonomian daerah Kota Serang dimaksudkan untuk menjadikan Kota Serang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dengan daerah lain ataupun dalam menghadapi tantangan perekonomian regional, nasional dan global. Namun demikian hal tersebut akan memiliki tantangan yang besar akibat atau dampak pandemic COVID-19 dalam upaya pemulihan perekonomian.

Upaya peningkatan daya saing perekonomian daerah Kota Serang dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sektor potensial, yaitu Pariwisata, Budaya, Perdagangan dan Jasa, UKM dan Koperasi, Pertanian, Ketahanan Pangan, Ekonomi kreatif, dan Investasi dengan peningkatan pengelolaan BUMD untuk pelayanan publik dan peningkatan potensi PAD. Selain itu, peningkatan daya saing perekonomian daerah dapat dicapai dengan penguatan fungsi kelitbangan dan sistem inovasi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu daya saing pariwisata Kota Serang adalah eksistensi Kawasan Cagar Budaya Keraton Surosowan Kesultanan Banten secara faktual memiliki potensi sebagai obyek dan destinasi wisata yang tinggi. Karenanya pengembangan dan pengelolaannya yang dilakukan secara profesional sebagai sebuah industri pariwisata, akan sangat menjanjikan di masa depan, tidak hanya bagi kepentingan pemerintah daerah namun juga untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

e. Infrastruktur wilayah

Peningkatan infrastruktur wilayah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kenyamanan masyarakat Kota Serang, yaitu peningkatan konektivitas wilayah (jalan dan jembatan), penanganan sampah, kemacetan, titik banjir dan/atau genangan air, drainase dan irigasi serta sarana prasarana perumahan dan permukiman.

f. Pengelolaan tata ruang, lingkungan hidup dan mitigasi bencana

Pengelolaan tata ruang, lingkungan hidup dan mitigasi bencana dalam kerangka penataan Kota Serang yang berkelanjutan serta antisipasi terhadap potensi bencana dan perkembangan pengelolaan tata ruang wilayah. Salah satu diantara mitigasi bencana adalah mitigasi bencana non alam berupa pandemic COVID-19.

g. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi diarahkan pada rangka peningkatan pelayanan publik dan e-government dalam upaya memenuhi harapan dan ekspektasi masyarakat atas pelayanan publik serta pemerintahan yang baik dan bersih, dengan memfokuskan pada agenda: penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai standar, pembangunan Smart City, penyederhanaan birokrasi, fungsionalisasi aparatur sipil negara, penyelesaian peralihan aset daeah secara progresif, pembangunan Pusat Pemerintahan Kota, peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat, pemenuhan standar pelayanan publik, peningkatan implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kierja pemerintah, serta peningkatan tata kelola keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 terdiri dari 4 (Empat) Bab yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Umum Daerah, Susunan Organisasi Perangkat daerah, Sumber Daya

Manusia dan Isu-isu Strategis yang dihadapi Pemerintah Kota Serang serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Rencana strategis daerah, penetapan indikator kinerja utama, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, rencana aksi pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis dan rencana anggaran tahun 2023.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

a. **Capaian Kinerja Organisasi**

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi pembandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkanrealisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional (jika ada), menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

b. **Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan danyang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Serang dalam kurun waktu tahun 2022 dan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan kinerjanya dimasa mendatang.

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 – 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018 – 2023 sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahun. Namun sejalannya waktu kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Kota Serang dengan berpedoman pada Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Adapun perubahan yang mempengaruhi substansi RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 lebih kepada kondisi terjadi perubahan yang mendasar, diantaranya mencakup terjadinya bencana, krisis ekonomi dan perubahan kebijakan nasional, antara lain penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat berupa peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, maupun organisasi perangkat daerah.

Hal lain yang mendasari perubahan RPJMD disebabkan kejadian bencana non alam pandemi COVID-19 sebagaimana telah ditetapkan sebagai bencana nasional yang berdampak terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian arah kebijakan dan target indikator kinerja makro, indikator kinerja utama dan program.

Alasan berikutnya yaitu hasil pengendalian dan evaluasi pada tahapan proses yang sudah berjalan menunjukan perlu dilakukan perumusan kembali indikator kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan perubahan fungsi perangkat daerah atau SOTK dan juga adanya substansi yang belum terakomodir, seperti

terkait kebijakan rencana pembentukan BUMD dan penyertaan modal sebagaimana mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu arah kebijakan yang merumuskan pendirian badan usaha milik daerah pada dokumen perencanaan.

Perencanaan pembangunan daerah yang dirumuskan secara terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah. Perumusan perencanaan sebagai penjabaran RPJMD tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun untuk 5 (lima) tahun. Renstra merupakan proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023, Kota Serang memiliki visi, yaitu :

1. VISI

Berdasarkan kondisi Kota Serang, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang, Walikota dan Wakil Walikota membuat Visi Kota Serang Tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA”

Visi tersebut menggambarkan bahwa Kota Serang sebagai Kota **Peradaban** (*Civil Society)* yaitu kondisi pemerintahan dan masyarakat Kota Serang yang berciri:

1. Adanya toleransi (tenggang rasa) untuk tujuan kerukunan dan kedamaian;
2. Adanya *pluralism* yaitu sikap yang mau menerima dengan tulus ikhlas suatu kondisi warga Kota Serang yang majemuk.
3. Adanya keadilan sosial, bermakna setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam kehidupan sosial, terjamin

keadilan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak;

4. Adanya partisipasi sosial, yaitu setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam berpolitik dengan rasa tanggung jawab secara bersih tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun;
5. Adanya demokratisasi yaitu sebuah proses dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi demi terciptanya warga Kota Serang yang menjunjung tinggi azas-azas demokrasi;
6. Adanya supremasi hukum, ditandai penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap warga Kota Serang tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah;
7. Tersedianya ruang bebas publik, sebagai tempat bagi warga Kota Serang untuk melakukan aktivitas publiknya secara bebas dan bertanggung jawab seperti dalam hal berorganisasi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat termasuk mempublikasikannya kepada publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Kota ***Berdaya***, mengandung arti bahwa Kota Serang mampu menunjukkan keunggulan berkomparasi dan berkompetisi diberbagai bidang kehidupan. Kota Serang akan menjadi Kota Peradaban yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Serang.

Kota ***Berbudaya***, mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar Bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Serang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan: **"Aje Kendor Membangun Serang"**.

Makna slogan **Aje Kendor Membangun Serang** diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk

menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Serang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi**" TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA"** dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1) Menguatkan peradaban berbasis nilai nilai kemanusiaan, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya.
2) Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah yang berwawasan Lingkungan, dengan memantapkan penataan kota, membangun infrastruktur dasar wilayah, melalui manajemen perencanaan ruang kota yang memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan kelestariannya.
3) Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing, denganmenciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, menurunkan tingkat pengangguran dan memperluas lapangan kerja, melalui peningkatan daya saing daerah.
4) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan menghadirkan pemerintahan yang merakyat dan memiliki semangat perubahan yang didukung oleh teknologi informasi komunikasi (TIK) sebagai penggerak birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan bertanggungjawab, membangkitkan partisipasi warga kota serang, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima.

3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup: (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis sumber daya daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah.

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan pembangunan Kota Serang menitik beratkan pada upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan perekonomian masyarakat dan infrastruktur serta pendayagunaan kondisi dan potensi yang dimiliki secara optimal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Kota Serang sebagai kota peradaban dengan prioritas pembangunan pada Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
2. Peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah;
3. Peningkatan mutu lingkungan hidup, pengelolaan penataan ruang dan mitigasi bencana;
4. Peningkatan kualitas dan daya saing perekonomian daerah;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi.

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi ditiap sasaran daerah pada Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 yang terinci pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Serang Tahun 2018-2023

VISI: Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya

TUJUAN DAERAH		SASARAN DAERAH		STRATEGI	
MISI 1. MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN					
1.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	1.1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1.1.1.1	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
				1.1.1.2	Peningkatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan masyarakat
				1.1.1.3	Peningkatan kualitas dan implementasi seni budaya lokal
		1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1.2.1	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
				1.1.2.2	Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				1.1.2.3	Pengendalian pertumbuhan penduduk serta pelayanan keluarga berencana dan ketahanan keluarga
MISI 2. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN					
2.1	Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah	2.1.1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	2.1.1.1	Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem infrastruktur pengembangan kawasan dan wilayah, serta pendukung pengembangan perekonomian dan pelayanan publik
2.2	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	2.2.1	Meningkatnya pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.2.1.1	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, persampahan dan Ruang Terbuka Hijau
		2.2.2	Menurunnya risiko bencana dan meningkatnya	2.2.2.1	Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana

TUJUAN DAERAH		SASARAN DAERAH		STRATEGI	
			ketangguhan terhadap bencana		
MISI 3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING					
3.1	Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah	3.1.1	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	3.1.1.1	Peningkatan daya saing perekonomian daerah dan pemulihan ekonomi melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat
				3.1.1.2	Peningkatan pemantapan ketahanan pangan daerah
MISI 4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK					
4.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	4.1.1	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	4.1.1.1	Pengembangan sistem pemerintahan yang inovatif, efektif, dan efisien melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan
				4.1.1.2	Peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik

Tabel 2.2
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Serang
Tahun 2018-2023

VISI : TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA

Tujuan Daerah			Sasaran Daerah			Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja		Target Kinerja			Kondisi Akhir RPJMD	
Uraian		Indikator	Uraian		Indikator		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Setelah
MISI 1. MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN														
1.1	Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya	Indek Pembangunan Manusia				Poin	71,68	72,10	72,16	72,52	72,81	73,09	73,92	73,09
			1.1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,62	8,67	8,76	8,81	8,86	8,91	8,68	8,91
					Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,65	12,77	12,78	12,86	12,92	12,98	12,77	12,98
			1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	67,58	67,83	68,00	68,17	68,34	68,51	68,75	68,51
MISI 2. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN														
2.1	Tepenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah	Indeks kepuasan layanan infrastruktur daerah (IKLI)				Poin	NA	57,71	61,87	63,50	66,00	70,00	70,00	70,00
			2.1.1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Tingkat Kemantapan Infrastruktur wilayah	%	68,80	67,55	70,09	72,21	74,83	77,14	83,00	77,14
2.2	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup				Poin	47,35	47,35	54,34	47,63	47,68	47,79	51,30	47,79
			2.2.1	Meningkatnya pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ketersediaan RTH	%	1,52	2,98	3,43	3,45	3,50	4,05	2,05	4,05
					Jumlah Penanganan Timbunan Sampah	%	51,92	55,58	61,6	70	75	80	75	80
			2.2.2	Menurunnya risiko bencana dan	Indeks Risiko Bencana	Poin	150	140	130	120	110	100	100	100

Tujuan Daerah			Sasaran Daerah			Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja		Target Kinerja			Kondisi Akhir RPJMD	
Uraian		Indikator	Uraian		Indikator		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Setelah
				meningkatnya ketangguhan terhadap bencana										
MISI 3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING														
3.1	Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi				%	6,59	6,20	-1,29	5	5,25	5,5	6,91	5,5
			3.1.1	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	Tingkat inflasi daerah	%	3.78	3,06	1,91	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
					Indeks daya beli	Poin	78,76	79,12	78,65	79,08	79,54	79,98	83,61	79,98
					PDRB per kapita	Juta Rp	42,76	45,89	45,17	46,99	49,14	51,67	52,50	51,67
					Angka Kemiskinan	%	5,36	5,28	6,06	5,96	5,86	5,76	4,86	5,76
					Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,16	8,08	9,26	9,16	9,06	8,96	7,93	8,96
					Indeks Gini	Poin	0,351	0,342	0,352	0,350	0,348	0,346	NA	0,346
MISI 4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK														
4.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah				Poin	56,23	59,14	58,30	60,50	61,00	61,50	80,00	61,50
			4.1.1	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)	Poin	72,00	77,80	77,74	78,00	79,00	81,00	81,00	81,00
					Nilai LPPD Kota	Poin	3.2346	3.4365	3.4426	3.4500	3.4550	3.4600	Sangat Tinggi	3.4600
					Hasil Evaluasi AKIP	Poin	52,31	54,64	55,33	61,00	62,00	63,00	BB	63,00
					Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

4. PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN

Sebagaimana telah ditetapkan tema pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2023 adalah "**Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Daya Saing dan Kualitas Infrastruktur"**, kemudian disusun prioritas pembangunan Kota Serang Tahun 2023 sebagai berikut :

1) Peningkatan Perekonomian Daerah yang berkualitas;
2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3) Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah dan pengelolaan tata ruang;
4) Peningkatan mutu lingkungan hidup dan mitigasi bencana; serta
5) Peningkatan tata kelola pemerintahan.

Secara umum yaitu pada level yang secara menyeluruh, fokus pembangunan sesuai prioritas pembangunan Kota Serang Tahun 2023 sebagaimana berikut :

Tabel 2.3
Penataan Fokus Pembangunan Berdasarkan Prioritas RKPD Kota Serang Tahun 2023

PRIORITAS RKPD	PROGRAM PRIORITAS	FOKUS SASARAN	FOKUS KEGIATAN
Peningkatan Perekonomian Daerah yang berkualitas	**Peningkatan daya saing perekonomian daerah**	Peningkatan daya saing Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Mikro)	Revitalisasi Koperasi dan peningkatan daya saing UKM
		Pertumbuhan dan pengembangan perdagangan	Stabilitasi harga dan pasokan barang
		Pengembangan dan penataan pasar	Penataan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL)
		Peningkatan daya saing dan pengembangan IKM	Pengembangan dan promosi IKM
		Peningkatan daya saing pariwisata daerah	Penataan dan promosi destinasi wisata
		Pengembangan ekonomi kreatif	Pengembangan dunia usaha dan ekonomi kreatif

PRIORITAS RKPD	PROGRAM PRIORITAS	FOKUS SASARAN	FOKUS KEGIATAN
		Peningkatan iklim investasi/penanaman modal	Peningkatan kerja sama dan investasi daerah
		Peningkatan produksi dan daya saing hasil pertanian dan perikanan	Peningkatan sarana prasarana, produksi, promosi dan pemasaran hasil Pertanian
	Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan pelayanan kesejahteraan social	Penanganan dan pemberdayaan PMKS
			Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
		Peningkatan ketahanan pangan daerah	Pemantapan ketahanan pangan
		Peningkatan daya saing tenaga kerja	Peningkatan kualitas angkatan kerja
		Peningkatan kesempatan kerja dan lapangan kerja	Partisipasi dan perluasan kesempatan kerja
		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Pembinaan dan pengelolaan lembaga kemasyarakatan
		Program transmigrasi	Peningkatan transmigran yang ditempatkan
Peningkatan kualitas sumber daya manusia	**Peningkatan derajat pendidikan masyarakat**	Peningkatan akses dan layanan pendidikan	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berupa Ruang Kelas, Perpustakaan, Laboratorium, Air bersih dan Sanitasi
		Peningkatan mutu pendidikan	Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
		Peningkatan pengelolaan dan manajemen pendidikan	Peningkatan mutu pengelolaan dan manajemen serta kerjasama pendidikan
		Peningkatan minat baca , budaya literasi, dan	Peningkatan minat baca dan pengembangan budaya literasi

PRIORITAS RKPD	PROGRAM PRIORITAS	FOKUS SASARAN	FOKUS KEGIATAN
		pengembangan perpustakaan	
		Pengembangan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga serta Pembinaan kepemudaan dan olahraga
		Pelestarian kebudayaan	Pengelolaan dan implementasi nilai-nilai budaya daerah
	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan layanan kesehatan	Peningkatan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan
			Pengembangan RSUD
		Peningkatan mutu layanan kesehatan	Peningkatan sumberdaya kesehatan (tenaga medis dan paramedis)
		Peningkatan budaya hidup sehat dan kesehatan lingkungan	Peningkatan upaya promotif, preventif dan kuratif
		Penanganan Covid 19	
		Penurunan Angka Stunting	
		Pengendalian penduduk dan KB	Pengendalian penduduk dan pelayanan KB
		Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Pengarustamaan gender
			Perlindungan anak
Peningkatan aksesibilitas Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Tata Ruang	**Peningkatan konektivitas dan visual wilayah**	Peningkatan jalan dan jembatan	Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan
		Pemenuhan prasarana dan fasilitas perhubungan	Peningkatan dan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
		Penataan dan pengendalian potensi titik kemacetan	Peningkatan manajemen lalu lintas dan penanganan kemacetan

PRIORITAS RKPD	PROGRAM PRIORITAS	FOKUS SASARAN	FOKUS KEGIATAN
		Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Peningkatan dan pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)
	Peningkatan pemenuhan infrastruktur wilayah	Pengelolaan sumber daya air	Pembangunan dan pengelolaan sumber daya air
		Peningkatan gedung pemerintahan dan fasilitas umum	Pembangunan dan peningkatan gedung pemerintahan dan fasilitas umum
		Peningkatan jaringan irigasi	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi
		Peningkatan drainase dan pengendalian genangan air	Pembangunan dan peningkatan drainase dan pengendalian genangan air
		Penyelenggaraan penataan ruang	Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
			Penataan Kawasan Kesultanan Banten
		Penataan kawasan kumuh	Penataan Kawasan Kumuh dan RTLH
		Peningkatan daya dukung prasarana dan sanitasi lingkungan permukiman	Pembangunan jalan lingkungan, sarana air bersih dan sanitasi
		Fasilitasi penyerahan dan pengelolaan fasum dan fasos perumahan	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan
		Pemenuhan infrastruktur smart city	Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur smart city
Peningkatan mutu lingkungan hidup dan mitigasi bencana	**Peningkatan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup**	Peningkatam pengelolaan persampahan	Pengelolaan sampah dan limbah B3
		Pengelolaan dan penataan TPA Cilowong	Pembangunan dan pengembangan TPA Cilowong

PRIORITAS RKPD	PROGRAM PRIORITAS	FOKUS SASARAN	FOKUS KEGIATAN
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkugan hidup dan perubahan iklim	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		Peningkatan partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan
		Penataan dan pengelolaan RTH dan ruang publik	Peningkatan dan penataan Ruang Terbuka Hijau
	Peningkatan Ketahanan Bencana	Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana	Mitigasi dan penanganan bencana
		Penanganan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi	Rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana
Peningkatan tata kelola pemerintahan	**Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan mutu dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan hasil kelitbangan
		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah
		Peningkatan manajemen dan profesionalisme ASN	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur
		Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah	Peningkatan fungsi pengawasan

PRIORITAS RKPD	PROGRAM PRIORITAS	FOKUS SASARAN	FOKUS KEGIATAN
		Pemetaan organisasi dan kelembagaan	Penataan organisasi dan kelembagaan
		Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan keuangan
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah	Pengelolaan pendapatan dan belanja
	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik melalui Implementasi e-government dan Mall Pelayanna Publik
		Peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Pengelolaan dan pengembangan SPBE
		Peningkatan pelayanan publik	Fasilitasi pelayanan publik
		Pengelolaan kearsipan	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang engelolaan kearsipan

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 mengacu pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah **(RKPD) Perubahan Tahun 2023**, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah **(APBD) Perubahan Tahun 2023**. Pemerintah Kota Serang telah menyusun **Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023** dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Misi 1 : Menguatkan Peradaban Yang Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan

No.	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	5
1.	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Poin**	**73,09**
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,91
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,98
	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,51

Misi 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah Yang Berwawasan Lingkungan

No.	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	5
1.	**Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah**	**Poin**	**70,00**
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	%	77,14
2.	**Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Poin**	**47,79**
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Presentase Penanganan Timbunan Sampah	%	80
		Ketersediaan RTH	%	4,05
	Menurunnya Resiko Bencana danMeningkatnya Ketanggauhan Terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	100

Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berdaya Saing

No.	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	5
1.	**Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan local daerah**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**5,50**
	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	Tingkat inflasi daerah	%	3-5
		Indeks daya beli	Poin	79,98
		PDRB Per kapita	Juta (Rp)/Jiwa	51,67
		Indeks Gini	Poin	0,346
		Angka Kemiskinan	%	5,76
		Tingkat pengangguran terbuka	%	8,96

Misi 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

No.	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	5
1.	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi**	**Indeks Reformasi Birokrasi Daerah**	**Poin**	**61,50**
	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	81,00
		Nilai LPPD Kota	Poin	3,4600
		Hasil Evaluasi AKIP	Poin	63,00
		Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP

2.3 PROGRAM DAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pengejawantahan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana program dan kegiatan diterjemahkan dalam kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2023. Pada APBD Perubahan Kota

Serang Tahun Anggaran 2023, komposisi belanja Kota Serang sebagai penunjang program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rencana Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	1.365.179.412.874	94,31
2.	Belanja Modal	248.070.817.669	88,62
3.	Belanja Tak Terduga	1.405.987.071	91,85
Jumlah		**1.614.656.217.614**	**100**

Sumber : BPKAD Kota Serang, 2024 Unaudited (6 Februari 2024)

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Rencana Anggaran (Rp)	%
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	167.536.376.447	10,38
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	88.459.033.504	5,48
3.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	284.001.613.038	17,59
4.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	55.431.012.840	3,43
5.	Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana	4.364.754.400	0,27
6.	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	26.123.899.904	1,62
7.	Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	988.739.527.481	61,24
Jumlah		**1.614.656.217.614**	**100,00**

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Serang, 2024 (diolah)

Tabel 2.7
Rencana Anggaran Perubahan Per Program Tahun 2023

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	OPD
1	2	3	4
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	141.736.305.402	DINDIKBUD
2.	Program Pengembangan Kurikulum	75.000.000	DINDIKBUD

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	OPD
1	2	3	4
3.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.929.641.450	DINDIKBUD
4.	Program Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	387.210.000	DISPORAPAR
5.	Program Pengembangan Kapasitas daya saing Keolahragaan	14.451.457.000	DISPORAPAR
6.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000	DISPORAPAR
7.	Program Pembinaan Perpustakaan	2.484.184.404	DPK
8.	Program Pengembangan Kebudayaan	1.045.648.191	DINDIKBUD
9.	Program Pembinaan Sejarah	75.960.000	DINDIKBUD
10.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	50.970.000	DINDIKBUD
11.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	77.220.638.523	DINAS KESEHATAN
12.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1.019.051.501	DINAS KESEHATAN
13.	Program Peningkatan Ketersediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	238.910.000	DINAS KESEHATAN
14.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	786.375.875	DINAS KESEHATAN
15.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	719.583.648	DP3AKB
16.	Program Perlindungan Perempuan	294.452.173	DP3AKB
17.	Program Pemenuhan Hak Anak	113.829.250	DP3AKB
18.	Program Perlindungan Khusus Anak	305.245.034	DP3AKB
19.	Program Pengendalian Penduduk	486.130.000	DP3AKB
20.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	3.324.607.500	DP3AKB
21.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.950.210.000	DP3AKB
22.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	8.777.040.168	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
23.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum	18.512.001.900	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Limbah	5.693.927.800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	OPD
1	2	3	4
25.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	39.321.819.747	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
26.	Program Penataan Bangunan Gedung	15.309.126.904	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	30.048.875.600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
28.	Program Penyelenggaraan Jalan	99.539.417.270	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
29.	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	192.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
30.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	781.317.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
31.	Program Pengembangan Perumahan	1.805.023.604	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
32.	Program Kawasan Permukiman	19.559.340.531	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	20.305.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
34.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	22.292.612.564	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
35.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	59.085.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
36.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	136.030.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
37.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	321.420.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	OPD
1	2	3	4
38.	Program Penatagunaan Tanah	355.055.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
39.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.023.106.250	DISKOMINFO
40.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	17.182.108.700	DINAS PERHUBUNGAN
41.	Program Pengelolaan Pelayaran	72.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
42.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	252.218.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
43.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	835.201.840	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
44.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	65.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
45.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan LingkUngan Hidup (PPLH)	72.980.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
46.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	66.980.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
47.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	32.108.750	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
48.	Program Pengelolaan Persampahan	43.521.272.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
49.	Pengendalian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHAYATI)	10.585.252.250	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
50.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Non Kebakaran	2.406.464.500	SATPOL PP
51.	Program Penanggulangan Bencana	1.958.289.900	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
52.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	64.980.000	DINKOPUKMINDAG

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	OPD
1	2	3	4
53.	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	77.840.000	DINKOPUKMINDAG
54.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	85.229.500	DINKOPUKMINDAG
55.	Program Pengembangan UMKM	154.607.500	DINKOPUKMINDAG
56.	Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan	26.291.250	DINKOPUKMINDAG
57.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.795.813.750	DINKOPUKMINDAG
58.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	278.874.830	DINKOPUKMINDAG
59.	Program Pengembangan Ekspor	893.728.000	DINKOPUKMINDAG
60.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	205.273.800	DINKOPUKMINDAG
61.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	218.735.750	DINKOPUKMINDAG
62.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	32.089.890	DKP3
63.	Program Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.002.526.750	DKP3
64.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	57.393.750	DKP3
65.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	23.325.000	DKP3
66.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	786.980.000	DKP3
67.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.891.897.975	DKP3
68.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	230.863.500	DKP3
69.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.069.500.349	DKP3
70.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.587.167.924	DKP3
71.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	315.832.160	DKP3
72.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	14.103.000	DKP3
73.	Program Penyuluhan Pertanian	446.140.280	DKP3
74.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Parawisata	48.000.000	DISPORAPAR
75.	Program Pemasaran Pariwisata	402.278.000	DISPORAPAR

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	OPD
1	2	3	4
76.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	128.000.000	DISPORAPAR
77.	Program Pengembangan iklim Penanam Modal	120.670.000	DPMPTSP
78.	Program Promosi Penanaman Modal	292.442.350	DPMPTSP
79.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	454.937.000	DPMPTSP
80.	Program Pemberdaya Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	824.499.830	DP3AKB
81.	Program Pemberdayaan Sosial	152.420.000	DINAS SOSIAL
82.	Program Rehabilitasi Sosial	2.279.951.650	DINAS SOSIAL
83.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.874.882.750	DINAS SOSIAL
84.	Program Penanganan Bencana	857.840.250	DINAS SOSIAL
85.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	44.996.200	DINAS SOSIAL
86.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.046.956.528	DISNAKERTRANS
87.	Program Penempatan Tenaga Kerja	872.513.169	DISNAKERTRANS
88.	Program Hubungan Industrial	425.316.500	DISNAKERTRANS
89.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	35.992.719	DISNAKERTRANS
90.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3.008.000	DISNAKERTRANS
91.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraaan Rakyat	14.553.340.479	SEKRETARIAT DAERAH
92.	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.801.414.235	SEKRETARIAT DAERAH
93.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	824.709.518.465	SEMUA OPD
94.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.401.985.750	DISKOMINFO
95.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	200.648.750	DISKOMINFO
96.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	64.723.000	DISKOMINFO
97.	Program Pendaftaran Penduduk	535.030.000	DISDUKCAPIL
98.	Program Pencatatan Sipil	602.464.750	DISDUKCAPIL
99.	Program Pengelolaan Informasi Adminitrasi Kependudukan	601.218.155	DISDUKCAPIL
100.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	105.222.710	DISDUKCAPIL

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	OPD
1	2	3	4
101.	Program Pelayanan Penanaman Modal	256.510.000	DPMPTSP
102.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	338.829.206	DPMPTSP
103.	Program Pengelolaan Arsip	341.625.500	DPK
104.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	40.552.638.601	SEKRETARIAT DPRD
105.	Program Kepegawaian Daerah	2.384.420.380	BKPSDM
106.	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	2.740.921.250	BKPSDM
107.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.790.530.000	INSPEKTORAT
108.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	897.139.000	INSPEKTORAT
109.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.253.241.050	BAPPEDA
110.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.610.365.000	BAPPEDA
111.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.148.673.100	BAPPEDA
112.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	8.018.924.250	BPKAD
113.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.025.091.550	BPKAD
114.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.807.647.942	BAPENDA
115.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.819.715.750	SATPOL PP
116.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.376.281.308	KECAMATAN
117.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	38.285.645.171	KECAMATAN
118.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	81.875.000	KECAMATAN
119.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.832.096.675	KECAMATAN
120.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.944.140.680	KESBANGPOL
121.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengemabangan Etika serta Budaya Politik	16.519.018.524	KESBANGPOL
122.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	51.645.000	KESBANGPOL

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	OPD
1	2	3	4
123.	Program Pembinaaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya	100.048.250	KESBANGPOL
124.	Program Peningkatan Kewaspadaaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	986.938.000	KESBANGPOL
	JUMLAH	**1.614.656.217.614**	

BAB 03 AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Serang dilakukan secara berkala triwulanan dan tahunan dengan sistem desk imbal balik yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Serang untuk mewujudkan sebagai Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Serang tersebut menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Interval	Kinerja Pelayanan
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi dengan cara perhitungan sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} x\ 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{target}} \times 100\ \%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target} - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

3.1 CAPAIAN KINERJA KOTA SERANG

Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Serang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD 2018-2023 maupun RKPD Perubahan Tahun 2023. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Serang Tahun 2023 telah ditetapkan 5 (lima) tujuan dengan 5 (lima) indikator kinerja serta 7 (tujuh) sasaran dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Sasaran Strategis

1.	Sasaran 1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	:	2 indikator
2.	Sasaran 2	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	:	1 indikator
3.	Sasaran 4	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	:	1 indikator
4.	Sasaran 4	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	:	2 indikator
5.	Sasaran 5	Menurunnya resiko bencana dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	:	1 indikator
6.	Sasaran 6	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	:	6 indikator
7.	Sasaran 7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	:	4 indikator

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Serang pada Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Pengukuran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		KINERJA PELAYANAN
					REALISASI	%	
1	2	3	5	6	7	8	9
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,09	76,43	104,57	Sangat tinggi
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,91	8,91	100,00	Sangat tinggi
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,98	12,82	98,77	Sangat tinggi
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,51	75,13	109,66	Sangat tinggi
Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah	Poin	70,00	71,78	102,54	Sangat tinggi
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	%	77,14	76.07	98,61	Sangat tinggi
Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	47,79	50,61	105,90	Sangat tinggi
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Penanganan Timbunan Sampah	%	80,00	68,15	85,19	Tinggi
		Ketersediaan RTH	%	4,05	3,03	74,81	Sedang
	Menurunnya resiko bencana dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	point	100,00	140,12	59,88	Rendah
Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,50	4,74	86,18	Tinggi
	Meningkatnya perekonomian	Tingkat inflasi daerah	%	3,00	2,11	129,67	Sangat tinggi

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		KINERJA PELAYANAN
					REALISASI	%	
1	2	3	5	6	7	8	9
	daerah dan daya beli masyarakat	Indeks daya beli	Poin	79,98	80,61	100,79	Sangat tinggi
		PDRB Per kapita	Juta (Rp)	51,67	55,04	106,52	Sangat tinggi
		Indeks Gini	Poin	0,346	0,306	111,56	Sangat tinggi
		Angka Kemiskinan	%	5,76	6,2	92,36	Sangat tinggi
		Tingkat pengangguran terbuka	%	8,96	7,45	116,85	Sangat tinggi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	Poin	61,50	70,97	115,40	Sangat tinggi
	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	81,00	82,29	101,59	Sangat tinggi
		Nilai LPPD Kota	Poin	3,4600	3,4302*	99,14	Sangat tinggi
		Hasil Evaluasi AKIP	Poin	63,00	60,02	95,27	Sangat tinggi
		Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP	WTP*	100	Sangat tinggi
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					**99,78**	**Sangat tinggi**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Serang (Hasil Olahan), 2024
*Keterangan * : Data Tahun 2022*

Berdasarkan tabel di atas bahwa hasil dari capaian tersebut memperoleh rata-rata capaian kinerja pelayanan sebesar 99,78 % dengan kriteria ***Sangat Tinggi*** dengan menghitung capaian kinerja Nilai LPPD dan hasil laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai tahun 2022.

Grafik 3.1
Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemerintah Kota Serang
Tahun 2023

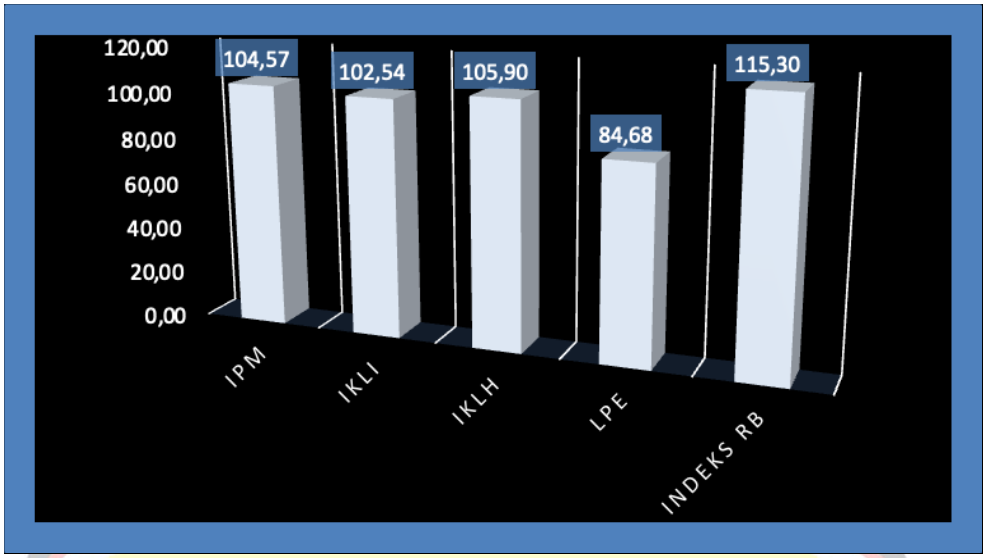

Sumber : Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Serang, Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas bahwa capaian indikator kinerja tujuan Pemerintah Kota Serang pada tahun 2023 ada 4 indikator mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan kategori kinerja ***Sangat Tinggi*** yaitu indeks pembangunan manusia, indeks kualitas layanan infrastruktur, indeks kualitas lingkungan hidup dan Indeks Reformasi Birokrasi sesuai dengan target yang ditetapkan sedangkan 1 indikator dengan capaian kinerja sebesar 84,68% dengan kategori kinerja *Tinggi* yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang diambil data tahun 2023.

Tabel 3.4
Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis
Pemerintah Kota Serang Tahun 2023

No	Predikat	Rata-rata % Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat Tinggi	91 % ≤ 100 %	18
2	Tinggi	76 % ≤ 90 %	2
3	Sedang	66 % ≤ 75 %	1
4	Rendah	51 % ≤ 65 %	1
5	Sangat Rendah	≤ 50 %	0
Jumlah			**22**

Untuk mewujudkan Kota Serang yang berdaya dan berbudaya sesuai dengan Visi RPJMD 2018-2023, disusunlah proses bisnis yang berisi uraian

proses inti, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis Pemerintah Kota Serang.

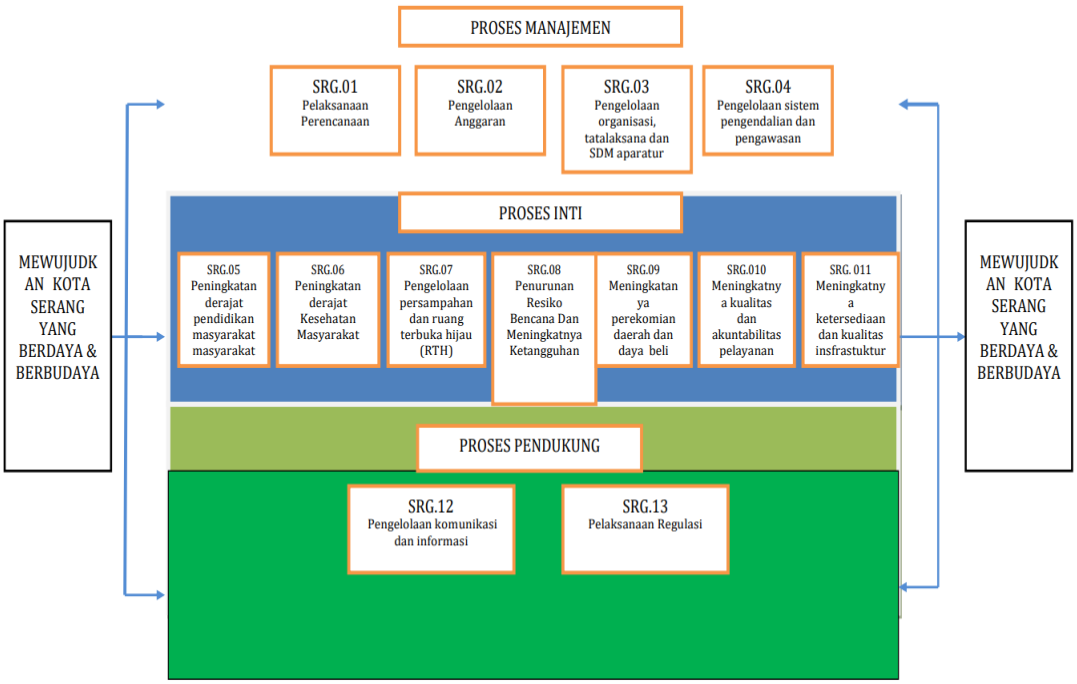

Gambar 3.1 Peta Proses Bisnis Kota Serang

Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Serang. Berikut disajikan bagan *Crosscutting* yang dimaksud:

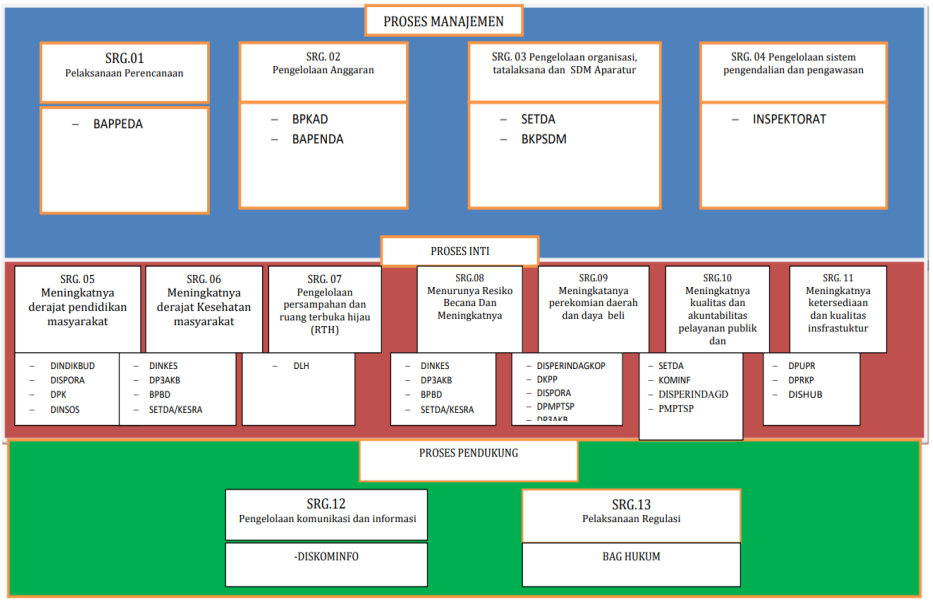

Gambar 3.2 *Crosscutting* untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Strategis Pemerintah Kota Serang

Adapun analisis capaian kinerja dari semua indikator Pemerintah Kota Serang pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. **TUJUAN STRATEGIS 1**

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya"

Pengenalan Materi Kepada Siswa Penerapan Teknologi Informasi

Pelayanan Kepada Masyarakt di RSUD Kota Serang

Gambar 3.3. Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Mewujudkan Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya

Salah satu Indikator Kinerja untuk mewujudkan tujuan strategis ini adalah Indeks Pembangunan Manusia sebagai upaya untuk mencapai misi pertama yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 yaitu **"Menguatkan peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan".** Pencapaian misi ini didukung oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai Perangkat Daerah utama.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang tahun 2023 tercapai sebesar 76,43 meningkat sebesar 3,45 point dari tahun 2022 sebesar 72,98 dengan capaian kinerja sebesar 104,57% kriteria sangat tinggi. Hasil pengukuran kinerja Indeks Pembangunan Manusia terlihat sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Pengukuran Kinerja Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Indeks Pembangunan Manusia	IPM = $^1/_3$ [$X_{(1)}$ + $X_{(2)}$ + $X_{(3)}$] Dimana: $X_{(1)}$: Indeks harapan hidup $X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $^2/_3$(indeks melek huruf) + $^1/_3$(indeks rata-rata lama sekolah) $X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak Indeks $X_{(i)}$= $X_{(i)}$ - $X_{(i)min}$ / [$X_{(i)maks}$ - $X_{(i)min}$] Dimana: $X_{(1)}$: Indikator ke-i (i = 1, 2, 3) $X_{(2)}$: Nilai maksimum sekolah $X_{(i)}$ $X_{(3)}$: Nilai minimum sekolah $X_{(i)}$	Poin	73,09	76,43	104,57	Sangat tinggi

Sumber : BPS Kota Serang, 2023

IPM Provinsi Banten tahun 2023 sebesar 75,77 lebih tinggi dari IPM Nasional sebesar 74,39 seperti terlihat dalam tabel 3.6 dan grafik 3.2 berikut:

Tabel 3.6
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017-2023

NO	IPM	TAHUN						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39
2	Banten	71,42	71,95	72,44	74,41	74,68	75,25	75,77
3	Kota Serang	71,31	71,68	72,1	72,16	72,44	72,98	76,43

Sumber : BPS Kota Serang, 2024

Walaupun setiap tahun nilai IPM Kota Serang terus meningkat dimana Tahun 2017 sebesar 71,31, meningkat menjadi 76,43 pada Tahun 2023, capaian tersebut di atas nilai IPM Nasional dan Banten.

Pada grafik di bawah terlihat pertumbuhan IPM Kota Serang dari tahun 2017-2023 laju pertumbuhannya mengalami peningkatan dan di tahun 2023 berada di atas nilai IPM Nasional dan Provinsi Banten. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia di Kota Serang pada tahun 2023 berada di antara rata-rata pertumbuhan kualitas sumber daya manusia secara nasional dan Provinsi Banten.

Capaian IPM Kota Serang Tahun 2023 sebesar 76,43 poin, jauh dari target yang ditetapkan (73,09). Capaian ini menunjukan peningkatan sebesar 0,42 poin dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 76,01 poin dan masuk pada klasifikasi "tinggi" ($70 \leq IPM < 80$). Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian IPM Provinsi Banten dan Indonesia ditahun yang sama, yaitu

sebesar 75,77 poin dan 74,39 poin. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kota Serang dapat lebih meningkatkan akses terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Perhitungan IPM mengalami perubahan pada komponen usia harapan hidup (UHH) karena menggunakan hasil *Long Form* SP2020 (SP2020-LF). Hal ini menyebabkan capaian IPM Kota Serang dari tahun 2020 hingga 2023 meningkat dari perhitungan sebelumnya yang tidak menggunakan *Long Form* SP2020.

Grafik 3.2
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017-2023

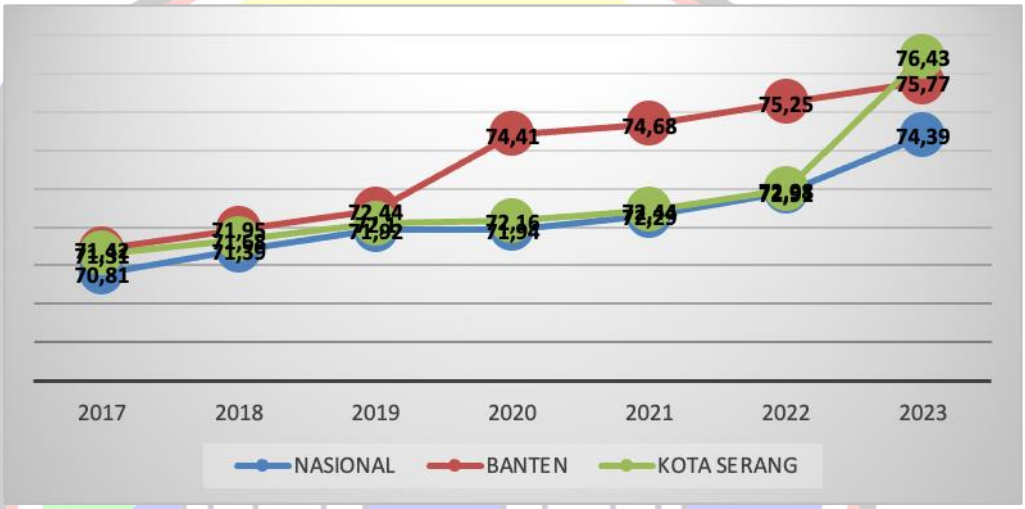

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Pertumbuhan capaian dan target yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 Kota Serang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Indeks Pembangunan Manusia dalam Perubahan RPJMD 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Sesudah
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,68	72,1	72,16	72,44	72,98	76,43	73,92	73,09

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang 2018-2023

Berdasarkan tabel di atas sampai dengan tahun 2023 capaian IPM sebesar 104,57% atau melebihi target RPJMD sebesar 3,34 point. Peningkatan IPM Kota Serang terjadi pada semua komponen pembentuknya. Umur

Harapan Hidup Kota Serang pada tahun 2023, mencapai 75,13 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Kota Serang yang lahir pada tahun 2023 mempunyai harapan untuk hidup sampai usia 75 tahun. Sepanjang periode 2020 hingga 2023, Kota Serang telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir selama 0,7 tahun.

Adapun Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 telah mencapai 12,82 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2023, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II diperguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.

Rata-rata Lama Sekolah di Kota Serang pada tahun 2023 telah mencapai 8,91 tahun dengan pertumbuhan yang selalu positif. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2023 telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III). Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Kota Serang terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pengeluaran Per kapita Disesuaikan Kota Serang meningkat dari Rp. 1.370.900,- pada Tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 1.408.800,- pada Tahun 2023. Ini artinya kemampuan masyarakat Kota Serang dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2022.

Adapun permasalahan yang terjadi dalam pencapaian indeks pembangunan manusia ini berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia Kota Serang antara lain:

a. Belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, yaitu :
    1) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar dan kesetaraan, dimana capaian untuk Harapan Lama Sekolah sebesar 12,82 Tahun (Tahun 2023), Angka Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,91 persen (Tahun 2023);
    2) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan dasar, serta jumlah dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan belum memenuhi standar, sebagai gambaran rasio rata-

rata jumlah guru SD terhadap jumlah murid SD per kelas sebesar 1:42 dan untuk RGM sekolah menengah sebesar 1:48 (standar 1:32).

b. Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, yaitu :
   1) Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 2023 sebesar 75,13 tahun, di atas rata-rata Provinsi Banten sebesar 74,77 tahun;
   2) Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan untuk akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
   3) Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat;
   4) Masih ditemukannya kasus Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), gizi buruk (stunting) dan kasus penyakit menular,
   5) Masih belum idealnya jumlah tenaga dokter dan paramedik,
c. Belum optimalnya pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
d. Belum optimalnya cakupan pelayanan perlindungan perempuan dan anak, yang tergambar dari masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini dikarenakan belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak.
e. Masih rendahnya peranan pemuda dalam pembangunan yang disebabkan diantaranya oleh masih rendahnya pembinaan serta sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.
f. Belum optimalnya pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya daerah yang disebabkan oleh belum optimalnya pelestarian dan implementasi seni dan budaya di masyarakat.

Tujuan daerah tersebut ditunjang dengan sasaran strategis pembangunan Kota Serang sebagai berikut:

a. Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut. Pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Perangkat Daerah utama.

Perpustakaan Keliling ke Sekolah

Perpustakaan Daerah Sebagai Sarana Mencerdaskan masyarakat Kota Serang

Pembangunan gedung Perpustakaan di Sekolah

Pemberian bantuan bagi anak yang tidak mampu dengan beasiswa

Gambar 3.4 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Derajat Pendidikan

Sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat di Kota Serang diukur dengan indikator angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} xi$ dimana: RLS = Rata-rata Lama sekolah Penduduk usia 25 tahun ke atas *xi* = Lama Sekolah Penduduk ke-i yang berusia 25 tahun n = Jumlah Penduduk usia 25 tahun ke atas	Tahun	8,91	8,91	100,00	Sangat tinggi
2	Harapan Lama Sekolah	$HLS\ {}_{a}^{t} = FKx \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Dimana :	Tahun	12,98	12,82	98,77	Sangat tinggi

		HLS_a^t = Harapan Lama sekolah pada umur *a* di tahun *t* E_i^t = Jumlah Penduduk usia *i* yang bersekolah pada tahun *t* P_i^t = Jumlah Penduduk usia *i* pada tahun *t* *i* = usia (a, a+1,....n) FK = Faktor Koreksi					
	Rata-rata Capaian Kinerja					**99,38**	**Sangat tinggi**

Sumber : BPS Kota Serang, 2024

Berdasarkan tabel di atas sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat melalui 2 indikator kinerja Tahun 2023 untuk rata-rata capaian kinerja untuk angka rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebesar 99,38% dengan kategori pelayanan ***Sangat Tinggi*** meningkat dibandingkan kondisi awal tahun 2022 di mana rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,01 dan harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Serang dalam mencerdaskan masyarakatnya terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan pada tahun 2023. Peningkatan tersebut diantaranya karena Pemerintah Kota Serang telah membebaskan biaya pendidikan untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama melalui biaya operasional sekolah serta memberikan beasiswa bagi murid berprestasi sehingga bisa membantu bagi masyrakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya.

Tabel 3.9
Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat dalam Perubahan RPJMD 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Sesudah
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Thn	8,62	8,67	8,76	8,89	8,9	8,91	8,68	8,91
2	Harapan Lama Sekolah	Thn	12,65	12,77	12,78	12,79	12,81	12,82	12,77	12,98

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang 2018-2023

Rata-rata capaian terhadap target akhir RPJMD adalah 99,38% untuk 2 indikator sasaran pendidikan tersebut dengan rata-rata lama sekolah adalah 100,00% dari target akhir RPJMD 8,91 dan harapan lama sekolah sebesar 98,77% dari target akhir RPJMD 12,98 dan masih kurang 0,16 point.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2023 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2023	
				Realisasi	%
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,91	8,91	100,00
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,98	12,82	98,77
Rata-rata terhadap RPJMD					**99,38**

Sumber : BPS Kota Serang. 2024

Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang tahun 2023 adalah sebesar 8,91 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Serang usia 25 tahun ke atas memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 8-9 tahun atau dapat menyelesaikan sekolah hanya sampai kelas 2 SLTP. Meskipun dapat memenuhi target tahun 2023 sebesar 8,91 tahun, namun untuk mencapai target rata-rata bersekolah 9 tahun masih membutuhkan upaya lebih kerja keras lagi dari Pemerintah Kota Serang. Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang juga masih di bawah Provinsi Banten yang mencapai 9,15 dan di atas Nasional yaitu 8,77.

Adapun grafik capaian selama lima tahun dibandingkan dengan Provinsi Banten dan nasional sebagaimana grafik berikut:

Grafik 3.3
Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2017-2023

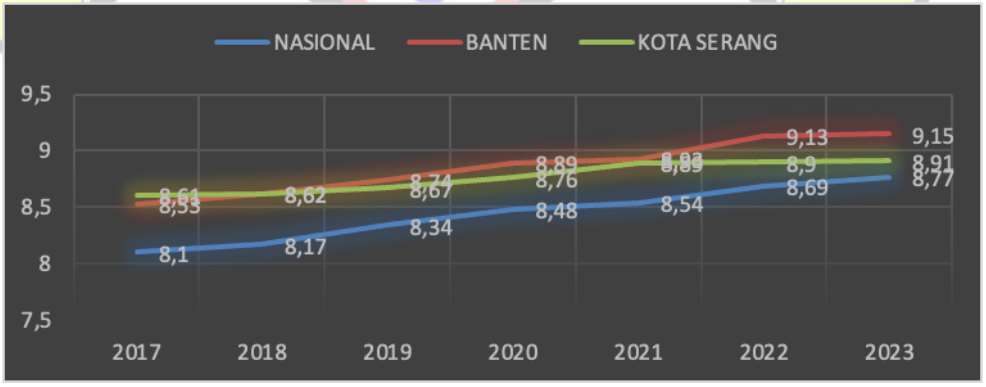

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan trend grafik di atas selama tahun 2017-2023 bahwa angka rata-rata lama sekolah selalu berada di antara Provinsi Banten dan Nasional dan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan.

Harapan Lama Sekolah Kota Serang tahun 2023 adalah sebesar 12,82 tahun menggambarkan jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah pada tahun itu dibagi dengan jumlah total penduduk yang berusia pada tahun bersangkutan. Hal ini menjelaskan bahwa harapan untuk usia sekolah di Kota Serang berkisar antara 12,82 atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus Sekolah Menengah Umum. Harapan Lama Sekolah Kota Serang juga masih di bawah Provinsi Banten yang mencapai 13,09 dan Nasional yaitu 13,15.

Grafik 3.4

Capaian Harapan Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2017–2023

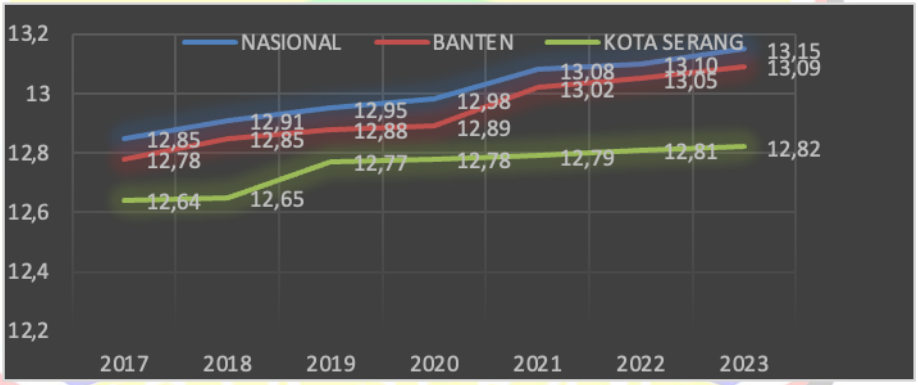

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Trend angka harapan lama sekolah selama tahun 2017-2023 selalu di bawah angka provinsi Banten dan nasional hal ini menunjukkan bahwa Kota Serang masih jauh tertinggal dalam harapan lama sekolah dan harus memperbaiki dari segala fasilitas dan kualitas pendidikan agar bisa mengejar ketertinggalan dan masyarakatnya menjadi lebih cerdas.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, disusunlah proses bisnis yang berisi uraian proses inti, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis pada sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat berserta intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang.

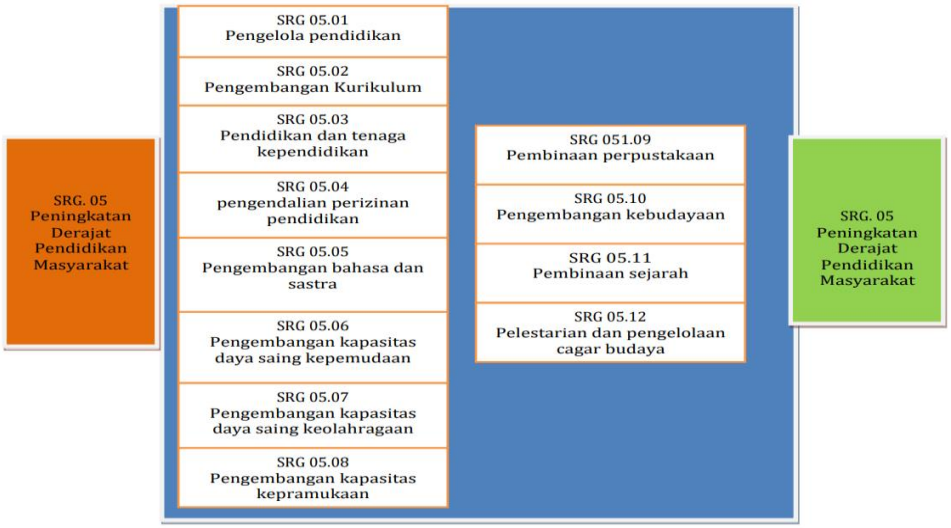

Gambar 3.5 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta penanggung jawab. Berikut disajikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran daerah beserta perangkat daerah pengampu.

Gambar 3.6 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

Dalam usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya kualitas pendidikan ini. Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 3. 11
Faktor Penghambat dan Pendorong
Sasaran Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	OPD Pendukung
1	Sarana Prasarana Pendidikan belum memadai	a. Membangun dan merehabilitasi gedung sekolah yang sudah tidak layak b. Menambah kelas baru agar bisa mengakomodir jumlah siswa yang masuk sekolah c. Melengkapi fasilitas dan alat peraga pendidikan beserta kelengkapan laboratoriumnya	Dindikbud
2	Kualitas tenaga pendidikan yang masih rendah	a. Memberikan diklat kepada para guru agar bisa meningkatkan kualitas mengajarnya b. Memberikan diklat mengenai teknik memberikan materi bahan pengajaran dalam menghadapi belajar mneggunakan teknologi informasi	Dindikbud
3	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pendidikan karena rendahnya penghasilan keluarga	a. Memberikan BOS dan Beasiswa bagi para siswa yang tidak mampu b. memberikan keringanan kepada keluarga yang tidak mampu dalam menyekolahkan anaknya	Dindikbud
4	Kurangnya sarana dan prasarana serta lembaga pendidikan informal	Bekerjasama dengan lembaga pendidikan informal dengan memberikan bantuan sapras untuk siswa kejar paket	Dindikbud
5	Kurangnya minat baca masyarakat	a. Memberikan pelayanan perpustakaan keliling dan digital kepada masyarakat b. Revitalisasi Gedung Juang 45 menjadi salah satu destinasi wisata sejarah kearsipan dan edukasi (ruang perpustakaan umum dan anak) pada Tahun 2020. c. Pengembangan Sistem Informasi (sistem / aplikasi), terdiri dari - Perpustakaan Digital yakni E Pusda Kota Serang (Tahun 2020)	Dindikbud dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	OPD Pendukung
		- Pinjam Antar Buku (Pintar Buku) Tahun 2021 d. Pendirian Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial e. Pendirian Pojok-pojok baca yang berlokasi Kecamatan Taktakan, Masjid Al-Ikhlas BIP dan Kp. Pejaten Kel. Kaligandu f. Layanan Perpustakaan ekstensi yang terdiri dari perpustakaan Keliling yang dilaksanakan seminggu sekali di 10 lokasi yang tersebar di Kabupaten/Kota, Layanan Pojok Baca di 10 titik lokasi yang ramai dikunjungimasyarakat. g. Silang layan peminjaman buku pada program Sistem Perpustakaan. h. Layanan Delivery Order Pemustaka Istimewa yang pada tahun lalu mulai dilayankan. Para pemustaka istimewa yang ingin meminjam buku, tinggal memesan buku yang ingin dipinjam melalui aplikasi	
6	Rendahnya Daya saing kepemudaan dan keolahragaan	a. Mengikutsertakan para pelajar dan pemuda dalam berbagai kompetisi olahraga dan kesenian b. Melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian bagi para pemuda dalam bidang olahraga dan kesenian	Dindikbud dan Disporapar

b.Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut. Pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. sebagai Perangkat Daerah utama.

Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kota Serang diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup sesuai dengan tabel 3.12.

Pelayanan masyarakat yang sakit di RSUD Kota Serang

Medical chek up langsung langsung ke m Masyarakat

Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor

Pembinaan dan Pendampingan kepada Masyarakat terkait Stunting

Gambar 3.7 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.12
Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Usia Harapan Hidip	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.	Tahun	68,51	75,13	109,66	Sangat tinggi

Sumber : BPS Kota Serang, 2024

Berdasarkan tabel di atas sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui indikator kinerja usia harapan hidup Tahun 2023 senilai 75,13 tahun atau sebesar 109,66% dengan kategori pelayanan ***Sangat Tinggi*** jika dibandingkan kondisi awal tahun 2022 sebesar 74,84 tahun yang meningkat sebesar 0,29 point. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan kesehatan masyarakatnya terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan pada tahun 2023. Peningkatan ini merupakan usaha dari Pemerintah Kota Serang dalam melaksanakan program-program kesehatan dengan berbagai macam kendala yang dihadapi.

Tabel 3.13
Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dalam Perubahan RPJMD 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Sesudah
1	Usia Harapan Hidup	Thn	67,58	67,83	74,43	74,54	74,84	75,13	68,75	68,51

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang 2018-2023

Capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD adalah 109,66% atau sangat tinggi dari target 68,51 yang sudah melewati target yang sudah ditetapkan.

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2023 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2021	
				Realisasi	%
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,51	75,13	109,66
Capaian Kinerja terhadap RPJMD					**109,66**

Sumber : BPS Kota Serang, 2024

Usia harapan hidup dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 Usia Harapan Hidup tercapai sebesar 75,13. Pencapaian tersebut masih di bawah angka Provinsi Banten

yang mencapai 74,77 dan angka Nasional 73,93. Adapun grafik capaian kinerja selama lima tahun sebagaimana berikut:

Grafik 3.5

Capaian Usia Harapan Hidup Kota Serang Tahun 2017–2023

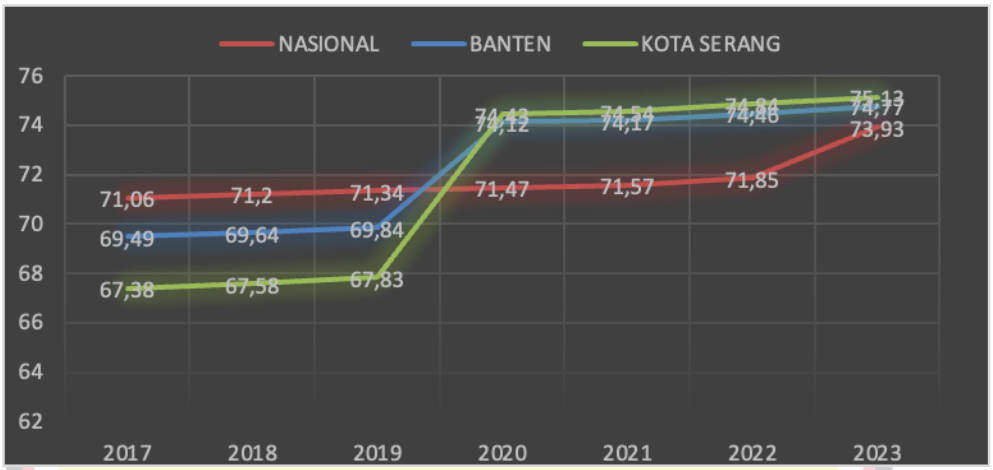

Sumber : Badan Pusat Statitstik, 2024

Untuk mencapai sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, disusunlah proses bisnis yang berisi uraian proses inti, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis pada sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat berserta intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang.

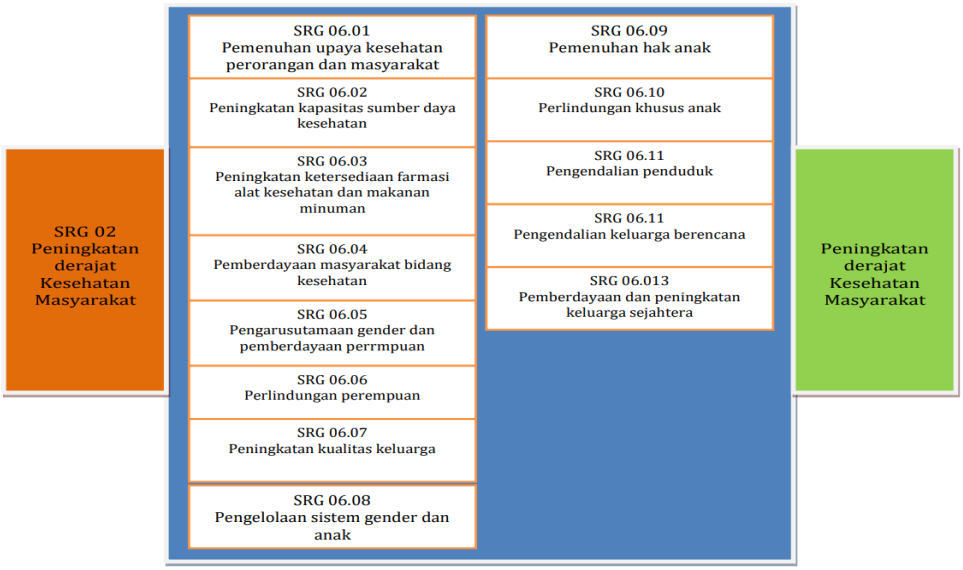

Gambar 3.8 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta penanggung jawab.

Berikut disajikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran daerah beserta perangkat daerah pengampu.

Sumber : Bappeda Kota Serang, 2021

Gambar 3.9 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Permasalahan utama dalam meningkatkan usia harapan hidup di Kota Serang sebagai berikut:

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

   Jumlah kematian ibu pada tahun 2018 adalah sebanyak 24 kasus. Kasus kematian ibu mengalami penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu menjadi 21 kasus di tahun 2019 dan 17 kasus di tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah kematian ibu sama dengan jumlah kasus pada tahun 2020 yaitu sebanyak 17 kasus. Selanjutnya, jumlah kematian ibu meningkat menjadi 20 kasus. Kemudian, pada tahun 2023 kembali terjadi peningkatan jumlah kematian ibu sebanyak 21 kasus. Sehingga Angka Kematian Ibu Tahun 2023 adalah 21 per 100.000 kelahiran hidup.

   Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses terjadinya kematian ibu. Proses yang paling dekat terhadap kejadian kematian ibu, disebut sebagai risiko dekat yaitu kehamilan itu sendiri dan komplikasi yang terjadi dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas (komplikasi obstetri). Risiko dekat secara langsung dipengaruhi oleh status kesehatan ibu, status reproduksi, akses ke pelayanan kesehatan, perilaku perawatan

kesehatan/penggunaan pelayanan kesehatan dan faktor lain yang tidak diketahui atau tidak terduga. Selain itu terdapat juga risiko jauh yang mempengaruhi kejadian kematian ibu, yaitu faktor sosiokultural dan faktor ekonomi..

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

   Jumlah kematian bayi pada tahun 2018 adalah sebanyak 21 kasus. Kasus kematian bayi meningkat pada tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu menjadi 28 kasus di tahun 2019 dan 29 kasus di tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah kematian bayi mengalami penurunan dengan jumlah kematian sebanyak 13 kasus. Selanjutnya, jumlah kematian bayi kembali mengalami peningkatan menjadi 32 kasus. Kemudian, pada tahun 2023 kembali terjadi peningkatan jumlah kematian bayi yang tercatat sebanyak 63 kasus. Sehingga Angka Kematian Bayi yang terlaporkan di Tahun 2023 adalah sebanyak 63 per 1000 kelahiran hidup.

   Penyebab kematian bayi di Kota Serang adalah asfiksia, BBLR, gagal nafas, Tetanus Neonatal (TN), kelainan bawaan, infeksi dan penyebab lainnya. Status kesehatan bayi sangat terkait dengan beberapa faktor ibu selama hamil dan ibu melahirkan, sedangkan status kesehatan ibu sangat dipengaruhi status kesehatan pada saat remaja dan masa - masa sebelumnya. Pendekatan siklus hidup (1000 HPK) sangat diperlukan untuk menurunkan angka kematian bayi di Kota Serang.

3. Balita Gizi Buruk

   Persentase Balita Gizi Buruk pada tahun 2018 adalah sebesar 0,08%. Persentase Balita Gizi Buruk mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 0,17% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,16%. Pada tahun 2021, Persentase Balita Gizi Buruk mengalami peningkatan kembali sebesar 0,17%. Selanjutnya, Persentase Balita Gizi Buruk kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 yaitu tercatat diangka 0,49%. Kemudian, pada tahun 2023 mengalami penurunan, yang tercatat adalah sebesar 0,28% (target tahun 2023 sebesar 0,12%).

   Faktor penyebab masih terjadinya gizi buruk adalah adanya peningkatan partisipasi balita di posyandu (D/S) dibandingkan tahun lalu dan pemenuhan alat antropometri pada seluruh posyandu di Kota Serang, sehingga terjadi

peningkatan penemuan kasus gizi buruk. Karena meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pencegahan stunting sehingga orang tua balita berusaha untuk memantau pertumbuhan anaknya secara rutin di posyandu.

4. Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan untuk akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
5. Masih belum idealnya jumlah dokter dan tenaga paramedis pada Tahun 2022, yaitu rasio dokter per 1000 penduduk sebesar 0,050 dan rasio tenaga paramedis (Bidan dan Perawat) per 1000 penduduk sebesar 0,267.
6. Masih kurangnya pemhaman dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan program KKBPK
7. Meningkatnya angka kelahiran pada perempuan kelompok umur 25- 29 Th sebanyak 3.378 kelahiran
8. Kurang maksimalnya kinerja kader TPK dalam pendampingan Catin dalam aplikasi elsimil, pendampingan Ibu balita dan pendampingan Ibu Pasca Bersalin.

Upaya yang telah dilakukan dalam pemecahan masalah AKI dan AKB Tahun 2023 antara lain:

1. Menyelenggarakan Pelatihan untuk tenaga kesehatan, meliputi:
   a. Dokter pelatihan USG
   b. Bidan dan perawat pelatihan kegawatdaruratan pada ibu dan bayi
   c. Tenaga kesehatan pelatihan skrining hipotiroid kongenital
2. Pendampingan dokter spesialis kandungan dan spesialis anak ke puskesmas
3. Supervisi praktik pelayanan KIA di praktik mandiri bidan, puskesmas, posyandu dan klinik
4. Workshop pelayanan KB Pasca Salin
5. Pelatihan Surveilans kelainan bawaan
6. Pelatihan pemantauan tumbuh kembang Melakukan upaya program kesehatan yang melibatkan masyarakat, antara lain:
   a. Bimbingan dan konseling pada calon pengantin
   b. Kelas ibu hamil
   c. Kelas ibu balita
7. Kordinasi program dengan lintas sector dan masyarakat terkait pelayanan kesehatan catin dan P4K

8. Sosialisasi pelayanan KIA di 6 Kecamatan
9. Pembinaan P2WKSS
10. Pembinaan kampung KB Melakukan upaya pemenuhan sarana penunjang penurunan AKI dan AKB, antara lain:
    a. Alkes USG
    b. Alkes Antropometri
    c. Buku KIA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Serang Tahun 2023
    d. Obat dan BMHP
    e. Suplementasi FE dan Asam Folat.

Upaya peningkatan pada indikator sasaran Persentase Balita Gizi Buruk antara lain:

1. Adanya kunjungan rumah balita gizi buruk oleh tenaga kesehatan (sumber dana BOK Puskesmas).
2. Penyelenggaraan klinik gizi di puskesmas.
3. Rujukan balita gizi buruk, jika tidak mempunyai BPJS maka dibantu dengan SKTM.
4. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan bagi balita gizi buruk.
5. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada balita di Posyandu terkait dengan upaya tersebut melalui Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan rutin setiap bulan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan melalui koordinasi dan penggerakan kepada lintas sektor terutama Tim Pokjanal Posyandu di berbagai tingkatan administrasi, Kecamatan, Kelurahan, Tim Penggerak PKK, Lembaga swadaya Masyarakat, organisasi profesi, dan Organisasi Kemasyarakatan lain yang ada di wilayah masing-masing.
6. Memberikan edukasi kepada ibu balita/pengasuh mengenai hasil pemantauan pertumbuhan, Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), stimulasi perkembangan dan pelayanan kesehatan berikutnya.
7. Menintervensi balita yang ditemukan mengalami masalah gizi dan kesehatan (gagal tumbuh dan kembang).
8. Melaksanakan sosialisasi Program KKBPK dan peningkatan kapasitas Program KKBPK di Kampung KB

9. Melaksanakan KIE KB dan program KKBPK dan melaksanakan pelayanan KB metoda MKJP secara kontinyu;
10. Memberikan bimtek dan peningkatan kapasitas kader pendamping TPK Peningkatan kegiatan imunisasi, posyandu, pelayanan ibu, bayi, bumil, anak, remaja sampai lansia
11. Pelaksanaan pelayanan dilakukan dengan penyesuaian-penyesuaian dalam mekanisme pelayanan dalam gedung dan luar gedung dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan.

2. TUJUAN STRATEGIS 2

"Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah"

Pembangunan Mesjid atsauroh

Pembangunan Drainase Kelurahan Bendung Kec. Kasemen

Pemasangan Penerangan Jalan Umum

Razia gabungan dengan Kepolisian Penertiban Lantas

Gambar 3.10 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Infrastruktur

Indikator Kinerja tujuan ini adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke dua yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 yaitu **"Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan"**. Pencapaian misi

ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemukiman dan Kawasan Perumahan, Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Perangkat Daerah utama. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Serang diperoleh dengan survei yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Serang dengan mutu pelayanan terbagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

Tabel 3.15
Kinerja Mutu Pelayanan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1,00 – 2,99	10,00 – 29,99	D	Sangat Tidak Puas
3,00 – 4,99	30,00 – 49,99	C	Tidak Puas
5,00 – 6,99	50,00 – 69,99	C+	Cukup Puas
7,00 – 8,99	70,00 – 89,99	B	Puas
9,00 – 10	90,00 – 100	A	Sangat Puas

Sumber : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, 2023

Hasil analisis terhadap penilaian indeks kualitas layanan infrastruktur melalui kuesioner yang dilakukan terhadap 864 responden yang di sebar ke seluruh kecamatan se-Kota Serang. Nilai Capaian pengukuran IKLI dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.16
Capaian Pengukuran Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah	Nilai diperoleh dari Survei yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang	Poin	70	71,78	102,54	Sangat tinggi

Sumber : Bappeda Kota Serang, 2024

Berdasarkan tabel di atas untuk capaian kinerja pada tahun 2023 ini tercapai 102,54% dengan kinerja pelayanan sangat tinggi karena tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Serang tahun 2023 tercapai sebesar 71,778. Apabila kita lihat tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan Kinerja Pelayanan Infrastruktur di Kota Serang adalah **"Puas" atau dengan skor B**. Dalam hal ini masyarakat telah merasakan hasil pembangunan infrastruktur diwilayahnya meskipun belum maksimal.

Adapun rincian IKLI per Kecamatan se-Kota Serang tahun 2023 dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.17
Nilai IKLI Kecamatan se-Kota Serang Tahun 2023

Kecamatan	Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
Serang	81,04	B	Puas
Taktakan	66,13	C+	Cukup Puas
Cipocok Jaya	83,04	B	Puas
Walantaka	61,52	C+	Cukup Puas
Kasemen	75,14	B	Puas
Curug	63,80	C+	Cukup Puas
Kota Serang	**71,78**	**B**	**Puas**

Sumber : Bappeda Kota Serang, Tahun 2024

Berdasarkan table di atas pembangunan infrastruktur dilakukan secara terus menerus oleh Pemerintah Kota Serang. Pada Tahun 2023 dengan kualitas Baik terdapat pada Kecamatan Cipocok Jaya, Serang dan Kasemen dengan Skor 83,04, 81,04 dan 72,21. Hal ini menunjukkan pembangunan terkait infrastruktur di wilayah tersebut sudah mengalami perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan Kecamatan Taktakan, Walantaka dan Curug dalam rangka memberikan layanan yang maksimal terhadap kebutuhan masyarakat untuk menunjang perekonomian daerah. Pertumbuhan indeks kepuasan layanan infrastruktur dapat dilihat perkembangannya pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 3.18
Perkembangan Nilai IKLI Kecamatan se-Kota Serang
Tahun 2019-2023

Tahun	Serang	Taktakan	Cipocok Jaya	Walantaka	Kasemen	Curug	Kota Serang
2019	58,75	42,27	59,93	53,2	55,65	55,27	57,71

Tahun	Serang	Taktakan	Cipocok Jaya	Walantaka	Kasemen	Curug	Kota Serang
2020	66,46	60,90	69,89	58,68	59,16	56,16	61,87
2021	69,31	59,96	64,70	61,07	61,04	59,87	62,70
2022	72,18	52,74	69,53	58,97	72,21	50,97	62,77
2023	81,04	66,13	83,04	61,52	75,14	63,80	71,78

Sumber : Bappeda Kota Serang, Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa selama kurun waktu tahun 2019-2023 terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya terhadap kualitas infrastruktur wilayah terutama di Kecamatan Kasemen, Serang dan Cipocok Jaya yang dengan nilai di atas IKLI Kota Serang sedangkan Kecamatan Curug, Walantaka dan Taktakan merupakan daerah yang potensi wilayahnya sebagian besar pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan nilainya di bawah IKLI Kota Serang. Hal ini menjadi tugas Pemerintah Kota Serang dalam meneruskan pembangunan pada tahun selanjutnya agar lebih maksimal dalam memperbaiki infrastruktur wilayah.

Grafik 3.6
Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Serang
Tahun 2019-2023

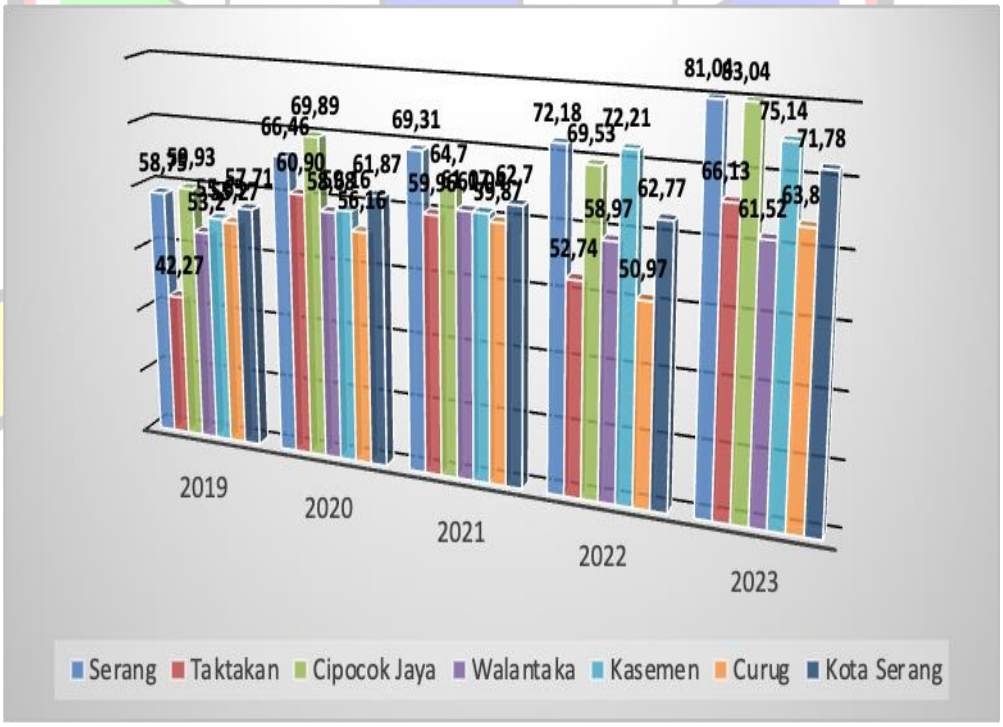

Sumber : Bappeda Kota Serang, 2020-2024

Tabel 3.19
Realisasi dan Target IKLI dalam Perubahan RPJMD
Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
			2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Sesudah
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah	Poin	57,71	61,87	62,70	62,77	71,78	70	70

Sumber : Bappeda Kota Serang, 2019-2024

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap kondisi akhir Perubahan RPJMD sebesar 102,54% atau kategori ***Sangat Tinggi***. Berdasarkan tabel di atas target sudah tercapai dengan kriteria **'Puas"** dengan skor B dan selisih sebesar 1,78 point sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD.

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Tahun 2023 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2023	
				Realisasi	%
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah	Tahun	70	71,78	102,54
Capaian Kinerja terhadap RPJMD					**102,54**

Sumber : Bappeda Kota Serang, 2024

Berdasarkan pada data diatas, maka dapat kita simpulkan dalam sebuah kerangka berpikir analitik bahwa Nilai Indeks pada tahun 2023 yang berbasiskan pada data tahun 2022 memberikan efek dan kenaikan yang sangat luar biasa. Kepuasaan Masyarakat terhadap pembangunan terutama pada kualitas infrastruktur itu sendiri dapat dikatakan puas. Walau demikian masih tetap ada tugas dari Pemerintah Kota Serang yang harus terus diperbaiki untuk masyarakat merasakan arah Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang dalam bidang infrastruktur.

Berdasarkan pada lingkup kajian dan juga hasil di lapangan, maka terdapat beberapa hal yang kemudian kiranya dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Kota Serang dalam membuat program yang berkaitan dengan

infrastruktur yang ada di Kota Serang. Adapun beberapa penanganan isu-isu strategis yang dapat dijadikan pertimbangan adalah :

1. **Jalan**

   Masyarakat merasakan perbaikan pada jalan walaupun ada yang masih mengeluh akan tetapi rata-rata menyatakan puas, dan hal ini harus terus di pelihara dan di perbaiki.

2. **Sampah**

   Masalah pembuangan sampah, dimana tidak ada bak sampah atau penampungan yang cukup memadai menjadikan masyarakat merasa bahwa permasalahan sampah kemudian menjadi beban dari pemerintah. Walapun harus diakui bahwa budaya bersih dan budaya membuang sampah pada tempatnya masih sangat rendah. Oleh karenanya dalam kasus ini harus ada ketegasan dan pendekatan sosial bagi masyarakat terkait dengan masalah sampah ini.

3. **Air Bersih**

   Peran dari pemerintah Kota Serang dalam pemenuhan air bersih dirasa masih sangat minim, hampir dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Serang dalam perespsi masyarakat abai pada pemenuhan air bersih ini.

4. **IPLT (Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja)**

   Hampir sama dengan keadaan pada penyediaan air bersih, persepsi masyarakat pada IPLT ini dapat dikatakan sangat tidak puas, masyarakat merasakan ketidakhadiran pemerintah dalam pengelolaan IPLT ini, bahkan masyarakat awam tidak banyak mengetahui tentang IPLT ini.

5. **Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM)**

   Masyarakat belum merasakan pelayanan pada Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) ini. Indikator menjadi salah satu yang kemudian menjadikan nilai kepuasaan menjadi turun. Harus di buat sebuah rencana program yang terstruktur dan tersimultan dengan baik yang memiliki koherensi dengan program lainnya yang memperlihatkan bagaiman SPAM ini menjadi program prioritas di 6 Kecamtatan di Kota Serang.

6. Ruang Terbuka Hijau

Masih belum meratanya dan sedikitnya Ruang Terbuka Hijau yang tersebar di 6 Kecamatan di Kota Serang. Untuk dijadikan sebagai perhatian agar masuk dalam program penting pada penantaan ruang terbuka hijau.

Strategi dan upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembangunan berdasarkan pada program dan indikator pembangunan yang dirasa kurang dan belum menjadi program prioritas dalam pembangunan infrastruktur.
2. Melakukan koordinasi antar unit ataupun OPD dalam pengimplentasian dari pembangunan yang berkelanjutan
3. Memfokuskan pada program pembangunan dengan indikator yang negatif.
4. Menindaklanjuti infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Serang yang kondisinya dinilai buruk oleh masyarakat sehingga menyebabkan ketidakpuasan masyarakat.
5. Menyusun perencanaan anggaran untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dengan Dinas terkait agar terakomodir dalam RAPBD tahun anggaran yang akan datang.
6. Melakukan koordinasi antar sektor terkait pembangunan infrastruktur yang kewenangannya melibatkan Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Provinsi Banten.

a. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah

Pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Perangkat Daerah utama.

Pemasangan Penerangan Jalan Umum

Pengaturan Kemacetan di tempat keramaian

Hotmix di Perumahan P&k

Pembuatan PAL di Gedung Perpustakanaan Kota Serang

Gambar 3.11 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah

Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah di Kota Serang diukur dengan indikator Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah dengan capaian 76,07% dari target yang ditetapkan sebesar 77,14% seperti tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.21
Realisasi dan Target Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
			2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Sesudah
1	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	Poin	67,55	70,09	73,13	74,30	76,07	83,00	77,14

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Tahun 2023 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%
1.	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	%	77,14	77,14	76,07	98,61

Sumber: Bappeda Kota Serang, 2024

Tabel 3.23
Capaian Pengukuran Kinerja Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Tingkat Kemantapan Struktur Wilayah	[(50% Indeks Pekerjaan Umum) +(30% Indeks Perumahan dan Permukiman)+ (20% indeks Perhubungan)]	%	77,14	76,07	98,61	Sangat tinggi

Sumber Bappeda Kota Serang, 2024

Capaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah tahun 2023 adalah sebesar 98,61% menurun dari tahun 2022 sebesar 99,29%.

Adapun untuk penjelasannya pengukuran Tingkat kemantapan infrastruktur wilayah dibagi menjadi 3 indeks dengan rincian sebagai berikut :

1. Indeks Pekerjaan Umum dengan bobot 50%
   a. Indeks ini didukung oleh perangkat daerah utama yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR). Komposisi dalam pengukuran yang rinciannya yaitu Penjumlahan dari (60% Capaian Bidang Bina Marga) + (30% Capaian Bidang SDA)+ (10% Capaian Bidang cipta Karya }
      a. Bidang Bina Marga dengan bobot sebesar 60% rincian sebagai berikut : (50% Persentase Panjang Jalan kondisi baik)+(50% Persentase Jembatan Kondisi baik)
      b. Bidang SDA dengan bobot sebesar 30% rincian sebagai berikut: (50% Presentase Panjang drainase kondisi baik)+(50%Presentase Panjang saluran irigasi kondisi baik)
      c. Bidang Cipta Karya dengan bobot sebesar 10% dari Persentase Gedung Pemerintah terbangun dan fasilitas umum dalam kondisi baik.
2. Indeks Perumahan dan Pemukiman dengan bobot 30% didukung oleh perangkat daerah :
   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)

      Dukungan Dinas PUPR terhadap komponen penghitungan diberikan bobot sebanyak 35% yang bersumber dari Bidang SDA dengan rincian sebagai berikut:

= (50% Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi)+(50%Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik)

b. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP)

Dukungan Dinas PKP terhadap komponen penghitungan diberikan sebanyak 65 % Komposisi dalam pengukuran yang rinciannya yaitu penjumlahan dari 35 % Capaian kawasan pemukiman dan 30% capaian perumahan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Bidang kawasan pemukiman dengan bobot sebesar 35% dengan rincian sebagai berikut :

(50%Presentase Luas Pemukiman Layak huni) +(50%Presentase Luas Pemukiman Tertata))}

b. Bidang perumahan dengan bobot sebesar 30% dari Presentase Lingkungan Sehat dan aman dengan PSU

3. Indeks Perhubungan dengan bobot 20% didukung oleh perangkat daerah Dinas Perhubungan yang diperoleh dari capaian presentase pemasangan rambu jalan dan pemasangan PJU:

Capaian terhadap target akhir RPJMD untuk tingkat kemantapan infrastruktur wilayah adalah 98,61% dari target akhir Perubahan RPJMD, pada tahun 2023 pencapaian target sudah mendekati kondisi akhir RPJMD.

Berdasarkan tabel berikut ini bisa diinterpretasikan bahwa:

a. Ketersediaan dan kondisi jalan yang kurang memadai bagi terselenggaranya fungsi kota yang optimal. Panjang jalan kota dalam kondisi baik pada tahun 2023 sebesar 70,97 persen atau 147,74 km, jalan dalam kondisi sedang sebesar 20,37 persen atau 42,40 km, jalan dalam kondisi rusak ringan sebesar 8,66 persen atau 18,02 km sedangkan jalan dalam kondisi rusak berat sudah tidak ada. Masalah kemacetan dan genangan air di beberapa titik ruas jalan, serta kondisi drainase yang kurang berfungsi dengan baik merupakan penyebab utama kerusakan jalan di samping tonase angkutan barang yang seringkali tidak terkendali.

b. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur perhubungan pada tahun 2023 terpasang rambu lalu lintas sebanyak 477 titik dari total yang ditargetkan

sebanyak 469 buah atau sebesar 101,70%. Sedangkan untuk sarana perhubungan ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar 3323 dengan kondisi baik yang terpasang dari total 3897 yang harus dipelihara atau sebesar 85,27%, belum optimalnya fungsi keberadaan halte dan rambu lalu lintas, pengawasan trayek angkutan umum, dan pengolaan perparkiran dan terminal.

c. Kondisi dan ketersediaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang tergambar dari dengan pemukiman layak huni sebesar 95,90% dengan luas permukiman kumuh sekitar 4,10% dari luas wilayah Kota Serang, Sedangkan pemukiman tertata sebesar 97,01% serta Persentase lingkungan perumahan yang Prasarana serta Fasilitas Umumnya sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Serang sebesar 38,57% atau 86 lokasi dari total 233 lokasi yang ada.

Pemerintah Kota Serang terus meningkatkan ketersediaan dan kualitas insfratruktur wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan sarana dan prasarana kebinamargaan, peningkatan pembangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum, pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong, pengembangan dan pengelolaan irigasi dan pengairan lainnya, pengendalian banjir, rehabilitas pemeliharaan jalan dan jembatan dan pembinaan jasa konstruksi.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur, disusunlah proses bisnis yang berisi uraian proses utama, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis pada sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah berserta intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang.

Tabel 3.24
Uraian Pengukuran Kinerja Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah
Tahun 2023

N0	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Bobot	Realisasi (%)	Hasil Pembobotan	OPD Penanggung Jawab
1	Proporsi Panjang jaringan jalan kondisi baik	$\frac{Panjang\ Jalan\ Kondisi\ Baik\ (km)}{Luas\ total\ Panjang\ Jalan\ (km)} x100\%$	50%x60%	$\frac{147{,}74\ Km}{208{,}16\ Km} x100\% = 70{,}97\%$	21,29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Proporsi Luas Jembatan dalam kondisi baik	$\frac{Luas\ Bentang\ Jembatan\ \ Kondisi\ Baik\ (m2)}{Luas\ total\ Bentang\ jembatan\ (m2)} x100\%$	50%x60%	$\frac{622{,}3\ m2}{807{,}5\ m2} x100\% = 77{,}07$	23,12	
3	Presentase drainase dalam kondisi baik	$\frac{Panjang\ Drainase\ Tidak\ Tersumbat\ Pembuangan\ Aliran\ Air\ (Km)}{Panjang\ seluruh\ drainase\ Kota\ (km)} x100$	50%x30%	$\frac{573{,}98\ km}{796{,}43\ km} x100\% = 72{,}07\%$	10,81	
4	Presentase irigasi kondisi baik	$\frac{Luas\ Irigasi\ dalam\ kondisi\ baik\ (m2)}{Luas\ total\ irigasi\ \ Kota\ (m2)} x100\%$	50%x30%	$\frac{13763\ m2}{14163\ m2} x100\% = 97{,}18\%$	14,58	
5	Pemenuhan Gedung Pemerintah sesuai standar Kebutuhan	$\frac{Jumlah\ Gedung\ Pemerintah\ yang\ terbangun\ (unit)}{Jumlah\ Gedung\ Pemerintah\ yangharus\ dibangun\ (unit)} x100\%$	10%	$\frac{13}{15}$x100%=86,67%	8,67	
	INDEKS PEKERJAAN UMUM (50%)				**39,23**	
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	$\frac{Jumlah\ RT\ yang\ mendapat\ akses\ air\ minum}{Jumlah\ Total\ Rumah\ tangga} x100\%$	50%x35%	$\frac{92619}{203363} x100\% = 45{,}54\%$	7,97	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{Jumlah\ RT\ yang\ mendapat\ layanan\ PAL\ domestik}{Jumlah\ Total\ Rumah\ tangga} x100\%$	50%x35%	$\frac{83395}{203363} x100\% = 41{,}01\%$	7,18	
3	Persentase Luas pemukiman layak huni	$100\% - (\frac{Luas\ Kawasan\ Kumuh\ (Ha)}{Luas\ Kawasan\ Permukiman\ (Ha)} x100\%)$	50%x35%	$100\% - \left(\frac{244{,}66\ Ha}{5973{,}96\ (Ha)} x100\%\right) = 95{,}90\%$	16,78	DINAS PEMUKIMAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
4	Persentase luas pemukiman tertata	$\frac{Luas\ Kawasan\ Pemukiman\ tertata\ (Ha)}{Luas\ KAwasan\ Permukiman\ (Ha)} x100\%$	50%x35%	$\frac{5795{,}49\ (Ha)}{5973{,}96\ (Ha)} x100 = 97{,}01\%$	16,98	

N0	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Bobot	Realisasi (%)	Hasil Pembobotan	OPD Penanggung Jawab
5	Persentase PSU yang diserahkan ke pemerintah	$\frac{Jumlah\ lingkungan\ yang\ didukung\ PSU\ yang\ sudah\ diserahkan}{Jumlah\ lingkungan\ perumahan\ pada\ kurun\ waktu\ tertentu} x100\%$	30%	$\frac{86}{233} x100\% = 38{,}57\%$	11,57	
	INDEKS PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN (30%)				**18,14**	
1	Persentase Pemasangan rambu	$\frac{Jumlah\ Titik\ Pemasangan\ Rambu\ (buah)}{Jumlah\ Total\ Titik\ yang\ harus\ terpasang\ rambu\ (buah)} x100\%$	50%	$\frac{477\ buah}{469\ buah} x100\% = 101{,}70\%$	50,85	DINAS PERHUBUNGAN
2	Persentase Pemasangan PJU	$\frac{Jumlah\ Pemeliharaan\ PJU\ (Titik)}{Jumlah\ Total\ Titik\ yang\ harus\ dipelihara\ PJU\ (titik)} x100\%$	50%	$\frac{3323\ titik}{3897\ titik} x100\% = 85{,}27\%$	42,64	
	INDEKS PERHUBUNGAN (20%)				**18,70**	
	TINGKAT KEMANTAPAN INFRASTRUKTUR WILAYAH				**76,07**	

Sumber : Dpupr, dprkp, dishub Kota Serang (Data Olahan). 2024

Gambar 3.12 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah

Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta penanggung jawab. Berikut disajikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran daerah beserta perangkat daerah pengampu.

Gambar 3.13 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah

4. TUJUAN STRATEGIS 3

"Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan"

Pengelolaan Sampah dengan memberdayakan kelompok masyarakat melalui Bank Sampah

Pembangunan Alun-alun sebagai sarana RTH di Kecamatan Curug

Gambar 3.14 Upaya Pemerintah Kota dalam Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Tujuan ke 3 adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke dua yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 yaitu **"Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan".** Pencapaian misi ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai Perangkat Daerah utama. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat tentang suatu kondisi dan mutu lingkungan hidup pada ruang dan periode tertentu. Dalam perspektif IKLH, nilai indeks ini bukan hanya menujukkan peringkat, tetapi juga merupakan indikasi untuk upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di tingkat kota.

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO2 dan NO2; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

IKLH tahun 2023 dihitung berdasarkan: (1) data hasil pemantauan kualitas air di sungai prioritas Kota; (2) pemantauan kualitas udara pada kawasan kawasan transportasi, pemukiman, industri dan komersial pada 3 titik lokasi; dan (3) hasil analisis citra satelit tutupan lahan dan dinamika vegetasi

tahun 2022 hasil analisis (pemutakhiran) yang dipublikasi KLHK pada tahun 2019. Tabel di bawah ini merupakan Rumus Perhitungan IKLH (Permen LHK No. 27 Tahun 2021) :

Tabel 3.25
Rumus Perhitungan IKLH

NO.	RUMUS PERHITUNGAN
1.	**Kabupaten/Kota**
	IKLH = (37,6% x IKA) + (40,5% x IKU) + (21,9% xIKL)
2.	**Provinsi**
	IKLH = (34,0% x IKA) + (42,8% x IKU) + (13,3% xIKL) + (9,9% x IKAL)
3.	**Nasional**
	IKLH = (34,0% x IKA) + (42,8% x IKU) + (13,3% xIKL) + (9,9% x IKAL)

Sumber : Peraturan Menteri LHK, 2021

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki rentang nilai dan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.26
Nilai Interval dan Kategori IKLH

SKOR	KRITERIA
90 ≤ x ≤ 100	Sangat Baik
70 ≤ x < 90	Baik
50 ≤ x < 70	Sedang
25 ≤ x < 50	Kurang
0 ≤ X < 25	Sangat Buruk

Sumber : Peraturan Menteri LHK, 2021

Pada tahun 2023 penilaian indeks kualitas lingkungan hidup seperti tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.27
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) Dimana: IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKL : Indeks Kualitas Lahan	Poin	47,79	50,61	105,90	Sangat tinggi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2024

Berdasarkan tabel di atas dari target pada tahun 2023 sebesar 47,79 point realisasi pelaksanaan sebesar 50,61 point dengan capaian 105,90% atau berkinerja S***angat Tinggi***. IKLH Kota Serang tahun 2023 adalah sebesar 50,61 poin dengan kategori ***Sedang.*** Kondisi ini memiliki makna bahwa lingkungan hidup di Kota Serang masih belum memenuhi kriteria lingkungan yang baik dan sehat. Indeks tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 54,37 point. Perkembangan capaian indeks kualitas lingkungan hidup dari tahun 2017-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Grafik 3.7
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2017–2023

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2024

Tabel 3.28
Realisasi dan Target IKLH dalam Perubahan RPJMD
Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Sesudah
1	IKLH	Poin	47,35	47,35	54,34	55,05	54,37	50,61	51,3	47,79

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel di atas untuk mencapai target kinerja di akhir tahun masa RPJMD tahun 2023 untuk indikator IKLH sudah tercapai dan melampaui target.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu:

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air ini didasarkan pada 9 parameters yang mencakup: BOD, DO, nitrate, total phosphate, temperature, turbidity, total solids, pH, and Fecal Coliform. Berdasarkan hasil analisis Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Serang :

- IKA Kota Serang berada pada status ***"sedang"***
- IKA Kota Serang berada pada Nilai Indeks 50,00%
- Persentase Pemenuhan Mutu Air (100%)
- Jumlah Pemantauan yang Memenuhi Mutu Air (6 titik)

Hasil analisa pengujian kualitas air bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.29
Rekapitulasi Hasil Pengujian Kualitas Air
Tahun 2023

SURVEY AIR PERMUKIMAN	KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3	KELAS 4
• Bendungan Gelam Sekitar Sungai Cibanten	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Baik
• Jembatan Kaujon Sungai Cibanten	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Baik
• Jembatan Kaibon Sekitar Sungai Cibanten	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Baik
• Situ Ciwaka Sekitar Sungai Ciwaka	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Baik
• Kalodran Sekitar Sungai Ciwaka	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Baik
• Bendungan Kemayungan Sekitar Sungai Ciwaka	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Baik
Jumlah	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**

Sumber : DLH Kota Serang, 2024

Tabel 3.30
Hasil Analisa Indeks Kualitas Air
Tahun 2023

JUMLAH PEMANTAUAN YANG MEMENUHI MUTU AIR	KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3	KELAS 4
• baik	-	-	-	6,00
• cemar ringan	6,00	6,00	6,00	-
• cemar sedang	-	-	-	-
• cemar berat	-	-	-	-
PEMENUHAN MUTU AIR (%)	**KELAS 1**	**KELAS 2**	**KELAS 3**	**KELAS 4**
• baik	-	-	-	100,00
• cemar ringan	100,00	100,00	100,00	-
• cemar sedang	-	-	-	-
• cemar berast	-	-	-	-
BOBOT NILAI INDEKS (%)	**KELAS 1**	**KELAS 2**	**KELAS 3**	**KELAS 4**
• baik	-	-	-	70,00
• cemar ringan	50,00	50,00	50,00	-
• cemar sedang	-	-	-	-
• cemar berat	-	-	-	-
Hasil Analisis	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**70,00**
	Sedang	**Sedang**	**Sedang**	**Baik**

Sumber : DLH Kota Serang, 2024

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2,. Indeks ini digunakan oleh pemerintah Kota Serang untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di zona tertentu. Indeks ini memitigasi dan memandu kepada stakeholder untuk tanggap terhadap kondisi potensi polusi udara ketika kualitas udara berada di level berisiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

Berdasarkan hasil analisis Indeks Kualitas Udara (IKU), dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Udara Kota Serang pada periode 2023 berada pada katagori ***"SEDANG***" atau dengan kisaran IKU sekitar (65,97) Berdasarkan lembar kerja berikut, dapat dijelaskan bahwa faktor utama yang berpotensi menyebabkan rendahnya nilai indeks kualitas udara Kota Serang adalah parameter kimia organik yaitu sulfur dioksida yang umumnya bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil (aktivitas transportasi). Tabel berikut rekapitulasi hasil pengamatan dan pengujian kualitas udara Kota Serang Tahun 2023:

Tabel 3.31
Rekapitulasi Hasil Pengamatan dan Pengujian Kualitas Udara Kota Serang Tahun 2023

PARAMETER	HASIL PANTAU	AMBIEN	INDEKS	I_{EU}	IKU	KATAGORI
Lokasi Unyur						
SO_2 (Sulfur Dioksida)	68,97	75,00	0,920	0,482	**78,77**	**Baik**
NO_2 (Nitrogen Dioksida)	2,89	65,00	0,044			
Lokasi Pakupatan						
SO_2 (Sulfur Dioksida)	65,68	75,00	0,876	0,477	**79,06**	**Baik**
NO_2 (Nitrogen Dioksida)	5,07	65,00	0,078			
Lokasi Cipocok						
SO_2 (Sulfur Dioksida)	132,67	75,00	1,769	0,902	**55,41**	**Sedang**
NO_2 (Nitrogen Dioksida)	2,34	65,00	0,036			
Lokasi Curug						
SO_2 (Sulfur Dioksida)	143,66	75,00	1,915	0,988	**50,64**	**Sedang**
NO_2 (Nitrogen Dioksida)	3,98	65,00	0,061			
Lokasi gregat						
SO_2 (Sulfur Dioksida)	102,75	75,00	1,370	0,712	**65,97**	**Sedang**
NO_2 (Nitrogen Dioksida)	3,57	65,00	0,055			

Sumber : DLH Kota Serang, 2024

3. Indeks tutupan lahan

Indeks tutupan lahan diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Berdasarkan hasil analisis Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dapat

diketahui bahwa Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Serang pada periode 2023 berada pada katagori ***"sangat kurang***" dengan bobot indeks senilai 23,258.

Tabel 3.32
Rekapitulasi Hasil Analisa Tutupan Lahan
Kota Serang Tahun 2023

PARAMETER	2018	2019	2020	2021	2022
sawah	12.438,65	12.438,64	12.407,31	12.397,59	12.418,16
pertanian lahan kering	4.363,57	4.363,58	4.202,29	4.353,16	4.353,15
pemukiman	4.909,30	4.909,31	4.950,77	4.970,81	5.354,18
pertanian lahan kering bercampur semak	3.690,69	3.690,70	3.709,80	3.709,80	3.305,87
tambak	934,93	920,61	939,18	904,20	906,60
hutan mangrove sekunder	25,89	22,73	22,73	28,00	25,61
hutan lahan kering sekunder	249,03	245,87	227,05	232,32	229,93
jumlah tutupan lahan	**26.612,07**	**26.591,44**	**26.459,13**	**26.595,88**	**26.593,50**
luas administrasi	**26.671,00**	**26.671,00**	**26.671,00**	**26.671,00**	**26.671,00**
luas tutupan hutan (TH)	274,92	268,60	249,78	260,33	255,54
luas tutupan nonhutan indeks (TH)	0,010	0,010	0,009	0,010	0,010
IKTL	23,325	23,303	23,238	23,274	23,258

Sumber : DLH Kota Serang, 2024

Berdasarkan lembar kerja diatas, dapat dijelaskan bahwa faktor utama yang menyebabkan rendahnya nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Serang adalah tidak tersedianya kawasan konservasi, belum terdigitasinya data dan informasi seperti ruang terbuka hijau, hutan kota, taman kota, median jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman bermain lingkungan, taman perkemahan, rawa, lapangan golf, pemakaman, kebun pembibitan, taman rekreasi, dimana secara bersamaan semakin meningkatnya aktivitas pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis instrumen IKLH Kota Serang, maka dapat disusun rangkaian kerangka berfikir model matematisnya sesuai dengan Pedoman Penyusunan IKLH yaitu :

IKLH = (0,376 X IKA) + (0.405 X IKU) + (0.219 X IKTL)
IKLH = (0,376 X 50,00) + (0,405 X 65,97) + (0,219 X 23,26)
IKLH = 18,80 + 26,72 + 5,09
IKLH = 50,61 (Kategori Sedang)

Tabel 3.33

Nilai Hasil IKLH Tahun 2023

No	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil
1	Indeks Kualitas Air	50,00	0,376	18,80
2	Indeks Kualitas Udara	65,97	0,405	26,72
3	Indeks Kualitas Lahan	23,26	0,219	5,09
IKLH Kota Serang				**50,61**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2024

Perhitungan analisis tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Serang dengan mengacu pada tiga parameter perhitungan yang terdiri dari IKA, IKU, dan IKL diperoleh nilai IKLH 50,61. Nilai ini berada pada level terendah ketiga pada penilaian indeks kualitas lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan nilai yang berada di di range $50 \leq x < 70$ maka kondisi Lingkungan Hidup di Kota Serang masih termasuk pada kategori sedang seperti pada tabel di atas.

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk tujuan dan sasaran ini ditunjang oleh 4 program yaitu Program Perencanaan Lingkungan hidup, Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Dampak Lingkungan, Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan antara untuk mengurangi pencemaran air, antara lain :

a. Untuk memperbaiki kualitas air permukaan,

Pemerintah kota Serang melakukan restorasi kualitas air sungai melalui kebijakan;

- Pembangunan karakter ekosistem sungai dan kualitas air sungainya;
- Pembangunan karakter biotik dan abiotik ekosistem sungai;
- Pembangunan karakter sosial kultural sungai dan kualitas airnya;

Pembangunan karakter tersebut dengan meminilisasi pengaruh limbah padat, limbah cair, dengan sistemik. Secara umum teknis upaya pemulihan kualitas air sungai yang tercemar ringan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Melakukan pengendalian sumber pencemar, yaitu dengan mencegah atau mengurangi masuknya bahan-bahan pencemar ke dalam sungai. Dengan melakukan penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan terhadap para pemilik industri, usaha, atau rumah tangga yang menghasilkan limbah cair. Selain itu, menerapkan sistem pengolahan limbah cair yang memadai dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melakukan pembersihan fisik sungai, yaitu dengan mengangkat sampah-sampah padat, lumpur, atau sedimen yang menumpuk di dasar atau tepi sungai. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat mekanis seperti ekskavator, pompa, atau keranjang sampah. Selain itu, dilakukan pengerukan sungai untuk meningkatkan kedalaman dan kapasitas aliran sungai.
3. Melakukan restorasi ekologis sungai, yaitu dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekitar sungai. Hal ini dilakukan dengan melakukan penghijauan daerah aliran sungai (DAS), menanam tanaman-tanaman yang dapat menyerap polutan atau menghasilkan oksigen, seperti eceng gondok, teratai, atau bambu. Selain itu, juga melindungi dan memperbanyak habitat biota air, seperti ikan, udang, atau keong.

b. Untuk mengurangi pencemaran udara upaya-upaya konkrit antara lain :

1. Membudayakan prilaku mengurangi emisi polutan dari sumber-sumber pencemar, seperti kendaraan bermotor, industri, pembangkit listrik, pembakaran sampah, atau kebakaran hutan;
2. Membudayakan prilaku mengurangi emisi polutan melalui penanaman pohon atau tanaman lainnya yang dapat menyerap polutan dan menghasilkan oksigen secara masiv;
3. Membudayakan prilaku mengurangi emisi polutan melalui menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan dan hemat daya, seperti lampu LED, kulkas hemat energi, atau produk daur ulang;
4. Membudayakan prilaku mengurangi emisi polutan melalui pencegahan melakukan pembakaran sampah, baik di rumah maupun di tempat umum;

5. Membudayakan prilaku mengurangi emisi polutan melalui pencegahan penggunaan bahan kimia yang berlebihan;
6. Membudayakan desain rumah yang ramah lingkungan (sirkulasi udara - sirkulasi cahaya), sebagai upaya menghemat energi;
7. Membudayakan prilaku mengurangi emisi polutan melalui penggunaan produk daur ulang dan sustainable sebagai salah satu cara untuk menjaga lingkungan hidup dan mengurangi dampak negatif dari konsumsi berlebihan;
8. Membudayakan penggunaan konsumsi produk lokal organik untuk menghindari pencemaran udara adalah salah satu langkah yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan;
9. Membudayakan kegiatan car freeday adalah sebuah konsep dimana jalan raya ditutup untuk kendaraan bermotor dan hanya diperuntukkan untuk pejalan kaki, sepeda, dan transportasi alternatif lainnya. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi polusi udara, meredakan kemacetan, meningkatkan kesehatan, dan memperkuat ikatan sosial.

c. Untuk menambah luasan tutupan lahan upaya-upaya konkrit antara lain:

1. Kebijakan *smart environmnent* yang berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik
2. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon di lahan yang telah gundul atau rusak.
3. Melakukan revegetasi atau penanaman kembali tanaman-tanaman selain pohon di lahan yang telah gundul atau rusak.
4. Melakukan konservasi atau perlindungan lahan yang masih memiliki tutupan lahan yang baik dari ancaman perubahan penggunaan lahan. Konservasi dapat dilakukan dengan menetapkan status hukum lahan sebagai kawasan lindung, konservasi, atau wisata; melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran; serta memberdayakan masyarakat lokal untuk ikut menjaga dan memanfaatkan lahan secara berkelanjutan

a. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pembangunan RTH di Cipocok

Penanganan Sampah di Pasar Rau

Pengelolaan Sampah dengan memberdayakan kelompok masyarakat melalui Bank Sampah

Pembangunan Alun-alun sebagai sarana RTH di Kecamatan Kasemen

Gambar 3.15 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pencapaian sasaran ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai Perangkat Daerah utama. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Serang diukur dengan indikator Jumlah Penanganan Sampah dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.34
Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Persentase Penanganan Timbunan sampah	$\frac{\Sigma\ Sampah\ yang\ Tertangani}{\Sigma\ Timbunan\ Sampah} x\ 100$	%	80	68,15	85,19	Tinggi
2	Ketersediaan RTH	$\frac{Luas\ RTH\ Publik\ yang\ tersedia}{Luasan\ RTH\ Publik\ yang\ seharusnya\ ada} x\ 100$	%	4,05	3,03	74,81	Sedang
	Rata-rata Capaian Kinerja					**80,00**	**Tinggi**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2024

Berdasarkan tabel di atas untuk indikator jumlah penanganan sampah tercapai 85,19% dengan kriteria ***Tinggi*** dari target 80% terealisasi 68,19% sedangkan ketersediaan ruang terbuka hijau tercapai 74,81% dengan kriteria ***Sedang*** dari target 4,05% terealisasi 3,03%. Rata-rata capaian kinerja untuk dua indikator tersebut sebesar 80,00% dengn kriteria ***Tinggi***.

Capaian tersebut mengalami fluktuasi setiap tahun, untuk capaian terhadap target akhir RPJMD tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.35
Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Perubahan RPJMD 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Sesudah
1	Persentase Penanganan Sampah	%	51,92	55,58	61,6	52,36	55,72	68,15	75,00	80,00
2	Ketersediaan RTH	%	1,52	2,98	3,43	3,03	3,03	3,03	2,05	4,05

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa jumlah penanganan sampah memiliki kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya penambahan armada angkutan sampah yang menyebabkan sampah tertangani. Namun pada indikator ketersediaan Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2023 tidak terjadi perluasan penambahan RTH sehingga realisasiny sama dengan tahun 2021.

Tabel 3.36
Capaian Kinerja Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2023 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2023	
				Realisasi	%
1.	Jumlah Penanganan Timbunan sampah	%	80	68,15	85,19
2.	Ketersediaan RTH	%	4,05	3,03	74,81
Rata-rata terhadap RPJMD					**80,00**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. 2024

Dari tabel di atas terdapat beberapa kondisi atau indikator kinerja yang mengalami kenaikan dan penurunan capaian pada akhir tahun 2022. Pencapaian terhadap kondisi akhir RPJMD di tahun keempat ini untuk persentase jumlah penanganan sampah tercapai 85,19% masih kurang 14,81% lagi agar tercapai sesuai target yang diharapkan sedangkan ketersediaan RTH baru tercapai 74,81% dari target 4,05% dan rata-rata capaiannya sebesar 80,00% dengan kategori ***Tinggi.***

1. **Persentase Penanganan Sampah**

Capaian realisasi pengukuran indikator kinerja penanganan sampah adalah :

- Total kubikasi sampah Tahun 2023 = 386.734,55 + 62.489,239 = 449.223,789 m^3
- Penduduk Kota Serang = 723.553 jiwa
- Jumlah sampah dalam 1 tahun = 659.169,195 m3/tahun

Persentase Penanganan Sampah

$$= \frac{\Sigma\ Sampah\ yang\ Tertangani}{\Sigma\ Timbunan\ Sampah}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{449223{,}789\ m3}{659169{,}195\ m3/thn}\ \text{x}\ 100\ \%$$

$$= 68{,}15\ \%$$

Pada tahun 2023 Jumlah sampah yang di tangani Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dari 150 unit TPS dan 12 unit TPS3R yang tersebar di 6 kecamatan wilayah Kota Serang mencapai 449.223,789 M3. Sedangkan total timbulan sampah mencapai 659.169,16 M3. Sehingga jumlah penanganan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup baru mencapai 68,15%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target capaian penangangan sampah adalah 80% yang tetapkan maka mencapai 85,19%. Sarana prasarana persampahan yang ada menjadi salah satu penyebab penanganan dan pengelolaan sampah belum bisa ditangani dengan baik. Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup untuk menangai sampah terdiri atas dumptruck 23 unit, armrol 15 unit, pickup 4 unit, dan cator 45 unit.

Grafik 3.8

Persentase Jumlah Penanganan Sampah Kota Serang Tahun 2018–2023

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2024

Grafik di atas, menggambarkan fluktuasi perkembangan penanganan sampah dari tahun 2018 sampai dengan 2020 terjadi kenaikan penanganan namun pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 9,26% dan Kembali meningkat pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 68,15%.

Faktor penghambat yang menyebabkannya antara lain:

1) Perhitungan yang dilakukan pada tahun 2018-2020 merupakan perhitungan berdasarkan estimasi ritasi kendaraan yang masuk di TPA Cilowong. Dengan asumsi 1 (satu) kendaraan dapat mengangkur sebanyak 6 kubik sampah sedangkan pada tahun 2021-2023 ini perhitungan sampah sudah menggunakan jembatan timbang, sehingga berat sampah yang masuk (terangkut) ke TPA lebih real;
2) Belum optimalnya peranan komunitas lingkungan dalam pengolahan sampah, bank sampah yang sudah terbentuk masih sedikit;
4) Belum adanya regulasi tentang pengurangan sampah dengan pola 3R;
5) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung;
6) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah.
7) Banyaknya TP3SR yang belum aktif Kembali.

Langkah dan upaya yang dilakukan adalah:

1) Membangkitkan kembali komunitas masyarakat yang mengelola sampah seperti Bank sampah
2) Memberikan edukasi kepada masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya

3) Menambah armada sarana angkutan persampahan yang bertugas untuk mengambil dari perumahan
4) Menambah tenaga pengelola persampahan
5) Bekerjasama dengan pihak swasta dalam penanganan sampah agar sampah rumah tangga dapat diangkut dengan optimal
6) Membuat kesepakatan perjanjian dengan Kota Tangerang Selatan dengan Kota Serang yang dituangkan dalam surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tentang Kerja Sama Antar Daerah Nomor 073/01/TKKSDKID/ I/221 Nomor 134.43/246/Pem/2021 dan Perjanjian Kerjsama antar Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Cilowong Kota Serang, Nomor 821/25/PKS/DLH/2021 Nomor 660/476-DLH/2021.

2. Persentase Ketersediaan RTH

Capaian realisasi indikator kinerja diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Persentase Ketersediaan RTH = $\frac{Luas\ RTH\ Publik\ yang\ tersedia}{Luasan\ RTH\ Publik\ yang\ seharusnya\ ada} x\ 100$

= 161,66 Ha / 5334,80 Ha x 100 %

= 3,03 %

Luasan RTH Publik yang seharusnya ada = 20% x Luas Wilayah Kota Serang

= 20% x 26674 Ha

= 5334,80 Ha

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2023 ruang terbuka hijau di Kota Serang yang dipelihara dapat dilihat pada tabel di bawah ini dari jumlah keseluruhan ruang terbuka hijau sebesar 161.657 m2 ternyata yang terpelihara hanya sebesar 155.444 m2 atau sebesar 96,16%. Salah satu faktor penyebabnya adalah pengelolaannya menjadi kewenangan instansi lain.

Grafik 3.9
Persentase Ketersediaan RTH Kota Serang Tahun 2018–2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2024

Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan ketersediaan RTH dari tahun 2018-2020 namun di tahun 2021-2023 terjadi penurunan kembali sebesar 0,4% hal ini disebabkan RTH yang sebelumnya tersedia terkena konversi lahan beralih fungsi menjadi peruntukkan lainnya sebagai akibat dari berkembangnya pembangunan perkotaan. Kota Serang sebenarnya harus mencapai 20% untuk ketersediaan RTH namun berbagai faktor kepentingan menyebabkan hal tersebut sulit untuk diwujudkan.

Tabel. 3.37
Luas Ruang Terbuka Hijau yang Terpelihara
oleh Pemerintah Kota Serang Tahun 2023

NO	RUANG TERBUKA HIJAU	LUAS	SATUAN
1	Taman Terminal Pakupatan	3.921	m2
2	Taman Bina Bangsa	2.227	m2
3	Taman Tugu Debus	3.200	m2
4	Taman Selamat Datang (Sari Asih)	786	m2
5	Taman Kaibon Banten	31.130	m2
6	Taman Tugu Jam	2.197	m2
7	Taman Pertigaan Darma Jaya	541	m2
8	Taman Makam Pahlawan	621	m2
9	Taman Tugu K3	357,21	m2
10	Taman Pemkot Lama	1.080	m2
11	Taman Tugu Adipura	1.262	m2
12	Taman Lampu Merah Warjok	72	m2
13	Taman Lampumerah Kebon Jahe	134	m2
14	Taman Lampumerah Ciracas	185	m2

NO	RUANG TERBUKA HIJAU	LUAS	SATUAN
15	Taman Lampu Merah Sempu	175	m2
16	Taman Median Sempu (Depan Giant)	1.265	m2
17	Alun-alun Barat	18.654	m2
18	Alun-alun Timur	25.138	m2
19	Taman Tugu Selamat Jalan Parung	440	m2
20	Taman Median Ahmad Yani	2.600	m2
21	Taman Median Veteran	1.614	m2
25	Taman Median Sempu JL.Raya Pandeglang	830	m2
26	Taman Rumah Dinas Kodim	310	m2
27	Taman Sari	6.903	m2
28	Taman Patung Alun alun	462	m2
29	Taman Pemkot Serang	2.200	m2
30	Taman Lampu Merah Cipocok	52	m2
31	Taman Perum RS Pemda	1.074	m2
32	Taman Perempatan Gerbang Tol Serang Timur	288	m2
33	Taman Depan Darma Jaya (Pertigaan Daihatusu Serang)	412	m2
34	Taman Median JL Raya Jend. Sudirman	1.925	m2
35	Taman Median Dari pertigaan Sempu s/d Makam Cibebek	477	m2
36	Taman Median Dari Makam Cibetik S/D bayangkara	1.833	m2
37	Taman Stadion Maulana Yusuf	30.206	m2
38	Taman Bunderan Ciceri	544	m2
40	Taman Terminal Cipocok	524	m2
43	Taman Alun - alun Kecamatan Walantaka (2020)	6.430	m2
44	Taman Alun - alun Kecamatan Taktakan (2021)	2.249,00	m2
45	Taman Cijawa (2022)	1.126,00	m2
	JUMLAH LUAS RTH YANG TERPELIHARA	**155.444**	**m2**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, 2024

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau (RTH), disusunlah proses bisnis yang berisi uraian proses utama, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis pada sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berserta intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang.

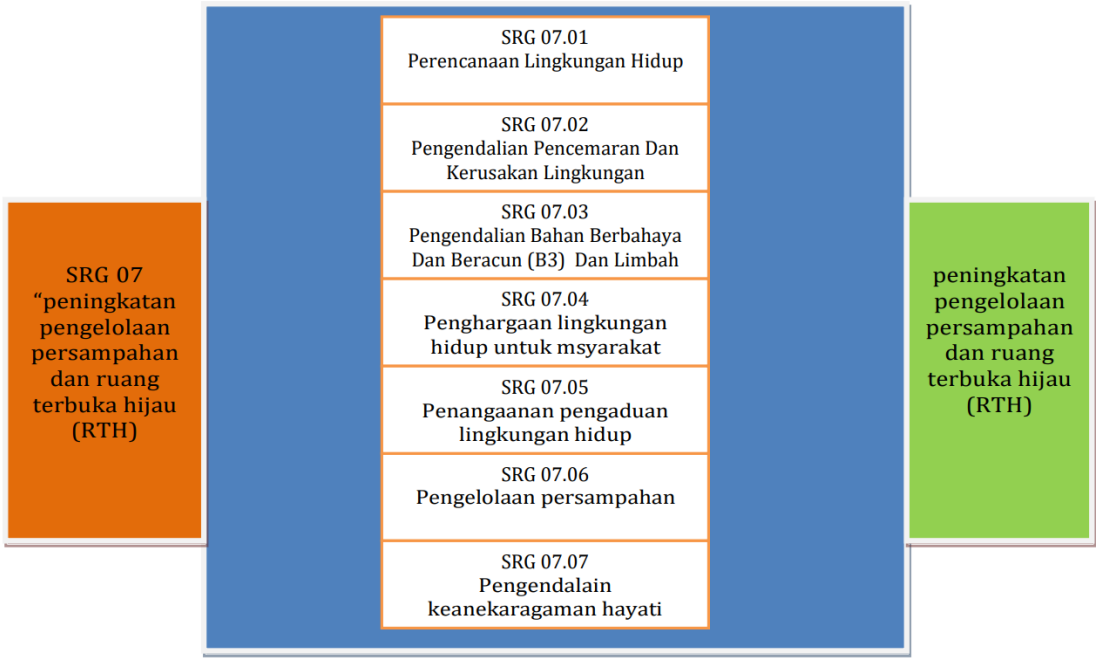

Gambar 3.16 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta penanggung jawab. Berikut disajikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran daerah beserta perangkat daerah pengampu.

Sumber : Bappeda Kota Serang, 2021

Gambar 3.17 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Untuk menambah ketersediaan ruang terbuka hijau diperlukan upaya-upaya konkrit antara lain:

1. Penetapan wilayah hutan kota yang tidak dapat dialihfungsikan untuk penggunaan yang lain;
2. Lebih menggiatkan penanaman mangrove di wilayah pesisir selain untuk mengurangi abrasi, juga dapat berfungsi untuk penghijauan;
3. Membangun lebih banyak RTH dan memultifungsikan RTH yang ada sebagai ruang terbuka publik yang dapat berfungsi sosial dan ekowisata;
4. Diperlukan regulasi setingkat perda untuk melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait fasilitas dan ruang public khususnya ruang terbuka hijau sehingga alih fungsi lahan dapat ditekan, terutama lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan terbuka hijau dan lahan untuk penghijauan;
5. Mengingat pentingnya RTH sebagai paru-paru kota penyedia oksigen untuk kebutuhan kualitas udara yang bagus diperlukan sinergitas dan koordinasi terkait dengan para pemangku kebijakan dan stake holder agar target ketersediaan RTH sebesar 20% dari total luas wilayah Kota Serang bisa terwujud.

b. Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana

Membantu dalam evakuasi pohon tumbang di area publik

Penanganan Kebakaran oleh Pasukan Damkar Satpol PP

Membantu mengeluarkan ular yang masuk ke rumah warga

Gambar 3.18 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Menurunkan Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana

Pencapaian sasaran kedua dari tujuan terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan adalah indikator Indeks Resiko Bencana yang didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah utama.

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya dengan bobot sebesar 40%, keterpaparan dengan bobot sebesar 30% dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana dengan bobot sebesar 30%. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana di Kota Serang diukur dengan indikator Indeks Resiko Bencana dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.38
Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Indeks Resiko Bencana	$\frac{Kerentanan}{kapasitas} x\ Bahaya$ Dimana: 1. Bahaya : probabilitas spasial, fekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunungapi, dan lainnya 2. Kerentanan : parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. 3. Kapasitas : Pendekatan tingkat ketahanan	Point	100	140,12	59,88	Rendah

Sumber : BPBD Provinsi Banten, 2024

Berdasarkan tabel di atas untuk indikator indeks resiko bencana tercapai 59,88% dengan kriteria ***Rendah*** dari target skor 100 point terealisasi 140,12 point dan masih harus menurunkan 40,12 point lagi atau sebesar 40,12%. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten pada tahun 2023 bahwa Kota Serang untuk resiko bencana masih tergolong dalam kelas resiko tinggi dengan mencakup sembilan jenis ancaman yaitu: Gempabumi, Tsunami, Letusan Gunung Api, Tanah Longsor, Banjir, Banjir Bandang, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Gelombang Ekstrim dan Abrasi. dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

Kota Serang untuk semua ancaman termasuk dalam kelas resiko tinggi termasuk kebakaran lahan yang menyebabkan kerugian materiil harta dan jumlah korban serta frekuensi kejadian paling tinggi yang terjadi di Kota Serang.

Capaian Indeks Resiko Bencana setiap tahunnya fluktuasi setiap tahun, untuk capaian terhadap target akhir RPJMD tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.39
Indikator Sasaran Strategis Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana dalam Perubahan RPJMD 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Sesudah
1	Indeks Resiko Bencana	Point	168,56	168,56	168,56	168,56	156,20	140,12	100	100

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023

Tabel 3.40
Capaian Kinerja Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana Tahun 2023 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2022	
				Realisasi	%
1.	Indeks Resiko Bencana	Point	100	140,12	59,88

Sumber : BPBD Kota Serang, 2023

Berdasarkan tabel di atas indeks resiko bencana terhadap kondisi akhir RPJMD harus menurunkan sebesar 50,12 % lagi agar target dapat tercapai dengan maksimal.

Sebagaimana grafik indeks resiko bencana Kota Serang terhadap Provinsi Banten dapat diketahui bahwa trend resiko bencana Kota Serang berada di atas IRB Banten selama tahun 2017-2023. Selama tahun 2017-2023 Kota Serang memiliki nilai IRBI di atas Provinsi Banten hal ini disebabkan karena wilayah Kota Serang mempunyai potensi kebencanaan kebakaran lahan, banjir dan tanah longsor yang lumayan cukup tinggi jika dibandingkan dengan wilayah di seluruh Provinsi Banten.

Grafik 3.10
Perkembangan Indeks Resiko Bencana Kota Serang Terhadap Provinsi Banten Tahun 2017-2023

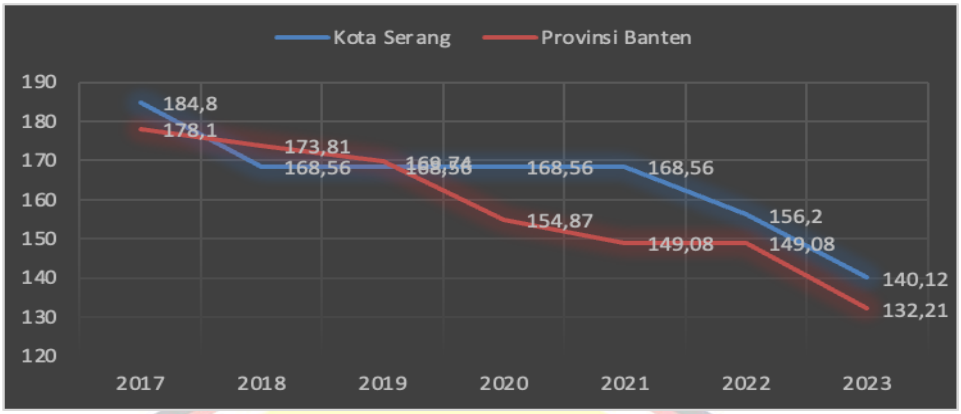

Sumber : BPBD Provinsi Banten, 2024

Faktor Pendorong Penanganan Bencana di Kota Serang antara lain :

a. Adanya kajian risiko bencana yang memetakan potensi bencana, kerentanan dan kapasitas daerah;
b. Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program kegiatan;
c. Semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat yang tinggi;
d. Kesadaran masyarakat akan ancaman bencana semakin tinggi sehingga menuntut mereka untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menurunkan resiko bencana;
e. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran melalui program pemerintah daerah dan pusat;
f. Peningkatan kompetensi personil dan relawan baik melalui program internal pemerintah kota Serang maupun melalui kerjasama dengan pemerintah provinsi, pusat dan pihak swasta;
g. Adanya dukungan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk kerusakan-kerusakan yang bersifat non permanen;
h. Adanya layanan rabeg sebagai salah satu aplikasi penanganan dan pengaduan bagi masyarakat jika ada kejadian bencana terjadi;
i. Pembentukan Satlakar di Wilayah sebagai SDM pendukung proteksi dan penanggulangan bencana kebakaran.

Untuk mencapai sasaran menurunnya resiko bencana dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana, disusunlah proses bisnis yang berisi uraian proses utama, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis pada sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana berserta intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang.

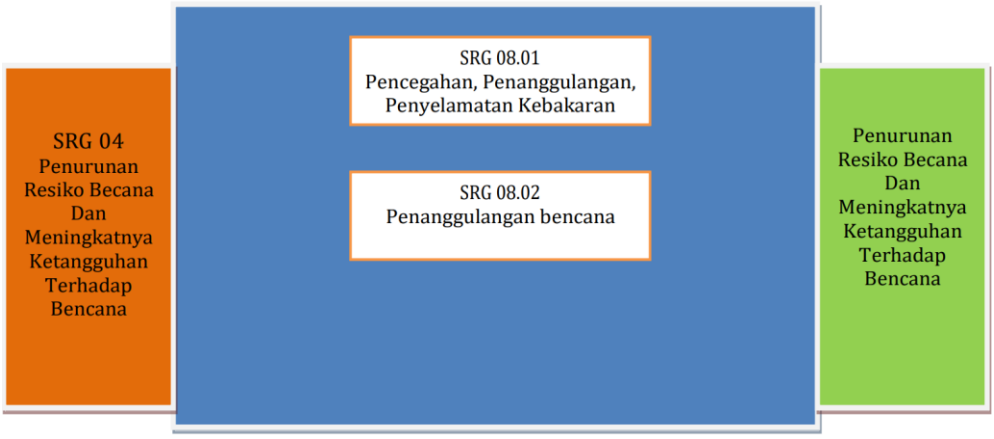

Gambar 3.19 Proses Bisnis Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana

Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta penanggung jawab. Berikut disajikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran daerah beserta perangkat daerah pengampu.

Sumber : Bappeda Kota Serang, 2021

Gambar 3.20 Logical Frame Sasaran Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana

Tabel 3.41
Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Penanganan Bencana di Kota Serang

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Sinergisitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal	a. Membangun koordinasi dengan berbagai stakeholder melalui forum pengurangan risiko bencana; b. Memfasilitasi pembentukan kampung tangguh bencana merupakan sarana edukasi bagi masyarakat untuk memetakan potensi bencana di wilayahnya, membangun kebersamaan dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana; c. Membangun koordinasi yang sinergis antara masyarakat pada tingkat kampung hingga tingkat kota dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (Forum KTB tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota); d. Melaksanakan simulasi penanggulangan bencana bersama-sama masyarakat maupun swasta.
2	Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang bahaya kebakaran dan cara pencegahan serta penanggulangannya	Penyuluhan pada masyarakat di wilayah prioritas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat terhadap pencegahan kebakaran.
3	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat terhadap pencegahan kebakaran dan upaya pada saat terjadinya kebakaran	Penyuluhan pada masyarakat di wilayah prioritas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat terhadap pencegahan kebakaran.

4. TUJUAN STRATEGIS 4

"Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah"

Penanaman cabe dalam pengendalian inflasi

Pembangunan sentra kuliner di Pasar Lama

Pemberian bantuan jarring rampus ke nelayan

Pelatihan Pembuatan roti untuk wirausaha

Gambar 3. 21 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Keunggulan Lokal

Indikator Kinerja Utama ke 4 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 yaitu **" Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing"** dan tujuan **"Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah"**. Pencapaian misi ini didukung oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Perangkat Daerah utama.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Serang pada Tahun 2023 terkontraksi sebesar 4,74% dimana pencapaian tersebut meningkat dibandingkan Tahun 2022 yang mencapai 3,8%. Hal ini merupakan dampak

dari menggeliatnya seluruh sektor perekonomian di Kota Serang bidang perdagangan dan jasa dimana mulai tumbuh hotel, tempat makan, resto dan café yang membuat pertumbuhan ekonomi di Kota Serang berkembang dengan pesat.

Tabel 3.42
Capaian Pengukuran Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Serang
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	**LPE = (PDBt – PDBt-1)/PDBt-1 x 100%** **Dimana:** PDBt = Produk Domestik Bruto pada tahun t PDBt-1 = Produk Domestik Bruto pada tahun sebelumnya	%	5,50	4,74	86,18	Tinggi

Sumber : BPS Kota Serang, 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja untuk indikator laju pertumbuhan ekonomi sebesar 86,18% dengan kategori Tinggi. Hal ini menunjukkan adanya pergerakan kembali perekonomian di Kota Serang yang sebelumnya di angka 4,71 sehingga mengalami kenaikan sebesar 0,03 point.

Namun jika disandingkan dengan target yang harus dicapai pada masa periode akhir RPJMD, pencapaian di angka 4,74 sudah berkategori tinggi bisa dilihat pada tabel 3.43. Hal ini harus prioritas perhatian bagi Pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sejahtera lagi.

Tabel 3.43
Realisasi dan Target LPE dalam Perubahan RPJMD
Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Sesudah
1	LPE	Poin	6,59	6,2	-1,29	3,80	4,71	4,74	6,91	5,50

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023

Tabel 3.44
Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2023	
				Realisasi	%
1.	LPE	Point	5,50	4,74	86,18

Sumber : BPS Kota Serang, 2024

Grafik 3.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Serang Tahun 2017–2023

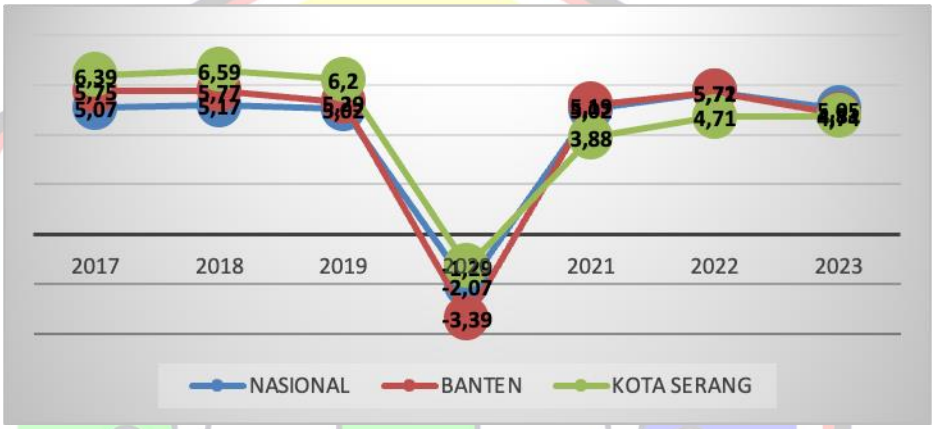

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Selama periode 2017-2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Serang selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Serang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara regional Banten dan nasional. Namun pada tahaun 2021-2023 LPE Kota Serang di bawah angka Provinsi Banten dan Nasional hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Serang tahun 2016-2019 setiap tahunnya menunjukkan trend kenaikan dan cukup stabil terhadap gangguan/guncangan eksternal, baik dalam tataran global ataupun domestik.

Pada Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Serang meningkat sebesar 4,74% dibandingkan tahun 2022, sementara pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05% dan Provinsi Banten sebesar 4,81 %. Oleh karena itu maka masih perlu akselerasi pertumbuhan ekonomi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Faktor Penghambat yang menghambat percepatan kemajuan Kota Serang adalah:

1. Belum optimalnya daya saing produk unggulan daerah, terutama untuk produk-produk usaha mikro;
2. Belum optimalnya inovasi dalam hal ini terkait dengan kapasitas produksi, kapasitas inovasi, dan kemampuan daerah Kota Serang menarik investasi dalam kerangka meningkatkan struktur perekonomian;
3. Rendahnya pembayaran pajak yang bersumber dari perdagangan dan jasa;
4. Belum meratanya pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kota Serang;

Upaya dan strategi yang dilakukan :

1. Peningkatan daya beli masyarakat melalui operasi pasar (Dinas Koprasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan);
2. Menurunkan kemiskinan dan pengggangguran terbuka melalui program pada karya pada setiap program pengadaan barang dan jasa;
3. Pembinaan UMKM dan usaha Kreatif serta kegiatan pemberdayaan yang lain;
4. Membuka sentra kuliner di Pasar Lama dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah;
5. Memberikan pelatihan dan bintek keahlian untuk wirausahawan;
6. Mempermudah perijinan dalam berusaha dan berinvestasi;
7. Mempermudah pembayaran pajak bagi para wajib pajak.
8. Mendorong inovasi dan promosi terkait potensi Kota Serang.

a. Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat

Capaian Kinerja meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat diukur dengan 6 indikator yaitu tingkat inflasi daerah, indeks daya beli, PDRB Perkapita, indeks gini williamson, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka dengan capaian sebagaimana tabel 3.43.

Pasar Rau Kota Serang

Rekruitmen Tenaga Kerja

Pemberian Bantuan Benih Ikan untuk Pembudidaya

Bintek Persiapan Memasuki Dunia Kerja dalam mengurangi pengangguran

Gambar 3.22 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat

Tabel 3.45
Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Tingkat inflasi daerah	$[\{(1+\Delta Inf_1)(1+\Delta Inf_2)(1+\Delta Inf_t)\}^{1/t}] - 1$ Dimana : ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi. Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut : $\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$ Dimana : Inf_n = nilai inflasi pada tahun n $Inf_{(n+1)}$ = nilai pada 1 tahun berikutnya n = tahun ...	%	3	2,11	129,67	Sangat Tinggi
2	Indeks daya beli	$Daya\ Beli_j = \prod_{i=1}^{m} \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}}\right)^{1/m}$ Dimana : Pik : harga komoditas di kota Serang Pij : harga komoditas di Kota lain M : Jumlah komoditas	Poin	79,98	80,61	100,79	Sangat Tinggi
3	PDRB per kapita	$\frac{PDRB}{\Sigma\ Jumlah\ Penduduk} x\ 100\%$	Juta (Rp)/Jiwa	51,67	55,04	106,52	Sangat Tinggi

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
4	Indeks Gini	$cv_w = \frac{\sqrt{\sum(Yi - \bar{y})^2 fi/n}}{\bar{y}}$ Dimana: I_W= nilai indeks Williamson Y_i= PDRB per kapita Kecamatan-i Y= PDRB per kapita Kabupaten f_i= Jumlah Penduduk Kecamatan-i n= Jumlah Penduduk Kabupaten i = 1,2,3,…,x	Poin	0,350	0,306	111,56	Sangat Tinggi
5	Angka Kemiskinan	$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^\alpha$ Dimana : α = 0 z = garis kemiskinan. yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.	%	5,76	6,2	92,36	Sangat Tinggi
6	Tingkat pengangguran terbuka	$\frac{\Sigma\ Pengangguran}{\Sigma\ Angkatan\ Kerja} x\ 100\%$	%	8,96	7,45	116,85	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian Kinerja					**109,63**	**Sangat Tinggi**

Sumber : BPS Kota Serang, 2024

Berdasarkan tabel di atas meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat melalui 6 indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2023 untuk rata-rata capaian kinerja sebesar 109,63% dengan kategori pelayanan ***Sangat Tinggi***. Indikator kinerja yang mengalami capaian paling tinggi adalah tingkat inflasi daerah sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan capaian yang paling rendah adalah Angka Kemiskinan yang mencapai 6,2% dari target 5,76% dengan capaian realisasi sebesar 92,36%.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan laju perekonomian mengalami kenaikan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.46
Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat dalam Perubahan RPJMD 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Sesudah
1	Tingkat inflasi daerah	%	3.78	3,06	1,91	2,23	7,54	2,11	3-5	3-5
2	Indeks daya beli	Point	78,76	79,12	78,65	78,81	79,78	80,61	83,61	79,98
3	PDRB per kapita	RpJuta/jiwa	42,76	45,89	45,17	47,49	49,14	50,54	52,50	51,67
4	Indeks Gini	Poit	0,351	0,342	0,352	0,34	0,354	0,306	NA	0,346
5	Angka Kemiskinan	%	5,36	5,28	6,06	6,79	5,94	6,20	4,86	5,76
6	Tingkat pengangguran terbuka	%	8,16	8,08	9,26	9,41	8,17	7,45	7,93	8,96

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel di bawah rata-rata capaian kinerja untuk 6 indikator di atas adalah sebesar 109,63%. Dalam tahun kelima RPJMD capaian kinerja perekonomian daerah dan daya beli masyarakat mengalami peningkatan kembali di tahun 2023 setelah pada tahun 2020 banyak mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD hal ini terjadi karena dampak dari terjadinya wabah Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak langkah dan upaya yang harus dilakukan pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan perekonomian daerah dan daya beli masyarakat.

Tabel 3.47
Capaian Kinerja Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2023 Terhadap Kondisi akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%
1.	Tingkat inflasi daerah	%	3-5	3	2,11	129,67
2.	Indeks daya beli	Poin	79,98	79,98	80,61	100,79
3.	PDRB per kapita	Rp Juta/Jiwa	51,67	51,67	55,04	106,52
4.	Indeks Gini	Poin	0,346	0,350	0,306	111,56
5.	Angka Kemiskinan	%	5,76	5,76	6,2	92,36
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,96	8,96	7,45	116,85
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						**109,63**

Sumber : BPS Kota Serang, 2024

Berdasarkan tabel dari ke 6 indikator sasaran tersebut bahwa angka kemiskinan yang paling rendah hanya tercapai sebesar 92,36% dari target 5,76%. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang namun jumlah penduduk miskin bertambah yang disebabkan oleh berbagai factor.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat, disusunlah proses bisnis yang berisi uraian proses utama, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis pada sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat berserta intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang.

Gambar 3.23 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat

Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta penanggung jawab. Berikut disajikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran daerah beserta perangkat daerah pengampu.

Gambar 3.24 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat

1. Tingkat inflasi daerah

Gerakan Pangan Murah

Penanaman Demplot Bawang Merah

Gambar 3.25 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Pengendalian Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Tingkat inflasi Kota Serang tahun 2023 mencapai 2,11% menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 7,22%.

Grafik di bawah menunjukkan laju inflasi di Kota Serang selama Mei 2023 sampai dengan Januari 2024.

Grafik 3.12

Laju Inflasi Kota Serang Tahun 2023–2024

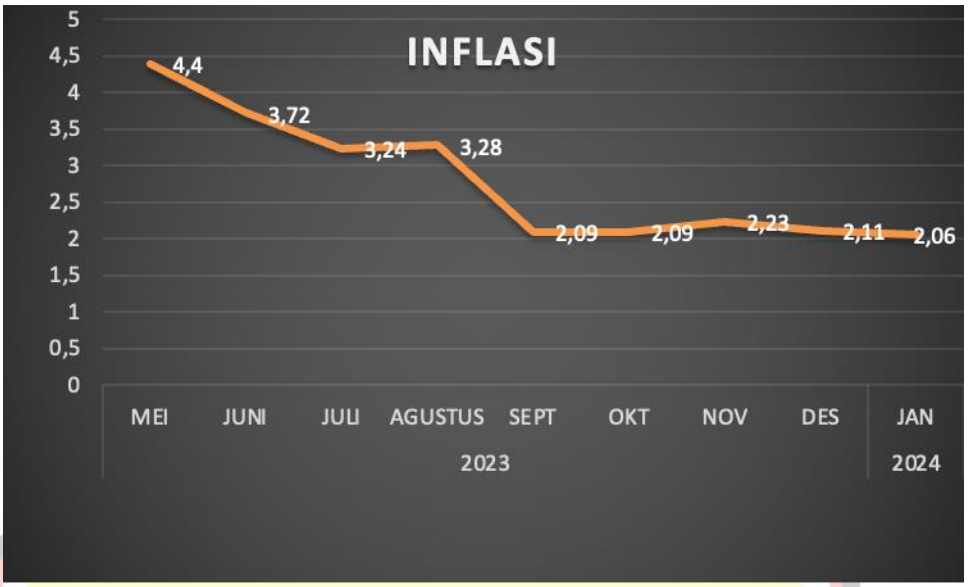

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Pada Triwulan IV 2023, Inflasi di Kota Serang pada Bulan Oktober stabil dari Bulan September yaitu sebesar 2,09% (yoy). Inflasi bulanan (mtm) Oktober juga stabil sebesar 0,06%. Inflasi tahun kalender (ytd) sebesar 1,46%. Pada Bulan November Inflasi meningkat sebesar 2,23% (yoy), 1,81% (ytd) dan 0,34% (mtm). Sementara pada Bulan Desember terjadi penurunan inflasi tahunan (yoy) dan tahun kalender (ytd) masing-masing sebesar 2,11%, inflasi bulanan (mtm) sebear 0,30%. Namun untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan Desember mengalami kenaikan yaitu sebesar 120,24.

Perkembangan harga berbagai komoditas di Triwulan IV tahun 2023 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy di Kota Serang terutama pada akhir tahun yaitu Bulan Desember antara lain: cabai merah, cabai rawit, cabai hijau, labu siam/jipang, bawang putih, daun bawang, pir, tarif jalan tol, petai, dan buncis. Sementara komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi (yoy) antara lain : melon, pembersih lantai, angkutan dalam kota, buah naga, tomat, ikan gurami, sabun cair/cuci pirng, ikan asin peda, santan jadi dan terong.

Tabel 3.48
Rekapitulasi Inflasi di Kota Serang pada Triwulan III Tahun 2023

Bulan	Inflasi Bulanan (m-t-m)	Inflasi Tahun Kalender (ytd)	Inflasi Tahunan (y-o-y)	IHK
Oktober	0,06	1,46	2,09	119,88
November	0,34	1,81	2,23	119,88
Desember	0,30	2,11	2,11	120,24

Sumber : BPS Kota Serang, 2023

Kota Serang selama periode 2017-2023 mengalami fluktuasi penurunan laju inflasi namun terjadi peningkatan kembali di tahun 2021 dan mengalami lonjakan yang cukup tinggi pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nasional, Angka inflasi Kota Serang berada di atasnya. Namun pada tahun 2023 Laju inflasi Kota Serang posisinya berada di bawah Nasional dan Provinsi Banten. Menurunnya angka inflasi di Kota Serang adalah berkat dukungan dan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan beberapa program pengendalian inflasi sehingga setiap harga bahan pokok yang melambung tinggi bisa segera terkendali.

Fluktuasi tingkat inflasi di Kota Serang dibandingkan nasional dan provinsi Banten terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.13
Laju Inflasi Kota Serang Terhadap Provinsi Banten dan Nasional
Tahun 2017–2023

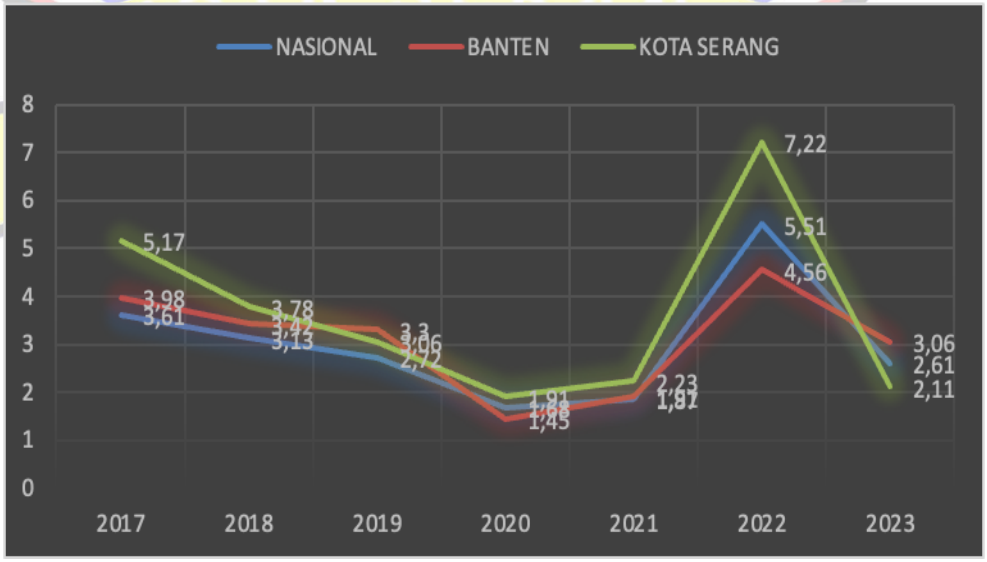

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Permasalahan inflasi di Kota Serang

a. Pada Bulan Oktober Tahun 2023 Adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks 10 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,09%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,99%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,19%, kelompok Kesehatan sebesar 2,41%, kelompok Pendidikan sebesar 1,82%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,51%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,11%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,73%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,46%. Semnetara itu kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,22%.
b. Pada Bulan November 2023 Inflasi year on year (yoy) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks 10 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,57%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,73%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,30%, kelompok Kesehatan sebesar 2,57%, kelompok Pendidikan sebesar 1,82%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,35%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran masing-masing sebesar 1,11%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,56%, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,52%, sementara itu kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,53%.
c. Pada Bulan Desember 2023 inflasi year on year (yoy) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks 10 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,46%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,61%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,76%, kelompok Kesehatan sebesar 2,10%, kelompok Pendidikan sebesar 1,82%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,11%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran masing-masing sebesar 1,04%, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan

sebesar 0,70%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,42%, sementara itu kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,56%.

Strategi dan Upaya Pengendalian Inflasi :

a. Keterjangkauan Harga

- Melakukan Operasi Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah (GPM) pada Triwulan IV yang bertujuan agar masyarakat Kota Serang dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,
- Memberikan bantuan berupa paket sembako, telur dan daging terutama bagi KRS (Keluarga Resiko Stunting) bagi masyarakat/keluarga PKH yang tercatat data di Dinsos

b. Ketersediaan Pasokan

- Melakukan monitoring/pengawasan harga bahan pokok setiap hari dari tiga Pasar yang ada di Kota Serang yaitu Pasar Lama, Pasar Kepandean dan Pasar Rau.
- Melakukan Sidak/pengawasan ke Bulog terkait ketersediaan/stok beras menjelang Nataru. Untuk ketersediaan (stok) beras masih aman sampai akhir tahun.
- Melakukan panen beras, dan melakukan Gerakan menanam bawang merah dan cabai guna menjaga ketersediaan/stok supaya aman dan tidak terjadi kenaikan menjelang akhir tahun.

c. Kelancaran Distribusi

- Dinkopukmperindag bersama dengan BI Perwakilan Prov. Banten memprakarsai berdiri Pasar Lingkungan Banjar Asri Kec. Cipocok Jaya yang bertujuan agar masyarakat Kota Serang terutama masyarakat yang ada di dekat Lingkungan Banjar Asri tidak perlu jauh datang ke Pasar Rau untuk berbelanja, karena komoditas yang dijual juga sama seperti yang ada di Pasar Rau karena mendapat subsidi angkut dari BI. Berdirinya Pasar Lingkungan juga menjadi salah satu gagasan untuk Program Unggulan TPID dalam rangka pengendalian inflasi.
- Pemkot Serang bekerja Bersama dengan Kapolresta, Dishub dan lain-lain untuk memastikan kelancaran distribusi di Kota Serang.

d. Komunikasi Efektif

Selama triwulan IV Tahun 2023 Pemerintah Kota Serang telah melaksanakan beberapa kali Rapat Koordinasi seperti High Level Meeting (HLM) pada tanggal 18 Oktober 2023, dan 14 Desember 2023. Serta Rapat Koordinasi lain dengan TPID Kota Serang.

2. Indeks Daya Beli

Indeks Daya Beli merupakan kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat antara lain tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kebutuhan, kebiasaan masyarakat, harga barang dan mode. Indeks Daya Beli Kota Serang 2018 sebagai kondisi awal RPJMD.

Grafik 3.14
Indeks Daya Beli Kota Serang Tahun 2018–2023

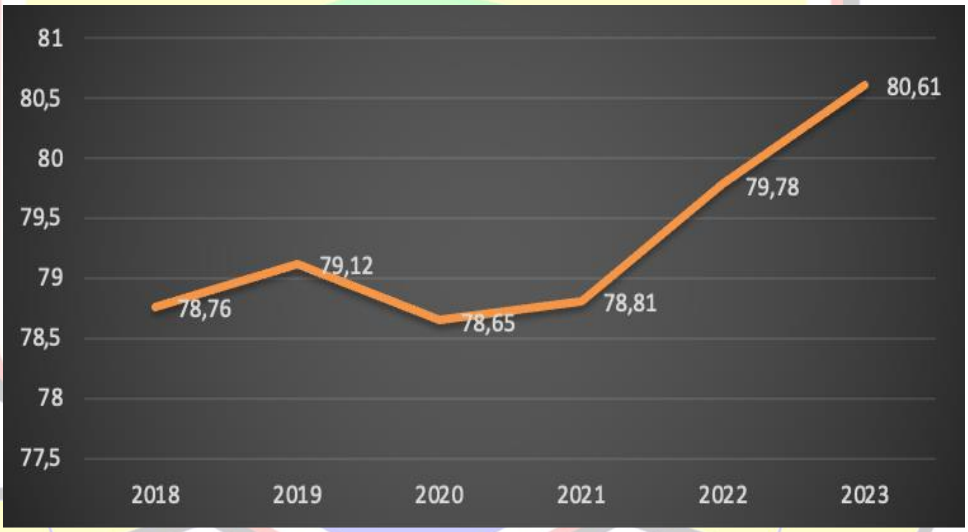

Sumber : BPS Kota Serang, 2024

Berdasarkan grafik di atas indeks daya beli Kota Serang Tahun 2018 adalah 78,76 poin dan sepanjang tahun 2018-2023 terjadi fluktuasi nilai kenaikan di tahun 2019 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 akibat menurunnya daya beli masyarakat yang terdampak covid-19 dimana sektor perekonomian di Kota Serang mengalami penurunan yang sangat signifikan khususnya pada tingkat daya beli masyarakat. Adapun untuk tahun 2023 indeks daya beli mencapai 80,61 dari yang ditargetkan sebesar 79,98 atau 100,79 %.

Tabel 3.49
Program Koordinasi Dalam Menjaga Kestabilan Inflasi Triwulan IV Tahun 2023

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Hasil
1	Pembagian beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dari Bapanas	11-12 Oktober 2023	Kelurahan Trondol dan Sepang	Penyaluran Bulan September, Oktober dan November Jumlah beras yang disalurkan 891,51 ton dengan perincian jumlah penerima 29.717 KPM. Per KPM mendapatkan 10 kg beras selama 3 bulan.
2	Rapat High Level Meeting (HLM) Triwulan III	18 Oktober 2023	Satu Tempat Caffe & Eatery	1. Inflasi di Kota Serang pada bulan September 2023 sebesar 2,09% (yoy) 2. Stabilnya laju inflasi Kota Serang merupakan hasil kerja keras semua pihak terkait, TPID, Masyarakat dan swasta 3. Upaya Pemerintah Kota Serang dalam penanganan Inflasi mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat berupa dana insentif fiskal tahun berjalan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Ri Nomor 97.
3	Panen Padi	25 Oktober 2023	Teritih, Kec. Walantaka	Persiapan Panen Padi di Kelompok Tani Kerta Mukti dengan melakukan pengubinan, hasil Varietas inpari 32 dengan provitas 8,5 ton per ha.

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Hasil
4	Pembagian daging ayam dan telur	26 Oktober 2023	Kecamatan yang ada di Kota Serang	Pembagian ayam dan telur untuk Keluraga Resiko Stunting (KRS)
5	Rapat Koordinasi Laporan Dana Akokasi Fiskal	01 November 2023	Aula Lt. 3 Setda Kota Serang	1. Pemerintah Kota Serang mendapatkan 2 kali alokasi dana insentif fiskal di tahun 2023 yaitu dalam rangka penanganan inflasi dan pelaksanaan P3DN 2. Dana Insentif fiskal tahap pertama sudah tersalur sebesar 50%, sehingga bagi OPD yang terkait segera mempersiapkan dengan baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya
6	Rapat Ekspose Laporan Perekonomian Kota Serang tahun 2023	07 November 2023	Ruang Rapat Lt. 3 Setda Kota Serang	1. Laporan Perekonmian yang akan dibuat berisi data-data dan analisis serta rekomendasi yang harus dilakukan untuk meningkatkan perekonomian di Kota Serang; 2. Terkait data yang belum lengkap, konsultan akan berkoordinasi kembali kepada OPD terkait.
7	Rapat Evaluasi Kinerja dan Kegiatan Penanganan Inflasi Daerah Kota Serang Tahun 2023	16 November 2023	Ruang Rapat Lt. 3 Setda Kota Serang	Rapat kali ini membahas tentang program penanganan inflasi yang menggunakan pembiayaan insetif fiskal dari pemerintah pusat. Kepada OPD yang telah mendapatkan

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Hasil
				dana insentif fiskal harus melaporkan realisasi kegiatan yang sudah dilaksanakan.
8	Gerakan Masyarakat Makan Ikan (GEMARIKAN)	08, 14, 16 November 2023	Kelurahan Sukalaksana, Kec. Curug, Kel. Cilowong, Kec. Taktakan, Kel. Trondol, Kec. Serang	Penyerahan ikan (mentah) untuk masyarkat diserahkan secara simbolis oleh Walikota ke perwakilan masyarakat yang berpotensi stunting sebanyak kurang lebih 10 orang. Diakhir acara juga ada pembagian bakso ikan gratis oleh masyarakat
9	Peluncuran “Katuran Dahar” Kawasan Kuliner Zona KHAS (Kuliner, Halal, Aman, Sehat)	18 November 2023	Pasar Lama	Launching atau peresmian Zona Khas di Pasar Lama yaitu dalam rangka menuju piloting zona kuliner halal, aman dan sehat (KHAS)
10	Rapat Pemetaan Program dan Kegiatan Pendukung Inflasi Tahun Anggaran 2024	16 November 2023	Ruang Rapat Lt. 3 Setda Kota Serang	Rapat kali ini membahas tentang pemetaan program kegiatan pendukung inflasi tahun anggaran 2024, setiap kegiatan dari OPD pendukung inflasi harus mecakup strategi 4 K yaitu (Keterjangkauan harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif)

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Hasil
11	Gekar Agribisnis dan Gerakan Pangan Murah (GPM)	20-21 November 2023	Alun-alun Barat Kota Serang	Penguatan Posisi Tawar Komoditas Pangan Daerah yang Inovatif dalam rangka Mendukung Upaya Penanggulangan Inflasi, Stunting dan Kemiskinan. Rangkaian acara: Temu Wicara, Pasar Tani/pameran, lomba untuk para petani yaitu asah terampil, unjuk tangkas, dan paduan suara KWT.
12	Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Dengan Para Pelaku Usaha Agar Terciptanya Iklim Investasi yang Berkelanjutan di Kota Serang	28 November 2023	Hotel Flamengo	1. Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) tertuang dalam Perpres No. 91 Tahun 2017 dan Kota Serang sudah memiliki Satgas PPB tertuang dalam Keputusan Wali Kota Serang Nomor 060/Kep.393-HUK/2021; 2. Pelaku UMKM setidaknya harus memiliki izin atau legal dengan mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB).
13	Operasi Pasar Murah	30 November 2023	Kasemen	Pemerintah Kota Serang menggelar acara Seba, yang didalamnya terdapat Operasi Pasar Murah untuk masyarakat Kota Serang.
14	Menghadiri Policy Dialog Teknis Pelaporan TPID	01 Desember 2023	BSD Tangerang	Policy Dialog terkait Teknis Pelaporan TPID

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Hasil
15	Sidak Harga dan Stok Kebutuhan Pokok	08 Desember 2023	Pasar Rau	1. Sidak/ Monitoring harga dan stok dilakukan sebagai bentuk kesiapan menghadapi Nataru 2. Beberapa bahan pokok seperti beras, minyak dan cabai masih mengalami kenaikan harga 3. Masyarakat berharap pengelolaan Pasar Rau dapat semakin lebih baik dari segi parkir hingga tata kelola bangunan bagi pedagnag 4. Pemerintah Kota Serang akan berupaya menstabilkan harga bahan pokok menjelang libur Nataru.
16	High Level Meeting (HLM) Triwulan IV	14 Desember 2023	Saung Ende, Wisata Alam dan Kuliner	1. Inflasi di Kota Serang pada bulan November 2023 sebesar 2,33% (yoy) meningkat dibanding bulan lalu (bulan September) sebesar 2,09% namun masih stabil dibawah nasional; 2. Stabilnya laju inflasi Kota Serang merupakan hasil kerja keras semua pihak terkait, TPID, Masyarakat dan swasta

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Hasil
16	Gerakan Menanam cabai	18 Desember 2023	Kel. Pager Agung, Kec. Walantaka	Penanaman Demplot Cabai Rawit 1 ha, Poktan Sejati II , sumber dana APBD (Insentif Fiskal)
17	Gerakan Pangan Murah (GPM)	18 s.d Desember 2023	18 Desember 2023 di Lapangan Puspemkot Serang 19 s.d 22 Desember 2023 di enam kecamatan Kota Serang	Dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan menjelang akhir tahun, Pemerintah Kota Serang mengadakan gerakan pangan murah dengan menyediakan paket sembako untuk masyarakat, serta bantuan paket sembako berupa beras, telur dan daging kepada keluarga PKH yang tercatat di Dinsos.
18	Menanam Bawang Merah	19 Desember 2023	Kel. Sawah Luhur, Kec. Kasemen	Penanaman Demplot Bawang Merah Kelompok Tani Sumber Jaya: 1. Sumber dana APBD (insentif fiskal) sebesar 5 ha. 2. Swadaya kelompok 7 ha
19	Pengawasan/Sidak ke Distributor Pupuk	20 Desember 2023	Distributor Pupuk PT sang hyang seri (persero) Kantor Regional I Cabang Serang	Pengawasan/monitoring pupuk ke distributor pupuk

Sumber TPID Kota Serang, 2024

3. PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita merupakan indikator kesejahteraan yang dihitung dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku terhadap jumlah penduduk.

Tabel 3.50
PDRB Kota Serang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2023

KATEGORI	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.722.129,51	1.745.449,22	1.856.192,80	2.022.166,94
B. Pertambangan dan Penggalian	1.951,47	1.908,85	1.970,98	2.008,42
C. Industri Pengolahan	1.416.474,35	1.483.753,42	1.663.435,29	1.812.020,42
D. Pengadaan Listrik dan Gas	52.000,78	54.976,11	62.339,34	65.703,51
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.979,93	8.620,44	9.449,80	10.065,04
F. Konstruksi	5.901.557,24	6.741.341,81	7.605.943,37	8.094.074,04
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.842.508,60	9.117.716,76	10.030.280,73	10.934.730,24
H. Transportasi dan Pergudangan	1.481.450,39	1.595.587,74	1.827.266,57	2.094.060,13
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.919.035,98	2.007.593,40	2.198.937,50	2.429.232,78
J. Informasi dan Komunikasi	1.295.429,74	1.372.405,42	1.474.593,85	1.608.446,40
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.025.760,75	1.088.173,34	1.152.264,52	1.236.576,88
L. Real Estate	2.910.875,86	3.046.943,94	3.323.195,93	3.546.602,90
M,N. Jasa Perusahaan	288.477,57	284.941,23	306.624,33	342.533,60
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.995.331,88	2.051.491,67	2.169.668,10	2.253.728,28
P. Jasa Pendidikan	1.458.792,33	1.461.933,99	1.493.442,76	1.632.655,03
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	718.420,48	797.752,95	854.240,87	949.283,46
R,S,T,U. Jasa lainnya	627.918,11	643.394,41	693.993,34	804.301,75
PDRB	**31.666.094,97**	**33.503.984,71**	**36.723.840,08**	**39.838.189,82**

Sumber BPS Kota Serang, 2024

Berdasarkan data BPS sepanjang tahun 2017-2023, diketahui bahwa PDRB per kapita Kota Serang mengalami kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Gambaran trend perkembangan PDRB Per kapita ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.15

PDRB PerKapita Kota Serang Tahun 2017–2023

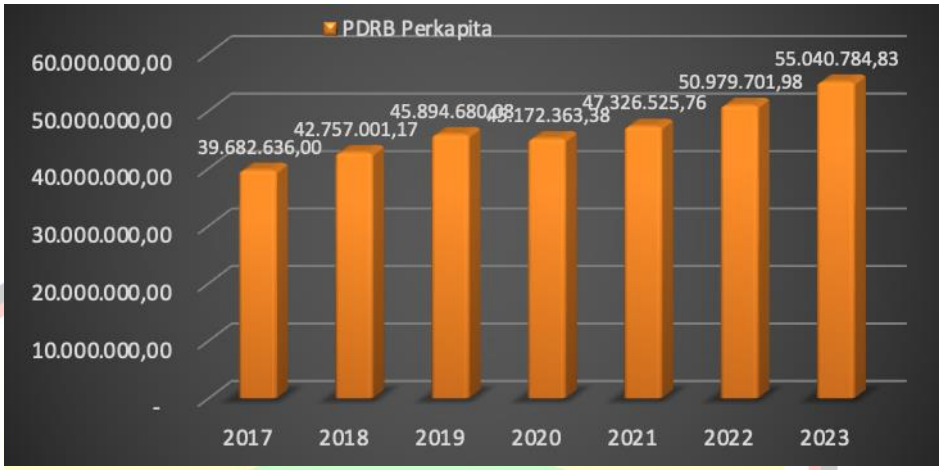

Sumber : BPS Kota Serang, 2024

Fakta ini menjelaskan kecenderungan meningkatnya kesejahteraan rakyat sebagaimana tercermin dari trend peningkatan nilai PDRB per kapita tersebut yang tercatat naik signifikan sebesar 28,98 persen dari sebesar Rp 39,68 juta per jiwa pada tahun 2017 menjadi Rp 55,04 juta per jiwa pada tahun 2023.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, maka Pemerintah Kota Serang pada tahun 2023 harus bisa mempertahankan dan dapat meningkatkan pendapatan per kapita di tahun yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kota Serang. Pemerataan pendapatan juga menggambarkan bagaimana manfaat terhadap akses pembangunan telah dirasakan oleh warga negara. Namun demikian, penting untuk diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya banyak capaian pembangunan dan pemerataan pendapatan juga bukan hanya merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau negara sendiri.

4. Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan ketimpangan rendah atau tingkat pemerataannya semakin baik. Sebaliknya bila Gini Ratio nya mendekati satu menunjukkan ketimpangan tinggi atau tingkat pemerataanya semakin buruk. Oshima menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut :

a. Ketimpangan taraf rendah, bila GR < 0,35
b. Ketimpangan taraf sedang, bila GR antara 0,35 - 0,5
c. Ketimpangan taraf tinggi, bila GR > 0,5

Pertumbuhan realisasi capaian indeks gini Kota Serang terhadap Provinsi Banten dan Nasional dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.16
Indeks Gini Kota Serang Terhadap Provinsi Banten dan Nasional
Tahun 2018–2023

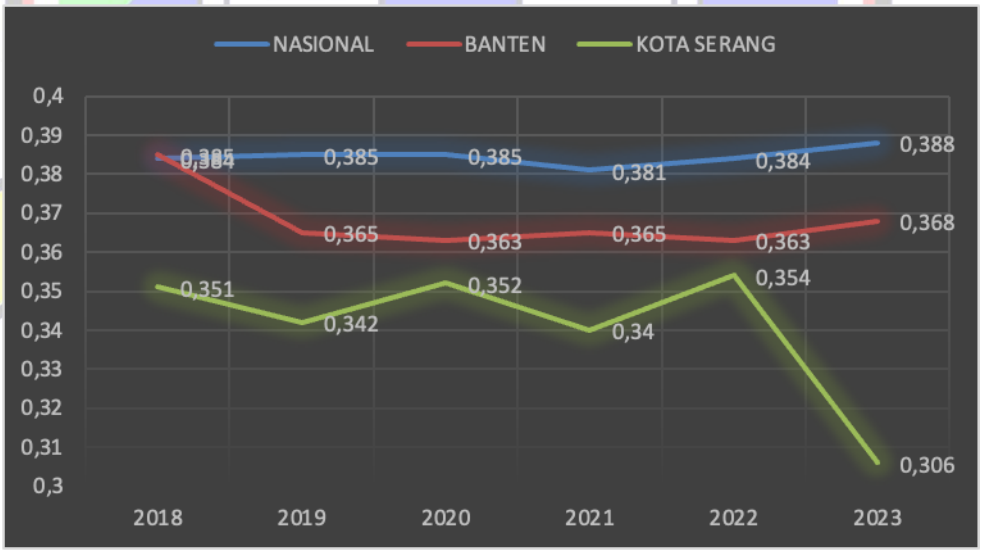

Sumber : BPS, Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Indeks Gini Kota Serang 2018 sebagai kondisi awal RPJMD Kota Serang Tahun 2018–2023 adalah

0,351 poin yang menandakan ketimpangan yang terjadi dalam kategori sedang atau moderat. Adapun untuk tahun 2023 indeks gini mencapai 0,306 atau berada pada kategori ketimpangan wilayah rendah yang artinya ketimpangan terjadi sudah mulai terjadi pemerataan di antara wilayah hal ini di sebabkan karena pembangunan di segala bidang ekonomi, sosial, budaya dan infrastruktur mulai merata di semua wilayah dengan dilaksanakannya program-program kewilayahan baik berupa prorgam yang bersumber dari DAU, DAK maupun APBD pada setiap kecamatan dan seluruh kelurahan.

Faktor yang mempengaruhi gini ratio adalah IPM, Jumlah Penduduk dan persentase penduduk miskin. Hal ini berbanding lurus dengan nilai IPM semakin meningkat dan angka penduduk miskin di Kota Serang semakin menurun sehingga mengakibatkan indeks gini rationya pun semakin rendah. Pemerintah Kota Serang pada Tahun 2023 terkait dengan masalah inflasi, penduduk miskin dan investasi serta perbaikan infrastruktur di semua wilayah kecamatan menjadi prioritas Pemerintah daerah dalam pembangunannya.

Perbandingan nilai gini ratio dengan Provinsi Banten dan Nasional, posisi Kota Serang masih di bawahnya dan hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan wilayah di Kota Serang sudah semakin rendah dan untuk pertumbuhan ekonominya sudah semakin merata di setiap wilayah di Kota Serang

5. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan di seluruh daerah perkotaan yang harus segera ditanggulangi. Angka kemiskinan yang terus menurun merupakan potret keberhasilan kinerja pemerintah dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat..

Pemerintah Kota Serang dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin dari 5,36% tahun 2018 turun menjadi 5,28% pada tahun 2019, Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan angka kemiskinan mencapai 6,06% dan pada tahun 2021 semakin meningkat menjadi 6,69%. Setelah kenaikan signifikan itu pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 5,94% dan melebihi dari target yang

telah ditetapkan di tahun ini namun di tahun 2023 terjadi kenaikan kembali untuk angka kemiskinan sebesar 6,20%. Fluktuasi laju angka kemiskinan bisa digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 3.17
Persentase Penduduk Miskin Kota Serang terhadap Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2017–2023

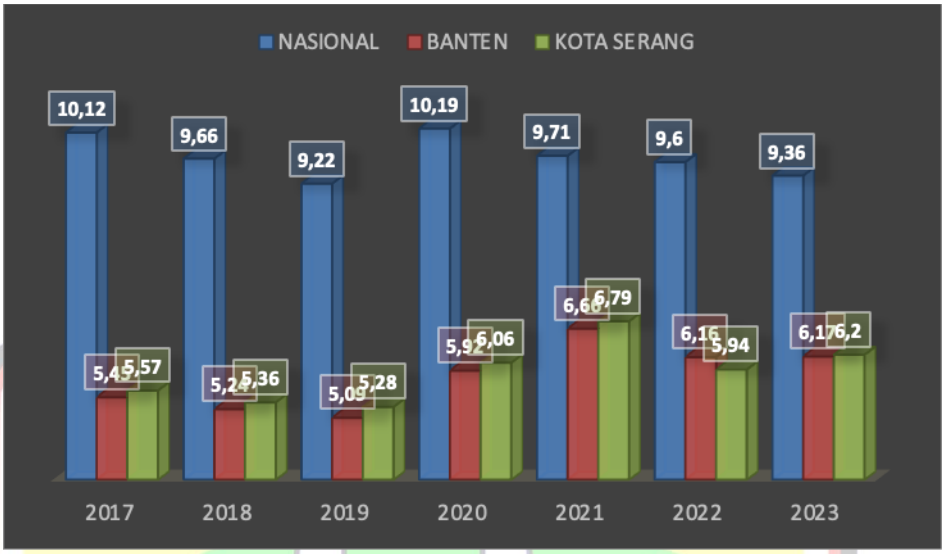

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan grafik di atas terlihat fluktuasi pergerakan persentase penduduk miskin dari tahun 2017-2023 yang terjadi pada Kota Serang, Provinsi Banten dan Nasional. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin sudah mengalami penurunan namun kembali melonjak pada tahun 2020 walaupun posisi Kota Serang masih di bawah angka Nasional dan Provinsi Banten namun pada tahun 2022 masa transisi new normal dari wabah covid-19 Kota Serang mengalami penurunan kembali sebesar 5,94% berada di bawah angka Provinsi Banten dan nasional. Pada tahun 2023 baik Provinsi Banten ataupun Kota Serang mengalami kenaikan untuk persentase penduduk miskinnya hal ini disebabkan oleh harga kebutuhan yang tinggi, lapangan kerja yang terbatas, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi serta tingkat kesehatan yang rendah.

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada Tahun 2023 pelaksanaan program untuk peningkatan ketenaga kerjaan masih relatif rendah seperti bursa kerja, pelatihan tenaga kerja dan lain sebagainya. Namun permasalahan mendasar dibidang ketenagakerjaan

adalah rendahnya skill atau keahlian yang dimiliki oleh angkatan keran sehingga mengakibatkan masih tingginya angka pengangguran. Hal ini disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja, selain itu perkembangan industri kreatif dan wirausahawan muda belum optimal, berpengaruh besar terhadap kondisi ketenaga kerjaan, PHK, perusahaan banyak yang mengalami pailit sehingga Tingkat pengangguran terbuka Kota Serang menurun dari 8,17% pada Tahun 2022 menjadi sebesar 7,45% di tahun 2023. Hal ini berdampak positif sekali yang ditunjukkan dengan tingkat pengangguran di Kota Serang semakin menurun dan lapangan pekerjaan mulai bertambah dengan munculnya usaha yang mendirikan café dan resto di wilayah Kota Serang.

Grafik 3.18
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Serang terhadap Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2018–2023

Sumber : Badan Pusat Statistik , 2024

Berdasarkan grafik di atas angka tingkat pengangguran terbuka Kota Serang berada di atas nilai Provinsi Banten dan Nasional pada tahun 2023, mengalami penurunan baik angka nasional atau provinsi Banten.

Faktor yang menghambat/ kendala meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Serang adalah:

a. Adanya pembangunan Infrastruktur yang tidak merata,

b. Pusat-pusat perekonomian dan perdagangan yang tidak merata,
c. Pemberlakuan UMK per wilayah,
d. Persebaran industri yang tidak merata.
e. Pertumbuhan ekonomi di Kota serang masih tergantung pada jasa dan perdagangan serta daya beli masyarakat yang masih rendah
f. Kebijakan perekonomian masih tergantung dengan pusat seperti factor penyebab inflasi
g. Banyak Penduduk Kota Serang yang mencari pekerjaan di Luar Kota Serang mengakibatkan rendahnya pendapatan dari sector tenaga kerja

Langkah dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan daya beli masyarakat antara lain :

a. Sinkronisasi program–program yang dapat mengentaskan kemiskinan atau dapat memperkecil angka kedalaman kemiskinan
b. Pemerataan pembangunan infrastruktur,
c. Sinkronisasi program-program pemerintah Kota Serang yang dapat dilaksanakan di setiap wilayah baik di perkotaan sehingga pemerataan pembangunan akan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
d. Memonitor pasokan dan distribusi barang khususnya barang dan jasa yang berkontribusi besar terhadap hajat hidup orang banyak
e. Meningkatkan sector pendapatan dari pajak dan retribusi untuk lebih memaksimalkan pembangunan di seluruh wilayah
f. Memudahkan perijinan bagi para pengusaha yang ingin berinvestasi di Kota Serang
g. Mengadakan pasar murah bagi para masyarakat dalam menekan laju inflasi
h. Memberikan ketrampilan dan keahlian bagi para lulusan sekolah agar bisa berwirausaha
i. Memberikan bantuan dan subsidi bagi para pedagang, petani dan nelayan serta warga berpengahsilan rendah untuk bisa mendapatkan modal berwirausaha.

5. TUJUAN STRATEGIS 5

"Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi"

Mobil Pelayanan Keliling Pembayaran Pajak

Pelayanan Adminduk Ke sekolah MAN untuk Pembuatan KTP bagi Pelajar

Pelayanan Mobil Arsip Keliling

Kegiatan MANTAP (Melayani Izin di Tempat) Bersama Disperindagkop di Pasar Lama

Gambar 3.26 Upaya Pemerintah Kota Serang dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima

Indikator Kinerja Utama ke 5 ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke empat yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 yaitu **"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik"** dan tujuan **"Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi"**. Pencapaian misi ini didukung oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Bapenda, BKPSDM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan dan Kesbangpol sebagai Perangkat Daerah utama.

Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2023 telah membawa perubahan dalam implementasi tata kelola pemerintahan. Hasil evaluasi Kementerian PANRB terkait pelaksanaan area perubahan dalam reformasi birokrasi pada Pemerintah Kotra Serang adalah sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.51
Pencapaian Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2018-2023

NO	TAHUN	NILAI	PREDIKAT
1	2018	56,23	CC
2	2019	59,18	CC
3	2020	58,30	CC
4	2021	57,69	CC
5	2022	60,91	B
6	2023	70,97	BB

Sumber: LHE Kemenpan Rb,2018- 2023

Berdasarkan data di atas capaian indeks reformasi birokrasi dengan predikat B diperoleh pada tahun 2022 dan BB Pada tahun 2023. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Serang menunjukkan peningkatan nilai dari tahun ketahun. Meskipun masih terdapat evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Serang, tujuan evaluasi ini untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kotab Serang.

Pada komponen pengungkit tahun 2022 mengalami perubahan komposisi yang di bagi ke dalam 3 bagian yaitu Pemenuhan, hasil antara area perubahan dan reform yang penjabarannya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.52
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2020-2022

No	Komponen Penilai	Bobot	Nilai		
			2020	2021	2022
I	**Komponen Pengungkit**				
1.	Pemenuhan	20	11,68	13,76	14,00
2.	Hasil Antara Perubahan	10	5,57	4,66	5,63
3.	Reform	30	8,87	10,89	11,63
Total Komponen Pengungkit (A)		**60**	**26,12**	**29,31**	**31,26**
II	**Komponen Hasil**				
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	6,82	6,87	7,13
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10	8,98	8,02	9,13
3.	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10	9,40	6,29	7,84
4.	Kinerja Organisasi	10	6,98	7,20	5,55
Total Komponen Hasil (B)		**40**	**32,18**	**28,38**	**29,65**
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		**100**	**58,30**	**57,69**	**60,91**
Kategori			**CC**	**CC**	**B**

Sumber : Hasil Penilaian KemenpanRB (Hasil olahan), 2023

Tabel 3.53
Hasil antara Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2020-2022

NO	HASIL ANTARA	SKALA	NILAI			SUMBER
			2020	2021	2022	
1	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	51 (Cukup)	28,08	53,91	ANRI
2	Merit System	0-400	138 (Buruk)	148	171,50	KASN
3	Profesionalitas ASN	0-100	70 (Rendah)	39,84	43,28	BKN
4	Maturitas SPIP	0-5	3 (Terdefinisi)	2,00	3,00	BPKP
5	Kapabilitas APIP	0-5	2 (*Infrastructure*)	3,00	3,00	BPKP
6	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan	0-100	78,35 (Zona Kuning)	63,31	79,24	Ombudsman RI
7	Indeks SPBE	1-5	-	2,97	2,49	Kementrian PANRB
8	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	-	34,29	29,50	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barjas Pemerintah RI
9	Indeks Pelayanan Publik	0-5	-	2,83	3,49	Kementrian PANRB
10	Reformasi Hukum	0-100	-	-	60,95	Kementrian hukum dan HAM

Sumber : Hasil Penilaian KemenpanRB (Hasil olahan), 2023

Pada tahun 2022 terdapat reformasi hukum dimana Kota Serang sudah meraih kategori Baik dengan nilai 60,95 point. Sehingga secara keseluruhan Pemerintah Kota Serang untuk reformasi birokrasi sudah mengalami peningkatan di berbagai sector. Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang oleh Kemenpan RB, indeks reformasi birokrasi Kota Serang untuk tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.54
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2017-2022

No	Komponen Penilai	Bobot	Nilai					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total Komponen Pengungkit (A)		60	28,67	28,88	29,74	26,12	29,31	31,26
Total Komponen Hasil (B)		40	27,98	27,35	29,40	32,18	28,38	29,65
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		**100**	**56,65**	**56,23**	**59,14**	**58,30**	**57,69**	**60,91**
Kategori			**CC**	**CC**	**CC**	**CC**	**CC**	**B**

Sumber : Hasil Penilaian KemenpanRB (Hasil olahan),2023

Berikut disampaikan penjelasan terkait komponen hasil yang djabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.55
Komponen Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2022

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber data
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	BPK
2	Nilai Sakip	0-100	55,33	59,04	Kementrian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	80,15	91,30	Kementrian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	62,88	78,39	Survey Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh KPK
5	Survey Internal Organisasi	0-100	73,71	74,87	SPI Internal oleh KPK

Sumber : Hasil Penilaian Evaluasi Kemenpan RB, 2021-2023

Tabel 3.56
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai diperoleh dari Evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB	Poin	61,55	70,97	115,30	Sangat tinggi

Sumber : Hasil Penilaian KemenpanRB (Hasil olahan), 2024

Berdasarkan tabel di atas dari target nilai 60,5 pada tahun 2023 tercapai 115,30% dengan realisasi 70,97 point, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Serang dalam mencapai angka tersebut sangat tinggi dengan kategori indeks RB tersebut sudah BB atau Baik namun masih banyak yang harus di perbaiki dalam tata kelola pemerintahan agar sesuai dengan tujuan dalam misi walikota terpilih.

Tabel 3.57
Realisasi dan Target Indeks Reformasi Birokrasi dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Sesudah
1	Indeks RB	Poin	56,23	59,14	58,3	57,69	60,91	70,97	80	61,55

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat indeks RB dari tahun 2021 sampai tahun 2023 terus mengalami kenaikan sebesar 70,97 walaupun terjadi penurunan kembali di tahun 2020 sebesar 58,30 dan di tahun 2021 sebesar 57,69. Target pencapaian nilai Indeks reformasi birokrasi pada akhir tahun masa jabatan walikota terpilih adalah 61,5 point dengan kategori Baik sedangkan pada tahun 2023 sudah tercapai sebesar 70,97 sehingga target tercapai sebesar 115,30%.

Pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 09 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara melakukan evaluasi implementasi reformasi birokrasi general dan tematik terhadap Pemerintah Kota Serang dan berikut hasilnya:

Tabel 3.58
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi General Tahun 2023
Pemerintah Kota Serang

NO	KOMPONEN	SUBKOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	INDEX	CATATAN	TIM PENILAI
1	RB GENERAL	Strategi Pelaksanaan Kebijakan RB	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2	2	1. Terdapat target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023) yang belum dikawal dalam target Kegiatan Utama Instansi Pemerintah; 2. Terdapat Sasaran Kegiatan Utama yang belum dikawal dengan Rencana Aksi secara relevan; 3. Masih terdapat Indikator Output atas Rencana Aksi yang belum cukup menggambarkan Sasaran	Tim Penilai Nasional
2			Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	94.76	4.42	-	Tim Penilai Nasional

NO	KOMPONEN	SUBKOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	INDEX	CATATAN	TIM PENILAI
3		Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi (%)	2	96,01	1,92	Baik	KEMENDAGRI
4			Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	4	1,6	segera melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP)	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana
5			Tingkat Maturitas SPIP	4	3,075	2,6	1. Terdapat satu sasaran program OPD belum relevan dengan sasaran strategis OPD pada Dinas Komunikasi dan Informatika. 2. Terdapat satu sasaran program OPD belum berorientasi pada hasil dan belum relevan dengan sasaran strategis OPD pada Dinas Lingkungan Hidup.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

NO	KOMPONEN	SUBKOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	INDEX	CATATAN	TIM PENILAI
							3. Terdapat beberapa sasaran kegiatan OPD belum berorientasi hasil, yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.	
							4. Terdapat ketidakcukupan indikator atas sasaran strategis Pemerintah Daerah	
							5. Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko belum memadai, karena belum ditunjang dengan program pelatihan/sertifikasi terkait manajemen risiko baiktahunan maupun lima tahunan untuk ditingkat UPR Strategis Pemda, UPR Strategis OPD dan UPR operasional OPD.	

NO	KOMPONEN	SUBKOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	INDEX	CATATAN	TIM PENILAI
							6. Belum terdapat anggaran di OPD terkait dengan penerapan MR	
							7. Peta risiko terkait anti korupsi belum dilaksanakan AOI APIP: 1. SDM APIP masih belum memenuhi kebutuhan ideal (formasi kebutuhan) 2. Alokasi anggaran pengawasan belum memenuhi ketentuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 3. APIP belum melakukan evaluasi atas implementasi MR hingga efektivitas RTP 4. Pengawasan yang dilakukan belum menyasar pada program strategis daerah dan belum dilaksanakan secara lintas sektoral 5. Perencanaan pengawasan belum sepenuhnya menggunakan hasil penilaian risiko dari manajemen 6. Rekomendasi atas hasil layanan jasa konsultansi APIP belum menghasilkan rencana aksi dan	

NO	KOMPONEN	SUBKOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	INDEX	CATATAN	TIM PENILAI
							perbaikan berkelanjutan bagi stakeholders. 7. Belum menerapkan QAIP secara optimal mulai dari tahapan persiapan sampai dengan tindaklanjut hasil QAPIP	
6			Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,5			Kurang	Kementerian PAN RB c.q. Deputi RB Kunwas
7			Nilai SAKIP	4	60,02	2,4	Pohon kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan.	Kementerian PAN RB c.q. Deputi RB Kunwas
							Masih terdapat ketidakselarasan antara dokumen Perjanjian Kinerja dan IKU, khususnya di PD cluster utama;	
							Pohon kinerja yang disusun juga belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan belum sepenuhnya teridentifikasi Critical	

NO	KOMPONEN	SUBKOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	INDEX	CATATAN	TIM PENILAI
							Success Factor (CSF) yang seharusnya dan logis menggambarkan hubungan sebab-akibat;	
							Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment kepada pegawai.	
							Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun Berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup	
8			Tingkat Implementasi inisiatif Strategi Arsitektur SPBE (Indeks SPBE)	2,5	1	0,5		Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem

NO	KOMPONEN	SUBKOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	INDEX	CATATAN	TIM PENILAI
								Pemerintahan Berbasis elektronik
9			Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	29,68	0,74	Penjelasan terkait hasil tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke ANRI c.q Pusat Akreditasi Kearsipan	Arsip Nasional Republik Indonesia
10			Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2,50	65,16 (2)	1,00	Belum Menyampaikan Renaksi, Waktu tindak lanjut masih lama,	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik
11			Indeks Kulaitas Kebijakan	2,50				Lembaga Administrasi Negara
12			Indeks Reformasi Hukum	2,5	56,43	1,41	Pelaksanaan Reformasi Hukum cukup	Kementerian Hukum dan HAM

NO	KOMPONEN	SUBKOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	INDEX	CATATAN	TIM PENILAI
13			Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	2,33	1,17	1. Penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Kota Serang masih berada pada predikat Cukup. 2. Penerapan Aspek Perencanaan Data khususnya terkait proses desain statistik dan penyiapan instrumen sudah dilakukan dan menerapkan standar yang baku untuk seluruh produsen data. 3. Penerapan Aspek Perencanaan Data terkait proses pendefinisian kebutuhan statistik sudah dilakukan namun belum dibuat standar dalam implementasinya untuk seluruh unit produsen data.	Badan Pusat Statistik
14			Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	46,48	1,16	Kurang	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
15				4	251	2,45	1) Menyelesaikan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan untuk	

NO	KOMPONEN	SUBKOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	INDEX	CATATAN	TIM PENILAI
			Indeks Sistem Merit Baik				Jabatan Pelaksana hingga ke tahap penetapan;	Komisi Aparatur Sipil Negara
							2) Melaksanakan asesmen kompetensi (baik manajerial, sosial kultural, hingga teknis) pegawai hingga ke seluruh pegawai;	
							3) Melaksanakan pemetaan talent pool dan rencana suksesi yang disertai dasar hukum serta konsep yang jelas mengenai penerapan manajemen talenta;	
							4) Menyusun dokumen identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai seperti HCDP berdasarkan hasil analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja;	
							5) Melaksanakan promosi dan mutasi di level Jabatan Administrasi dan Fungsional yang	

NO	KOMPONEN	SUBKOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	INDEX	CATATAN	TIM PENILAI
							berdasarkan atas hasil asesmen dan penilaian kinerja;	
							6) Mengidentifikasi pegawai dengan kinerja bermasalah dalam pemantauan kinerja, melakukan pembinaan bagi pegawai dengan kinerja bermasalah, serta membangun dan menerapkan mekanisme monitoring untuk memastikan dilaksanakannya tindak lanjut terhadap hasil pembinaan kinerja tersebut.	
16			Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	1,5	3,65	1,09		Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik
17			Tingkat Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan Publik (Ombudsman)	1,5	88,94	1,33		Ombudsman Republik Indonesia

NO	KOMPONEN	SUBKOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	INDEX	CATATAN	TIM PENILAI
18		Capaian Sasaran Strategis	Indeks SPBE	9	2,6	4,68		Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
19			Capaian Indikator Kinerja Utama	2	89	1,78		Tim Penilai Nasional
20			Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	89,78	4,31		Tim Penilai Nasional
21			Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (OPINI BPK)	5	5	5		Bada Pemeriksa Keuangan
22			Tindak Lanjut Rekomendasi	4	80,3	3,21		Bada Pemeriksa Keuangan
23			Nilai Employer Branding	4,00	62,50	2,50	Cukup Sehat	Kementerian PAN RB c.q. Deputi SDMA

NO	KOMPONEN	SUBKOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	INDEX	CATATAN	TIM PENILAI
			(BERAKHLAK) ASN					
24			Hasil SPI KPK (%)	10,00	70,25	7,03	Rentan	Komisi Pemberantasan Korupsi
25			Survey Kepuasan Masyarakat	8,00	78,61	6,29		Kementerian PANRB - Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat

Sumber : Hasil Penilaian Evaluasi KemenpanRB, 2024

Tabel 3.59
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023
Pemerintah Kota Serang

NO	KOMPONEN	SUBKOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	INDEX	CATATAN	TIM PENILAI
1	RB TEMATIK	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0,4	0,27	0,27	Terdapat indikator Sasaran yang belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup; Intervensi yang direncanakan dalam Rencana Aksi belum menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan; Rencana aksi yang disusun belum berupa intervensi terhadap prioritas permasalahan utama	Tim Penilai Nasional
2			Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0,4	0,30	0,30	Terdapat indikator Sasaran yang belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup	Tim Penilai Nasional

NO	KOMPONEN	SUBKOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	INDEX	CATATAN	TIM PENILAI
3			Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0,4	0,27	0,27	Terdapat indikator Sasaran yang belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup; Rencana aksi belum menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain; Intervensi berupa Rencana Aksi belum memuat penyelesaian permasalahan stunting pada tematik "digitalisasi administrasi pemerintahan pada penanganan stunting".	Tim Penilai Nasional
4			Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0,4	0,40	0,40		Tim Penilai Nasional

NO	KOMPONEN	SUBKOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	INDEX	CATATAN	TIM PENILAI
5			Pengendalian Inflasi (Rencana Aksi)	0,4	0,27	0,27	Perumusan indikator belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup; Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah; Aspek perbaikan tata kelola belum menjadi intervensi berupa Rencana Aksi, seperti dalam hal perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.	Tim Penilai Nasional
6			Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0,6	86,12	0,35		Tim Penilai Nasional
7			Realisasi Investasi (Capaian Output)	0,6	99,52	0,45		Tim Penilai Nasional

NO	KOMPONEN	SUBKOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	INDEX	CATATAN	TIM PENILAI
8			Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0.6	28,62	0,12		Tim Penilai Nasional
9			Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0,6	37,06	0,22		Tim Penilai Nasional
10			Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	0,6	46,94	0,19		Tim Penilai Nasional
11		Capaian Indikator Dampak RB	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1,50	1,50		Tim Penilai Nasional
12			Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1,5	1,50		Tim Penilai Nasional
13			Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	3	0,56	0,56		Tim Penilai Nasional

NO	KOMPONEN	SUBKOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	INDEX	CATATAN	TIM PENILAI
			Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)					
14			Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	1,47	1,47		Tim Penilai Nasional
15			Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	2,65	2,65		Tim Penilai Nasional

Sumber : Hasil Penilaian Evaluasi KemenpanRB, 2024

a. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pelayanan Perijinan SIMANTAP

Pelayanan di RSUD Kota Serang

Gambar 3.27 Upaya Pemerintah Kota Serang Dalam Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik

Berdasarkan tabel di bawah ini dari empat indikator tersebut pada tahun 2023 semua capaiannya kategori ***Sangat Tinggi*** dengan rata-rata kinerja 99,00%. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh Bappeda Kota Serang sedangkan Hasil LPPD dan Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan nilai hasil evaluasi tahun 2022 yang keluar pada bulan April tahun 2023 sedangkan untuk hasil evaluasi Tahun 2023 belum keluar hasil penilaiannya dari instansi yang bertanggung jawab dalam evaluasi.

Tabel 3.60

Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	$\frac{Total\ nilai\ per\ unsur}{Total\ unsur\ yang\ dinilai} x\ Nilai\ Penimbang$	Poin	81	82,29	101,59	Sangat Tinggi
2	Nilai LPPD Kota	Hasil Evaluasi atas nilai LPPD oleh Kemendagri	Poin	3,460	3,4302*	99,14	Sangat tingi
3	Hasil Evaluasi AKIP	Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP oleh KemenpanRB	Poin	63	60,02	95,27	Sangat Tinggi
4	Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP*	100	Sangat Tinggi

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
	Rata-rata Capaian Kinerja					**99,00**	**Sangat Tinggi**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Serang (Hasil Olahan, 2024)

Tabel 3.61
Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Perubahan RPJMD 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Sesudah
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	72,00	77,80	77,74	77,68	78,61	82,29	81,00	81,00
2	Nilai LPPD Kota	Poin	3.2346	3.4365	3.4426	3.4365	3.4302	3.4302*	Sangat Tinggi	3.4600
3	Hasil Evaluasi AKIP	Poin	52,31	54,64	55,33	58,68	59,04	60,02	BB	63,00
4	Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP *	WTP	WTP

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023

Tabel 3.62
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2023 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2023	
				Realisasi	%
1.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	81	82,29	101,59
2.	Nilai LPPD Kota	point	3,4600	3,4302*	99,14
3.	Hasil Evaluasi AKIP	point	63,00	60,02	95,27
4.	Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP	WTP	100
Rata-rata terhadap RPJMD					**99,00**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Serang (Hasil olahan), 2024

Berdasarkan tabel di atas capaian realisasi kinerja tahun 2023 terhadap kondisi akhir RPJMD dari empat komponen indikator kinerja sasaran di atas mencapai rata-rata 99,00%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi capaian sudah tercapai di akhir masa jabatan Walikota terpilih.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah, disusunlah proses bisnis yang berisi uraian proses utama, pendukung dan manajemen. Berikut disajikan bagan proses bisnis pada sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berserta intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang.

Gambar 3.28 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun, selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta penanggung jawab. Berikut disajikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran daerah beserta perangkat daerah pengampu.

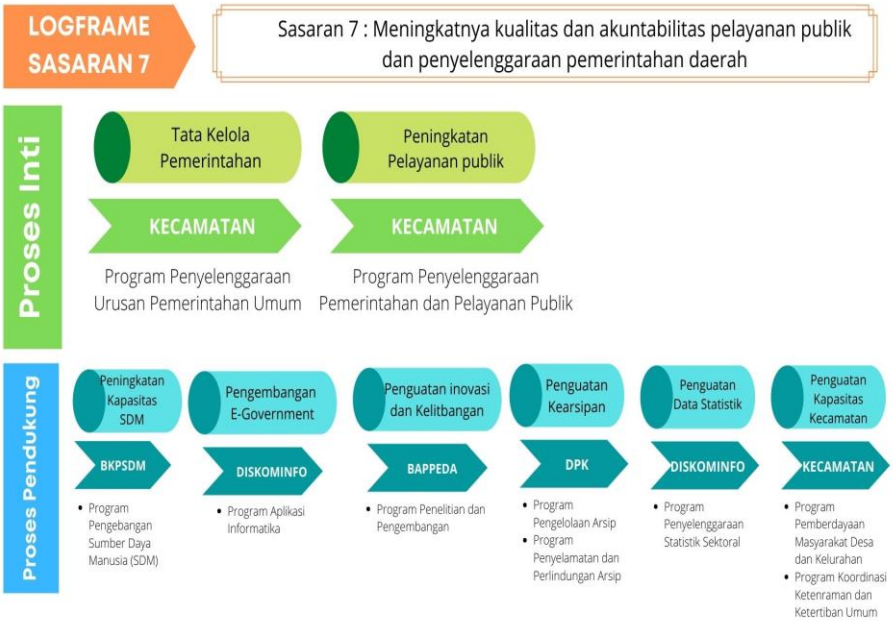

Sumber : Bappeda Kota Serang, 2021

Gambar 3.29 Logical Frame Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Serang pada tahun 2023 dilakukan terhadap 29 (duapuluh sembilan) unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Seperti survei tahun 2022, pelaksanaan survei tahun 2023 dilaksanakan dengan intensitas 4 (empat) kali dalam satu tahun (triwulanan). Laporan ini merupakan Laporan Akhir Tahun yang memuat data empat periode survei dimaksud. Adapun unit penyelenggara pelayanan publik yang menjadi obyek survei adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 16 (enambelas) PKM yang tersebar di 6 (enam) kecamatan di Kota Serang; RSUD Kota Serang, Labkesda, serta Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang tersebar di 6 (enam) kecamatan di wilayah Kota Serang.

Berikut ini disajikan perbandingan capaian indeks kepuasan masyarakat berdasarkan unsurnya sebagaimana dijelaskan di atas, secara grafis dapat dilihat pada grafik IKM Kota Serang berdasarkan unsur berikut ini.

Tabel 3.63
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,0000 – 2,5996	20,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,6000 – 3,0640	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,5320	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,0000	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

Tabel 3.64
Capaian Pengukuran Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kinerja Pelayanan
1.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	$\frac{Total\ nilai\ per\ unsur}{Total\ unsur\ yang\ dinilai} x\ Nilai\ Penimbang$	Poin	81	82,29	101,59	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kota Serang, 2024

Berdasarkan pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap seluruh unit penyelenggara pelayanan publik yang menjadi obyek survei ini, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Serang secara agregat pada triwulan I-IV mengalami trend kenaikan dari sebesar 80,80 pada triwulan I menjadi 82,29 pada triwulan IV. Trend kenaikan ini menjadi indikasi fase recovery pelayanan publik pasca situasi pandemi, meskipun secara kualitatif masih ber status quo pada kategori mutu pelayanan B. Kenaikan yang cukup signifikan ini teridentifikasi berkaitan erat dengan mulai pulihnya situasi pasca pandemi yang terjadi sejak awal tahun 2020-2021. Bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Serang sudah mulai kembali normal dan berjalan seperti biasa, apalagi setelah pandemi Covid 19 secara resmi dicabut oleh pemerintah.

Pada triwulan keempat, seluruh unsur yang dinilai (10 unsur), telah mencapai kualifikasi baik atau memuaskan atau mutu pelayanan B karena berada dalam rentang indeks antara 76,61 hingga 88,30; namun belum ada satu pun unsur yang mencapai kualifikasi A dengan indeks lebih dari 88,30. Meski secara umum telah terkategori baik, namun masih terdapat 5 (lima) unsur yang memiliki kinerja di bawah indeks agregat kota, yaitu waktu pelayanan, unsur kompetensi petugas pelayanan, unsur maklumat pelayanan, unsur pengelolaan pengaduan, serta unsur Sarana dan prasarana pelayanan. Sehingga perlu mendapat perhatian serius untuk ditingkatkan kinerjanya khususnya pada kelima unsur tersebut.

Berikut ini disajikan perbandingan capaian indeks kepuasan masyarakat berdasarkan unsurnya sebagaimana dijelaskan di atas, secara grafis dapat dilihat pada grafik IKM Kota Serang berdasarkan unsur berikut ini.

Grafik 3.19

IKM Kota Serang Berdasar Unsur Triwulan I-1V Tahun 2023

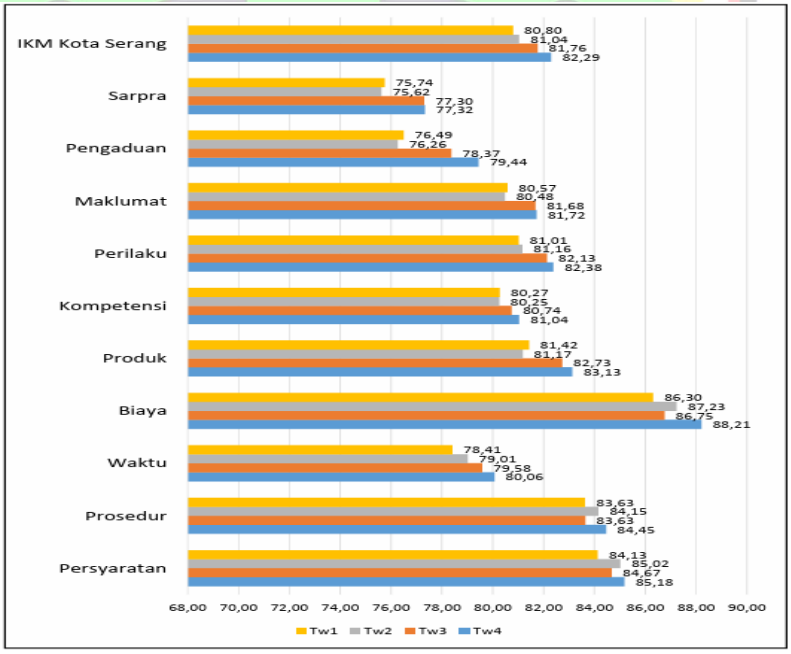

Sumber : Bappeda Kota Serang, 2024

Tak seperti temuan pada tahun sebelumnya dimana IKM Kota Serang banyak dikontribusi oleh unsur maklumat pelayanan dan pengelolaan pengaduan, pada tahun 2023 IKM Kota secara merata dikontribusi oleh hampir seluruh unsur yang cenderung meningkat meski tak signifikan, baik

kenaikan antar unsur maupun pada unsur itu sendiri. Jarak waktu pengambilan data yang relatif berdekatan merupakan faktor yang teridentifikasi menjadi penyebabnya, sehingga data pada masing-masing triwulan cenderung menggambarkan kondisi yang relatif ajeg. Gambaran tentang informasi di atas dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.20

Capaian IKM Kota Serang Tahun 2018-Triwulan IV 2023

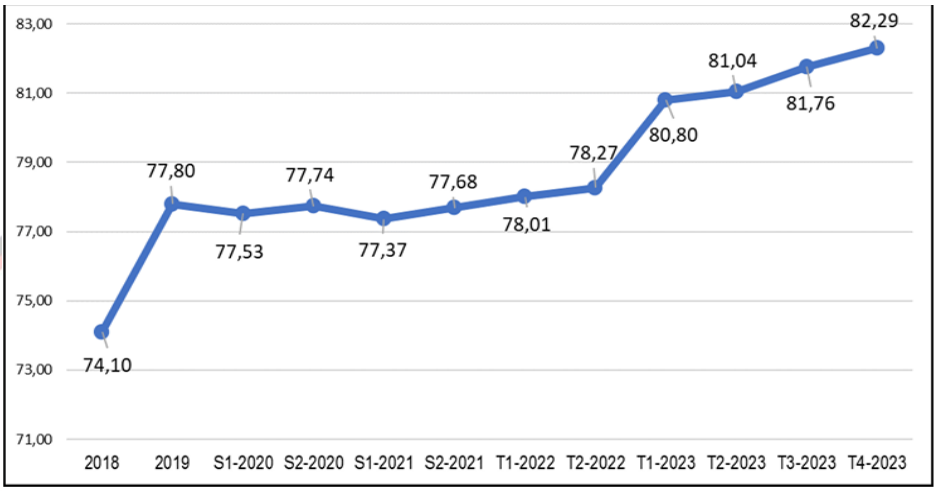

Sumber : Bappeda Kota Serang Tahun 2024

Grafik di atas menggambarkan dinamika perkembangan capaian indeks kepuasan masyarakat pada level Kota Serang sejak tahun 2018 hingga 2023, yang secara umum menggambarkan trend yang positif, meski sempat terkoreksi karena dampak pandemi yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Meski demikian, penurunan ini diyakini masih dalam taraf wajar karena 2 (dua) hal, pertama mengingat penurunannya yang tidak signifikan. Dan kedua karena penyebab penurunannya teridentifikasi secara cermat, yaitu unsur-unsur kepuasan masyarakat yang secara teknis dapat diupayakan solusinya guna memperbaiki kondisi ini pada tahun berikutnya. Hasilnya, temuan pada Triwulan I-IV Tahun 2023 terbukti mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan.

Gambaran tentang kecenderungan penurunan IKM Kota Serang pada seluruh obyek survei dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.21

Perbandingan Capaian IKM Kota Serang Berdasar Unit Layanan Tahun 2023

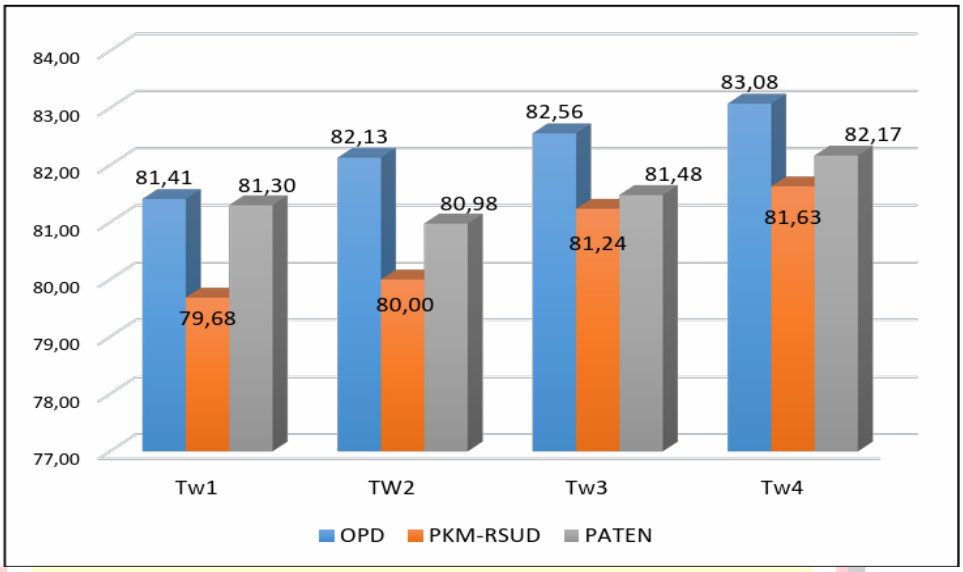

Sumber : Bappeda Kota Serang, 2024

Grafik di atas menginformasikan dinamika capaian IKM dari setiap unit penyelenggara pelayanan tahun 2023, yang secara umum menggambarkan IKM Kota Serang maupun IKM unit pelayanan yang disurvei mengalami trend recovery dengan tingkat signifikansi yang berbeda-beda.

Secara umum profil kenaikan maupun penurunan pada triwulan I-IV 2023 tidak jauh berbeda dengan temuan survei pada periode sebelumnya, mengingat jarak waktu antarsurvei yang relatif berdekatan. Demikian pula dengan sejumlah trend kenaikan maupun penurunan pada tiap-tiap unit layanan yang tak terlalu signifikan, yang juga diidentifikasi karena faktor waktu pelaksanaan survei yang berdekatan tersebut. Secara umum, sebagaimana temuan pada tahun sebelumnya, diskrepansi capaian IKM yang cukup nyata antar unit pelayanan masih menggambarkan belum terinternalisasinya standar pelayanan publik di masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Serang.

Demikian pula dengan fluktuasi capaian IKM pada masing-masing unit yang menggambarkan belum well established-nya mutu dan kinerja pelayanan publik di Kota Serang. Demikian pula dalam konteks indikator kompositnya, dimana teridentifikasi bahwa 31,25% indikator kepuasan

pelayanan di Kota Serang masih berkinerja di bawah rerata, yaitu IKM Kota Serang sebesar 82,29 yang digunakan sebagai threshold dalam menjustifikasi kinerja kepuasan masyarakat. Demikian pula dalam konteks mutu pelayanan, 12% indikator masih terkategori C; dan 87% lainnya telah terkategori B, dan baru 1% yang mencapai kategori mutu pelayanan A.

Trend recovery IKM pada level kota maupun unit-unit penyelenggara pelayanan publik di tahun 2023 ini, diyakini akan berlanjut seiring dengan mulai terbiasanya masyarakat dengan berbagai aturan pembatasan sosial dalam pelayanan publik, meski implikasi dari situasi pandemi tersebut kemungkinan masih akan terasa dampaknya sehingga kenaikan IKM diprediksi tidak akan begitu signifikan, terutama bila tidak didukung dengan inovasi pelayanan publik yang signifikan. Inovasi dimaksud harus mampu menyasar pada aspek-aspek yang terdampak oleh penerapan protokol kesehatan yang secara nyata berdampak pada kapasitas layanan, seperti: jumlah antrian yang menjadi terbatas karena pengaturan jarak, demikian pula dengan ruang tunggu pelayanan yang kapasitasnya dikurangi karena pengaturan jarak, pengaturan waktu kerja pegawai antara pegawai yang bekerja dari kantor (work from office) dan bekerja dari rumah (work from home), dan lain-lain, sehingga kapasitas dan mutu layanan dapat dinormalisasi. Penyesuaian terhadap persyaratan dan prosedur pelayanan, serta pemanfaatan beragam alat, aplikasi, dan sejenisnya dapat menjadi terobosan guna mewujudkan normalisasi dimaksud.

Berdasarkan tabel di atas teridentifikasi bahwa sebanyak 1 indikator telah mencapai mutu A, sebanyak 26 indikator atau 83,87% indikator kepuasan pelayanan di Kota Serang telah mencapai mutu B, meski masih terdapat sekira 12,90% indikator yang bermutu C. Meski demikian 38,71% indikatornya telah mencapai indeks di atas rerata indeks agregat di tingkat Kota sebesar 82,29% atau sebanyak 12 indikator sedangkan 19 dari 31 indikator yang capaiannya masih di bawah rerata atau 61,29%.

Tabel berikut menggambarkan IKM Kota Serang berdasarkan indikator komposit:

Tabel 3.65
IKM Kota Serang Berdasar Indikator Komposit
Triwulan I-IV Tahun 2023

No	Indikator	T-1	T-2	T-3	T-4	Keterangan	
1	Kemudahan Persyaratan	83,26	83,78	84,86	85,05	B	Di atas rerata
2	Kemudahan Prosedur	82,57	83,09	84,17	84,36	B	Di atas rerata
3	Ketepatan Waktu Buka Pelayanan	79,40	79,92	81,00	82,29	B	Di atas rerata
4	Kesesuaian Waktu Istirahat	76,20	76,72	77,80	77,99	B	Di bawah rerata
5	Kesesuaian Waktu Tutup	78,33	78,85	79,93	80,12	B	Di bawah rerata
6	Kewajaran Lama WT Pelayanan	78,06	78,58	79,66	79,85	B	Di bawah rerata
7	Kewajaran Biaya	86,18	86,70	87,78	88,97	A	Di atas rerata
8	Bebas Pungli	85,24	85,76	86,84	87,73	B	Di atas rerata
9	Produk Sesuai Harapan	80,75	81,27	82,35	82,54	B	Di atas rerata
10	Angka Komplain	80,75	81,22	82,30	82,49	B	Di atas rerata
11	Keterampilan Petugas	80,46	80,98	82,06	82,25	B	Di atas rerata
12	Kemampuan Kominfo	78,85	79,37	80,45	81,64	B	Di bawah rerata
13	Pengalaman Petugas	79,11	79,63	80,71	81,90	B	Di bawah rerata
14	Responsivitas Petugas	76,81	77,33	78,41	78,60	B	Di bawah rerata
15	Non Diskriminatif	82,15	82,67	83,75	83,94	B	Di atas rerata
16	Kesantunan	80,50	81,02	82,10	82,29	B	Di atas rerata
17	Keramahan	78,70	79,22	80,30	80,49	B	Di bawah rerata
18	Maklumat Pelayanan	81,02	81,54	82,62	82,81	B	Di atas rerata
19	Integritas Maklumat Pelayanan	77,62	78,14	79,22	80,41	B	Di bawah rerata
20	Ketersediaan Sarana Pengaduan	79,20	79,72	80,80	80,99	B	Di bawah rerata
21	Respon Sesuai Harapan	73,82	74,34	75,42	78,61	B	Di bawah rerata
22	Kebersihan Lingkungan	75,89	76,41	77,49	78,68	B	Di bawah rerata
23	Kenyamanan Ruang Pelayanan	75,47	75,99	77,07	77,26	B	Di bawah rerata
24	Kebersihan Toilet Umum	72,90	73,42	74,50	75,69	C	Di bawah rerata
25	Ketersediaan APAR	72,42	72,94	74,02	77,21	B	Di bawah rerata
26	Efektivitas Larangan Merokok	70,83	71,35	72,43	75,62	C	Di bawah rerata
27	Sarpra Tdk Membahayakan	78,04	79,83	80,82	79,83	B	Di bawah rerata
28	Keamanan	84,10	84,62	85,70	85,89	B	Di atas rerata
29	Sarpra Afirmasi	73,70	74,22	75,30	75,49	C	Di bawah rerata
30	Rambu-rambu Mitigasi Bencana	70,37	70,89	71,97	75,16	C	Di bawah rerata
31	Ketersediaan Pelayanan Online	75,27	75,79	76,87	77,06	B	Di bawah rerata

Sumber : Bappeda Kota Serang, 2024

2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tabel 3.66
Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kota Serang Tahun 2016-2022

No	Tahun	Skor	Status	Urutan Nasional
1.	2016	2,7345	Tinggi	72
2.	2017	2,9606	Tinggi	70
3.	2018	3,2346	Sangat Tinggi	45
4.	2019	3,4365	Sangat Tinggi	-
5.	2020	3,4426	Sangat Tinggi	-
6	2021	3.4365	Sangat Tinggi	-
7	2022	3.4302	Sangat Tinggi	7

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Serang, 2023

Nilai LPPD Kota Serang pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebesar 3,4302 dengan kategori Sangat Tinggi, capaian tersebut sesuai target yang ditetapkan yaitu Sangat Tinggi atau capaian kinerja sebesar 99,14% dengan kategori ***Sangat Tinggi***. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang mencapai nilai sebesar 3,4365. Berdasarkan tabel diatas Pemerintah Kota Serang selalu meningkat dalam urutan secara nasional yang pada tahun 2022 menempati urutan ke tujuh secara nasional. Hal ini menjadi prestasi yang membanggakan dikarenakan penyajian data dukung LPPD yang semakin baik dan lengkap untuk penilaian tahun 2022 sedangkan hasil evaluasi LPPD Kota Serang belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai LPPD antara lain mendorong OPD untuk memenuhi indikator kinerja kunci dengan akurat dan tepat serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian Dalam Negeri Republik

Indonesia, sehingga mudah-mudahan perolehan nilai LPPD Kota Serang Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 yang akan diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

3. Hasil Evaluasi AKIP

Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Serang tahun 2023 adalah 60,02 atau kategori "B" dan sudah memenuhi target yang dicanangkan di tahun 2023. Atas capaian tersebut maka kinerja akuntabilitas Kota Serang berdasarkan target tahun 2023 baru mencapai 95,27%. Capaian nilai hasil 3evaluasi AKIP Kota Serang tahun 2017 s.d. 2023 sebagai berikut:

Grafik 3.22
Capaian Nilai AKIP Kota Serang Tahun 2017 – 2023

Sumber : Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Serang, 2024

Untuk melihat perkembangan capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Serang sejak tahun 2017-2021 meliputi meliputi 5 komponen AKIP sedangkan pada tahun 2022-2023 meliputi 4 komponen sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.67
Hasil Evaluasi AKIP Kota Serang 2017 – 2023

Komponen	Bobot	2017	2018	Bobot	2019	2020	2021	Bobot	2022	2023	Capaian %
Perencanaan Kinerja	**35**	15,83	16,42	**30**	17,61	18,20	19,10	**30**	21,75	22,08	73,6
Pengukuran Kinerja	**20**	12,13	12,16	**25**	12,80	12,82	13,72	**30**	13,69	13,82	46,07
Pelaporan Kinerja	**15**	9,24	9,29	**15**	9,31	9,33	9,86	**15**	9,90	10,17	67,80

Komponen	Bobot	2017	2018	Bobot	2019	2020	2021	Bobot	2022	2023	Capaian %
Evaluasi Kinerja	**10**	4,22	4,23	**10**	4,58	4,58	5,31	**25**	13,70	13,92	55,68
Capaian Kinerja	**20**	9,44	10,21	**20**	10,34	10.40	10,69	-	-	-	-
Total	**100**	**50,85**	**52,31**	**100**	**54,64**	**55,33**	**58,68**	**100**	**59,04**	**60,02**	**100**
Kategori		**CC**	**CC**		**CC**	**CC**	**CC**		**CC**	**B**	

Sumber : LHE KemenpanRB, 2018-2024

Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa secara umum terdapat peningkatan dari tahun 2017-2023 dari semua komponen penilaian SAKIP. Komponen pengukuran kinerja menempati posisi kinerja terendah sebesar 46,07% dan kinerja tertinggi pada komponen perencanaan kinerja sebesar 73,60%.

Capaian tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,98 point dari capaian tahun 2022 yang sebesar 59,04 dengan kategori CC. Capaian tersebut karena belum maksimalnya komitmen Pimpinan Daerah dan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Serang, sehingga hasil evaluasi AKIP Kota Serang tahun 2023 belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor penghambat mengenai implementasi AKIP antara lain:

1. Masih terdapat dalam dokumen perencanaan rumusan sasaran strategis pada perangkat daerah belum berorientasi pada hasil dan sesuai levelnya;
2. Indikator kinerja belum SMART;
3. Masih terdapat ketidakselarasan antara dokumen perjanjian kinerja dan IKU;
4. Penyusunan pohon kinerja belum sesuai dengan Permenpan RB No. 89 Tahun 2023;
5. Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit di bawahnya;
6. Belum adanya reward dan punishment sebagai implementasi keberhasilan capaian kinerja;

7. Hasil evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat belum memberikan dampak yang signifikan dalam perbaikan akuntabilitas kinerja;
8. Laporan hasil evaluasi internal belum memberikan informasi yang mendalam terhadap kualitas implementasi AKIP

Grafik 3.23
Capaian Nilai AKIP Kota Serang Berdasarkan Komponen
Tahun 2017 – 2023

Sumber : LHE KemenpanRB, 2018-2024

Beberapa faktor pendorong mengenai implementasi AKIP antara lain:

1. Pimpinan sudah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintah melalui implementasi AKIP yang berdampak;
2. Perbaikan indikator kinerja sudah dilakukan dalam penyusunan RPD Kota Serang Tahun 2024-2026;
3. Melakukan pendampingan dan pembinaan ke seluruh perangkat daerah dalam menyusun logical frame work
4. Berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh perangkat daerah meso yang termasuk dalam tim SAKIP Tingkat Kota Serang;
5. Masih terdapat dalam dokumen perencanaan rumusan sasaran strategis pada perangkat daerah belum berorientasi pada hasil dan sesuai levelnya;
6. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit di bawahnya dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan;

Tabel 3.68
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP

No	Rekomendasi LHE 2022	Tindak Lanjut
A	**PERENCANAAN**	
	Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan, agar tujuan/sasaran strategis di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah berorientasi pada hasil dan memastikan kecukupan indikator dalam mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut	Dilakukan Reviu pada proses Perencanaan dan telah dilakukan perbaikan terhadap indikator tujuan /sasaran strategis pada level pemerintah daerah pada penyusunan RPD Tahun 2024-2026 (Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2023 tentang RPD Kota Serang Tahun 2024-2026)
	Melakukan reviu kembali terhadap penetapan target yang diperjanjikan tiap tahunnya yang selaras dengan hasil capaian sehingga mampu menggambarkan kinerja yang ingin dicapai;	Perjanjian Kinerja (PK) sudah dibuat oleh perangkat daerah dari level pimpinan OPD dan seluruh pegawai
	Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke Ievel operasional dengan memerhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi	Melakukan pendampingan terkait penyusunan penjenjangan kinerja yang memperhatikan Logical Framework dengan Implementasi aplikasi E- Kinerja
B	**PENGUKURAN KINERJA**	

No	Rekomendasi LHE 2022	Tindak Lanjut
	Menyusun Kebijakan/SOP terkait Perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan data kinerja di Pemerintah Kota Serang	Evaluasi dan atau Penyusunan SOP Perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan data kinerja pada PD dan Pemerintah Kota Serang
	Membangun aplikasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk mempermudah dan mengefektifkan proses pemantauan progres capaian kinerja level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah	Optimalisasi aplikasi SIMAK dalam mengukur kinerja PD dan Pemerintah Kota Serang
	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja dan realisasi di tingkat Perangkat Daerah beserta rencana aksinya, sehingga dapat diketahui tingkat ketercapaian dan efektivitas strategi yang digunakan;	Monev Laporan Kinerja dilakukan perbulan dengan memberikan laporan pengukuran kinerja yang diinput ke aplikasi SIMAK
	Menerapkan kebijakan reward and punishment dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi dengan kinerja masing-masing individu	Membuat kebijakan melalui Surat Keputusan Walikota No. 060.kep. 218-Huk. 2023 tentang Pemberian Reward dan Punishment atas pencapaian knerja pernagkat daerah melalui evaluasi SAKIP Kota Serang
C	**PELAPORAN KINERJA**	
	Memastikan Laporan Kinerja dipublikasikan melalui website resmi Pemerintah Kota Serang	Publikasi LKJIP Pemerintah Kota Serang dan PD Ke website resmi go.id

No	Rekomendasi LHE 2022	Tindak Lanjut
	Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja terutama di level Perangkat Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, yang menjelaskan tentang capaian kinerja yang diperjanjikan dan memuat analisis terkait pencapaian kinerja	Menyusun Peraturan Walikota No. 74 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Lingkup Pemerintah Kota Serang
	Menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya	Monev Penyelesaian Rekomendasi hasil LHE dari Inspektorat
D	**EVALUASI KINERJA**	
	Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah disesuaikan dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021	Menetapkan Peraturan Walikota No. 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Serang
	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan	Pelaksanaan evaluasi SAKIP OPD dan Pembinaan SDM evaluator Sakip dan melakukan Sosialisasi Pedoman Evaluasi Sakip kepada Evaluator serta Monev Tindak Lanjut LHE Sakip kepada PD

No	Rekomendasi LHE 2022	Tindak Lanjut
	Mendorong Perangkat Daerah untuk dapat secara aktif melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal	Menetapkan Peraturan Walikota No. 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat daerah Lingkup Pemerintah Kota Serang
	Mendorong upaya montoring dan evaluasi secara berkala untuk dapat dijadikan dasar pemberian rewards dan punishment di internal Perangkat Daerah	Monev Rekom LHE dan Kebijakan Reward dan Punishmanet di PD

4. Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Dalam kaitannya dengan target terhadap opini Pemerintah Kota Serang dalam kaitannya dengan audit LKPD Kota Serang Tahun 2022 yang diberikan oleh BPK-RI pada Tahun 2023, menargetkan masih mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dikarenakan Pemerintah Kota Serang masih terus mengupayakan berbagai hal dalam upaya mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada Tahun 2023.

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten Nomor: 88b/S/XVIII.SRG/05/2023 perihal: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun Tanggal 26 Mei 2023, maka hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada Tahun 2023 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang masih dalam proses audit BPK.

Pencapaian opini WTP tersebut tidak lepas dari hasil kerjasama semua *stakeholder* dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat unit kerja, Perangkat Daerah hingga proses konsolidasi di tingkat Kota Serang oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang.

Pencapaian Target pada tahun 2022 ini merupakan target tahun ketiga dari RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu :

Tabel 3.69
Capaian dan Target Indikator Sasaran Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Perubahan RPJMD 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja				Target Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat Kota Serang, 2021

Beberapa faktor Pendorong dalam pencapaian target kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain:

1. Komitmen pimpinan dalam melakukan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
2. Implementasi SIMRAL dan SIPD sebagai instrumen aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
3. Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung penyusunan laporan daerah dengan menetapkan Peraturan Walikota Serang tanggal 28 Desember 2020 Nomor 57 Tahun 2020 Berita Daerah Nomor 57 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2020 tentang pedoman rekonsiliasi dan transaksi realisasi anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan;
4. Dukungan kualitas SDM pengelola keuangan dan asset daerah 32 Perangkat Daerah dan 1 SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kota Serang dalam menyediakan data laporan daerah yang dilakukan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Penetapan perda dan perwal APBD dilakukan secara tepat waktu sebagai tindak lanjut dari Evaluasi perda dan perwal tahun 2023 Kota Serang
6. Penyusunan dokumen SPJ yang sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu Dokumen Pertanggungjawaban yang disampaikan telah diverifikasi sesuai dengan Sistem dan Prosedur (Sisdur) dan tepat waktu sudah mencapai 100%.
7. Kesesuaian pencatatan antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan capaian kinerja laporan keuangan :

1. Melakukan Koordinasi antar OPD dan Stekholder secara berkala sehingga tersedianya data yang diperlukan dalam penyusunan/pendataan.
2. Melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang tata cara penyusunan laporan keuangan daerah bagi para ASN di Kota Serang;

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk OPD dalam Pelaksanaan Penatausahaan dengan Sistem yang tersedia saat Ini yaitu SIPERA (Sistem Informasi Perbendaharaan), yang memudahkan untuk merekap pengeluran Belanja.
4. Melakukan Rekonsilisasi secara berkala antar bidang agar memudahkan dalam proses penyusunan LKPD di tahun berjalan.
5. Melakukan inventarisir barang dimasukkan ke dalam ATISISBADA dan SIAP Barang serta di audit oleh BPK.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun 2023 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.614.656.217.614,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.508.593.945.639,- yang terdiri dari Belanja Operasi ditargetkan sebesar Rp. 1.365.179.412.874 dengan realisasi sebesar Rp. 1.287.454.147.324,00 atau 94,31% dan Belanja Modal sebesar Rp. 248.070.817.669,00 dengan realisasi sebesar Rp. 219.848.431.315,00 atau 88,62% serta Belanja tidak terduga sebesar Rp. 1.405.987.071,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.291.367.000,00 atau 91,85%.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja Perubahan RPJMD Kota Serang yang diperjanjikan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.614.656.217.614,- Realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kota Serang tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.508.593.945.639,- atau 93,43%, dapat dilihat pada tabel 3.70.

Tabel 3.70
Komposisi Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2023
(Anaudited)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	1.365.179.412.874	1.287.454.147.324,00	94,31
2.	Belanja Modal	248.070.817.669	219.848.431.315,00	88,62
3.	Belanja Tak Terduga	1.405.987.071	1.291.367.000,00	91,85
Jumlah		**1.614.656.217.614**	**1.508.593.945.639,00**	**93,43**

Sumber : BPKAD Kota Serang, 2024

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Dari tabel 3.71 berikut analisis efisiensi terhadap sasaran yang sudah mencapai target:

1. Sasaran strategis meningkatnya derajat pendidikan masyarakat memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 99,38%, dan realisasi anggarannya mencapai 90,07%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 9,37%.
2. Sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat memiliki capaian kinerja sebesar 100,66%, dan realisasi anggarannya mencapai 88,96%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 18,88%.
3. Sasaran strategis meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah memiliki capaian kinerja sebesar 98,61% dan realisasi anggarannya mencapai 96,32%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 2,32%.
4. Sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan indikator Penanganan penanganan timbunan sampah memiliki capaian kinerja sebesar 85,19%, dan realisasi anggarannya mencapai 95,93%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya efisiensi sebesar -12,61%.
5. Sasaran strategis meningkatnya pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau (RTH) dengan indikator ketersediaan RTH memiliki capaian kinerja sebesar 74,81%, dan realisasi anggarannya mencapai 94,43%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya tidak efisiensi sebesar -26,22%.
6. Sasaran strategis menurunnya resiko bencana dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana memiliki capaian kinerja sebesar 59,88%, dan realisasi anggarannya mencapai 95,69%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya kurang efisiensi sebesar -59,80%.
7. Sasaran strategis meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 109,63%, dan realisasi anggarannya mencapai 96,66%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya tidak efisiensi sebesar 11,82%.
8. Sasaran strategis meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 99,00%, dan realisasi anggarannya mencapai 93,35%. Hal ini menunjukkan terdapat adanya efisiensi sebesar 5,71%.

Berdasarkan tabel 3.65 tersebut pula dapat dilihat capaian rata-rata kinerja untuk sasaran strategis sebesar 99,47% dengan realisasi anggaran secara keseluruhan sebesar 93,43%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar -6,07% disebabkan karena ada beberapa capaian indikator yang tidak tercapai seperti:

a. Jumlah penanganan timbunan sampah tidak tercapai secara maksimal hal ini disebabkan karena jumlah timbunan sampah yang ada tidak bisa tertangani secara keseluruhan karena kurangnya armada pengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah akhir.
b. Ketersediaan RTH realisasi kinerjanya tidak tercapai begitu pula dengan realisasi anggarannya.
c. Indeks resiko bencana juga tidak tercapai hal ini disebabkan Kota Serang masih dalam kategori tinggi terhadap terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam.

Efisiensi anggaran diperoleh dari sisa anggaran lelang, penyesuaian kebutuhan anggaran aparatur yang bersifat rutin maupun anggaran antisipasi seperti perjalanan dinas, bahan bakar kendaraan serta alat tulis kantor.

Tabel 3.71
Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Serang
Per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGSI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		KRITERIA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TAHUN 2023		ANALISIS EFISIENSI	KETERANGAN
						Realisasi	%			Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	18	19	20	21
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,09	76,43	104,57	Sangat tinggi	**255.995.409.951**	**229.600.862.937**	**89,69**	**14,23**	**EFISIENSI**
		Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,91	8,91	100,00	Sangat tinggi	**167.536.376.447**	**150.906.896.588**	**90,07**	**9,37**	**EFISIENSI**
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,98	12,82	98,77	Sangat tinggi					**EFISIENSI**
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,51	75,13	109,66	Sangat tinggi	**88.459.033.504**	**78.693.966.349**	**88,96**	**18,88**	**EFISIENSI**
2	Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah	Poin	70,00	71,78	102,54	Sangat tinggi	**284.001.613.038**	**273.561.973.005**	**96,32**	**6,06**	**EFISIENSI**
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	%	77,14	76,07	98,61	Sangat tinggi	**284.001.613.038**	**273.561.973.005**	**96,32**	**2,32**	**EFISIENSI**
3	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	47,79	50,61	105,90	Sangat tinggi	**59.795.767.240**	**57.193.204.106**	**95,65**	**9,68**	**EFISIENSI**
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Penanganan Timbunan Sampah	%	80,00	68,15	85,19	Tinggi	**44.845.760.590**	**43.020.554.350**	**95,93**	**-12,61**	**EFISIENSI**

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGSI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		KRITERIA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TAHUN 2023		ANALISIS EFISIENSI	KETERANGAN
						Realisasi	%			Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	18	19	20	21
			Ketersediaan RTH	%	4,05	3,03	74,81	Sedang	**10.585.252.250**	**9.996.057.172**	**94,43**	**-26,22**	**TIDAK EFISIENSI**
		Menurunnya resiko bencana dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	point	100,00	140,12	59,88	Sangat tinggi	**4.364.754.400**	**4.176.592.584**	**95,69**	**-59,80**	**TIDAK EFISIENSI**
4	Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,50	4,74	86,18	Tinggi	**26.123.899.904**	**25.252.648.468**	**96,66**	**-12,16**	**EFISIENSI**
		Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	Tingkat inflasi daerah	%	3,00	2,11	129,67	Sedang	**26.123.899.904**	**25.252.648.468**	**96,66**	**11,82**	**EFISIENSI**
			Indeks daya beli	Poin	79,98	80,61	100,79	Sangat tinggi					
			PDRB Per kapita	Juta (Rp)	51,67	55,04	106,52	Sangat tinggi					
			Indeks Gini	Poin	0,346	0,306	111,56	Sangat tinggi					
			Angka Kemiskinan	%	5,76	6,2	92,36	Sangat tinggi					
			Tingkat pengangguran terbuka	%	8,96	7,45	116,85	Sangat tinggi					
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	Poin	61,50	70,97	115,40	Sangat tinggi	**988.739.527.481**	**922.985.257.123**	**93,35**	**19,11**	**EFISIENSI**

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGSI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		KRITERIA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TAHUN 2023		ANALISIS EFISIENSI	KETERANGAN
						Realisasi	%			Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	18	19	20	21
	yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	81,00	82,29	101,59	Sangat tinggi	**988.739.527.481**	**922.985.257.123**	**93,35**	**5,71**	**EFISIENSI**
			Nilai LPPD Kota	Poin	3,4600	3,4302	99,14	Sangat tinggi					
			Hasil Evaluasi AKIP	Poin	63,00	60,02	95,27	Sangat tinggi					
			Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP	WTP	100	Sangat tinggi					
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**99,78**		**1.614.656.217.614**	**1.508.593.945.639**	**93,43**	**6,37**	**EFISIENSI**

Sumber : BPKAD Kota Serang, 2024 (anaudited)

8.3 PENGHARGAAN KOTA SERANG

Pemerintah Kota Serang
RAIH PENGHARGAAN GUBERNUR BANTEN
SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN ATAU KOTA PREDIKAT BAIK
TINGKAT PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2023
Kamis, 21 Desember 2023

Pemerintah Kota Serang
MERAIH PENGHARGAAN
Sebagai
KOTA PEDULI HAM
DARI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Senin, 11 Desember 2023

BADAN POM
Pemerintah Kota Serang
RAIH PENGHARGAAN MENTERI KESEHATAN RI
SEBAGAI PEMERINTAH DAERAH YANG MENDUKUNG
PROGRAM PENGENDALIAN AMR BPOM TERBAIK II
KOTA SERANG SEMAKIN NYATA DAN TERANG BENDERANG
Minggu, 04 Februari 2024

INFORMATIF

OMBUDSMAN
PIAGAM PENGHARGAAN
PENGANUGERAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
(OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK)
TAHUN 2023
DIBERIKAN KEPADA
PEMERINTAH KOTA SERANG
KUALITAS TERTINGGI

PEMERINTAH KOTA SERANG
RAIH ANUGRAH LAYANAN INVESTASI 2023
DARI KEMENTERIAN INVESTASI / BKPM

Tabel 3.72
Daftar Penghargaan Pemerintah Kota Serang
Tahun 2018 – 2023

NO	URAIAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	KET
1	Piagam Penghargaan Kota Peduli HAK ASASI Manusia	Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	Tahun 2018
2	Piagam Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Pratama	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Tahun 2018
3	Piagam Penghargaan Walikota Enterpreneur Award	Asosiaisi Pemerintah Seluruh Indonesia (APEKSI)	Tahun 2018
4	Piagam Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Tahun 2018
5	Piagam Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Pratama	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Tahun 2019
6	Piagam Penghargaan Kota Sehat SWASTI SABA PADAPA untuk Kota Sehat Tingkat Nasional	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun	Tahun 2019
7	Piagam Penghargaan Kota Peduli HAK ASASI Manusia	Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	Tahun 2019
8	Pakarti Utama III Pelaksanaan Terbaik Kategori Kota Lomba Tertib Administrasi PKK Tingkat Provinsi Banten	TP-PKK Provinsi Banten	Tahun 2019
9	Pakarti Utama II Pelaksanaan Terbaik kategori Kota Lomba Halaman Asri, teratur, Indah dan Nyaman (Hatinya) PKK Tingkat Provinsi Banten	TP-PKK Provinsi Banten	Tahun 2019
10	Pakartu Utama III Pelaksanaan Terbaik Kategori Kota Lomba PKK Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sehat (PKK-KKBPK Kes) Tingkat Provinsi Banten	TP-PKK Provinsi Banten	Tahun 2019

NO	URAIAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	KET
11	Pakarti Utama II Pelaksanaan Terbaik Kategori Kota Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) Tk. Provinsi Banten	TP-PKK Provinsi Banten	Tahun 2019
12	Piagam Penganugerahan Badan Publik	Komisi Informasi Provinsi Banten	Tahun 2019
13	Piagam Penghargaan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Tahun 2019
14	Piagam Penghargaan Penerima Anugerah Buta Aksara	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	Tahun 2020
15	Piagam Penghargaan BKN Award	Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia	Tahun 2021
16	Piagam Penghargaan Atas Peran dan Konsistensi dalam Memajukan Industri Media	Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia	Tahun 2021
17	Piagam Penganugerahan Badan Publik Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Komisi Informasi Provinsi Banten	Tahun 2021
18	Dwija Praja Nugraha	Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Tahun 2022
19	Piagam Penghargaan Kota Peduli HAK ASASI Manusia	Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	Tahun 2022
20	Piagam Penghargaan Innovation Government Award (IGA)	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Tahun 2022
21	Dharma Bakti Sumbangan Pikiran dan Karya dalam Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan di Provinsi Banten	Gubernur Banten	Tahun 2022
22	Peringkat I BKN Award atas capaian dalam Penilaian Kompetensi ASN	Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia	Tahun 2022
23	Penghargaan Khusus Kategori Piloting SIASN Pelayanan Kenaikan Pangkat	Kanreg III Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia	Tahun 2022

NO	URAIAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	KET
24	Kategori Baik Ke-2 dalam Mengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota Tingkat Provinsi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten	Tahun 2022
25	Kota Serang Termasuk Zona Hijau dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Ombudsman Republik Indonesia	Tahun 2022
26	Komitmen dalam Mencapai UHC (Universal Health Coverage)	BPJS Kesehatan	Tahun 2022
27	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik, Kategori Pemerintah Daerah Kab/Kota, sebagai Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Provinsi Banten	Tahun 2022
28	Nomine Terbaik atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah, pada Anugerah Layanan Inovasi Tahun 2022	Kementerian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Tahun 2022
29	Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Pratama	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Tahun 2022
30	Anugerah Parahita Ekapraya, Kategori Madya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Tahun 2022
31	Kategori B Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi	Kementerian PAN-RB Republik Indonesia	Tahun 2022
32	Juara III Lomba Terti Administrasi dan Dasawisma PKK Tingkat Provinsi Banten	TP PKK Provinsi Banten	Tahun 2022
33	Opini BPK dengan Predikat WTP sepanjang tahun 2017-2018	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Tahun 2022
34	Level 3 (Integrated) pada semua elemen terkait Peran	Badan Pengawasan Pembangunan Republik Indonesia	Tahun 2022

NO	URAIAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	KET
	Layanan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi dan Struktur Tata Kelola		
35	Penghargaan Pemerintah Daerah dengan Realisasi terbesar di SIPD se-Indonesia	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Tahun 2022
36	Pengelolaan Keuangan dan SIPD Terbaik se-Provinsi Banten	Gubernur Banten	Tahun 2022
37	Peringkat Pertama Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Dana Insentif Daerah Tertinggi TA 2022	Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten	Tahun 2022
38	WTP Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Banten	Tahun 2022
39	Peringkat Terbaik 2 Penyampaian Data Gaji dan Ketepatan Penyetoran Iuran Wajib Pegawai (IWP), JKK dan JKM	PT. TASPEN	Tahun 2022
40	Peringkat Terbaik 3 Sebagai Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Triwulan II TA 2022	Gubernur Banten	Tahun 2022
41	Peringkat "BAIK" sebagai Pengelolaan Keuangan Daerah pada Triwulan I Tahun Anggaran 2022	Sekretariat Daerah Provinsi Banten	Tahun 2022
42	Kategori Terfavorit Penganugerahan Forum Anak Kab/Kota	DP3AKB Provinsi Banten	Tahun 2022
43	Juara III Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja PKK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten	Tahun 2022

NO	URAIAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	KET
44	Juara III Lomba Tertib Administrasi dan Dasawisma PKK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten	Tahun 2022
45	Penghargaan Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (skor 3,34) dan Status Kinerja sedang berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Tahun 2022
43	Juara I Pementasan Terbaik pada Pameran Inondesia City Expo (ICE) Ke-19, Rakernas Apeksi XIV Kota Makassar	PT. Kinarya Cipta Kreasi & Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Tahun 2023
44	Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 dengan Nilai 79,24%	Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten	Tahun 2023
45	Kabupaten/Kota Bebas Frambusia	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Tahun 2023
46	Universal Health Converage (UHT) yang diselengarakan oleh BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan	Tahun 2023
47	Pemerintah Kabupaten/Kota Kinerja Tinggi dengan Predikat Sedang dalam acara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Tahun 2023
48	WTP Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Banten	Tahun 2023
49	Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023 Kategori Pratama	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI	Tahun 2023
50	Penerima Insentif Fiskal Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Periode I kategori Kinerja dalam Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2023	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Tahun 2023

NO	URAIAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	KET
51	Piagam Penghargaan Peringkat 2 atas Capaian dalam Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Republik Indonesia	Tahun 2023
52	Penghargaan Sebagai Kota yang Responsif terhadap Program Guru Penggerak dengan Predikat Abhinaya	Balai Guru Penggerak Provinsi Banten	Tahun 2023
53	Penghargaan sebagai Walikota yang turut aktif dalam Melestarikan Bahasa Daerah di Kota Serang	Kantor Bahasa Provinsi Banten	Tahun 2023
54	Penghargaan Tanda Lencana Melati	Gerakan Pramuka Kwartir Nasional	Tahun 2023
55	Rekor Muri Indonesia atas Penggunaan Busana Koko Putih Lengan Panjang Terbanyak pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Museum Rekor Muri Indonesia	Tahun 2023
56	Penghargaan Anugerah Layanan Investasi 2023 atas Penilaian Kinerja Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2023	Kementerian Investasi Republik Indonesia	Tahun 2023

BAB 04 PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Pemerintah Kota Serang Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Serang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap Capaian kinerja (*performance results*) Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 menggambarkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Serang selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2018-2023 dan telah memenuhi 5 tujuan strategis dan 7 (tujuh) sasaran strategis sebagaimana yang telah ditargetkan.

Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kota Serang dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 5 indikator kinerja tujuan dan 17 (enam belas) indikator kinerja sasaran. Dari hasil analisis terhadap 18 indikator kinerja dapat diketahui bahwa keseluruhan dari 18 indikator kinerja mendapat predikat sangat tinggi, 2 indikator predikat tinggi, 1 indikator predikat sedang dan 1 indikator dengan predikat rendah.

Pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Serang juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja langsung dalam Perubahan APBD Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.614.656.217.614,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.508.593.945.639,- atau 94,31%.

Selain itu dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja Kota Serang, upaya yang akan dilaksanakan dalam perbaikan terhadap sasaran yang tidak berhasil mencapai target adalah :

a. Memperkuat komitmen pimpinan;
b. Melakukan koordinasi dan sinergitas lintas sektoral dalam mewujudkan target kinerja yang harus di laksanakan secara bersamaan;
c. Aplikasi SIMAK penggunaannya lebih dioptimalkan kembali sebagai sarana pengukuran kinerja bagi perangkat daerah;
d. Penguatan soliditas tim fasilitasi SAKIP;
e. Berkoordinasi secara intens dengan Tim Kemenpan RB; serta
f. Penguatan kapasitas dan kesungguhan kepala OPD dalam merealisasikan indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indicator kinerja tahun kelima yang tercantum dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, dan khususnya untuk tahun 2023 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Serang Perubahan Tahun 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kota Serang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Serang.

Serang, 28 Maret 2024

PJ. WALIKOTA SERANG

YEDI RAHMAT, SE

LAMPIRAN

Lampiran 1.

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2023

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGSI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya		**Indeks Pembangunan Manusia**	**Poin**	**73,09**	**76,43**	**104,57**	**Sangat tinggi**		**255.995.409.951**	**5.329.809.656**	**2,08**	**28.852.780.180**	**11,27**	**112.430.700.339**	**43,92**	**229.600.862.937**	**89,69**	
		Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	**Rata-rata Lama Sekolah**	**Tahun**	**8,91**	**8,91**	**100,00**	**Sangat tinggi**		**167.536.376.447**	**2.626.556.751**	**1,57**	**7.516.430.926**	**4,49**	**77.808.971.167**	**46,44**	**150.906.896.588**	**90,07**	
			Harapan Lama Sekolah	**Tahun**	**12,98**	**12,82**	**98,77**	**Sangat tinggi**											
1									Program Pengelolaan Pendidikan	141.736.305.402	54.900.000	0,04	2.250.665.000	1,59	63.710.217.448	44,95	131.366.520.593	92,68	DINDIKBUD
									Program Pengembangan Kurikulum	75.000.000	0	0,00	0	-	0	-	53.872.000	71,83	DINDIKBUD
									Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.929.641.450	11.000.000	0,16	1.422.208.000	20,52	3.951.087.850	57,02	5.403.915.930	77,98	DINDIKBUD
									Program Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	387.210.000	213.000.000	55,01	216.000.000	55,78	234.000.000	60,43	386.000.000	99,69	DISPORAPAR
									Program Pengembangan Kapasitas daya saing Keolahragaan	14.451.457.000	1.693.384.200	11,72	2.197.240.200	15,20	7.292.363.000	50,46	9.890.299.418	68,44	DISPORAPAR
									Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000		0,00	180.000.000	60,00	180.000.000	60,00	300.000.000	100,00	DISPORAPAR

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGSI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
									Program Pembinaan Perpustakaan	2.484.184.404	610.772.551	24,59	1.008.533.726	40,60	1.673.434.649	67,36	2.365.980.427	95,24	DPK
									Program Pengembangan Kebudayaan	1.045.648.191	21.000.000	2,01	172.074.000	16,46	660.388.220	63,16	1.017.828.220	97,34	DINDIKBUD
									Program Pembinaan Sejarah	75.960.000	22.500.000	29,62	45.960.000	60,51	60.960.000	80,25	75.960.000	100,00	DINDIKBUD
									Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	50.970.000		0,00	23.750.000	46,60	46.520.000	91,27	46.520.000	91,27	DINDIKBUD
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**Usia Harapan Hidup**	**Tahun**	**68,51**	**75,13**	**109,66**	**Sangat tinggi**		**88.459.033.504**	**2.703.252.905**	**3,06**	**21.336.349.254**	**24,12**	**34.621.729.172**	**39,14**	**78.693.966.349**	**88,96**	
									Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	77.220.638.523	2.624.542.905	3,40	19.495.822.043	25,25	31.092.885.961	40,26	68.999.637.602	89,35	DINAS KESEHATAN
									Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1.019.051.501	3.000.000	0,29	190.642.600	18,71	521.727.950	51,20	635.639.950	62,38	DINAS KESEHATAN
									Program Peningkatan Ketersediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	238.910.000	20.000.000	8,37	54.600.000	22,85	90.175.000	37,74	175.510.000	73,46	DINAS KESEHATAN
									Program Pemberdayaan Masyarakat	786.375.875	0	0,00	92.892.750	11,81	111.565.250	14,19	539.939.750	68,66	DINAS KESEHATAN

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
									Bidang Kesehatan										
									Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	719.583.648	6.460.000	0,90	242.287.250	33,67	410.005.250	56,98	698.933.838	97,13	DP3AKB
									Program Perlindungan Perempuan	294.452.173	25.250.000	8,58	65.627.500	22,29	79.654.500	27,05	283.893.700	96,41	DP3AKB
									Program Pemenuhan Hak Anak	113.829.250	3.000.000	2,64	41.574.250	36,52	98.029.250	86,12	113.460.750	99,68	DP3AKB
									Program Perlindungan Khusus Anak	305.245.034	3.000.000	0,98	97.312.691	31,88	265.590.591	87,01	290.936.591	95,31	DP3AKB
									Program Pengendalian Penduduk	486.130.000	6.000.000	1,23	74.940.000	15,42	199.595.000	41,06	466.037.250	95,87	DP3AKB
									Program Pembinaan Keluarga Berencana	3.324.607.500	0	0,00	354.385.919	10,66	458.822.169	13,80	3.241.101.784	97,49	DP3AKB
									Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.950.210.000	12.000.000	0,30	626.264.251	15,85	1.293.678.251	32,75	3.248.875.134	82,25	DP3AKB
2	**Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah**		**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah**	**Poin**	**70,00**	**71,78**	**102,54**	**Sangat tinggi**		**284.001.613.038**	**34.272.948.669**	**12,07**	**63.831.027.664**	**22,48**	**162.683.028.405**	**57,28**	**273.561.973.005**	**96,32**	
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastru	**Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah**	**%**	**77,14**	**76,07**	**98,61**	**Sangat tinggi**		**284.001.613.038**	**34.272.948.669**	**12,07**	**63.831.027.664**	**22,48**	**162.683.028.405**	**57,28**	**273.561.973.005**	**96,32**	

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGSI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
		ktur wilayah																	
									Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	8.777.040.168	1.875.177.900	21,36	3.136.947.900	35,74	6.746.737.600	76,87	8.708.761.566	99,22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum	18.512.001.900	0	0,00	0	-	6.005.690.240	32,44	17.044.986.290	92,08	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Limbah	5.693.927.800	0	0,00	0	-	1.607.360.250	28,23	5.647.279.800	99,18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	39.321.819.747	9.868.542.850	25,10	17.126.647.000	43,56	30.855.512.650	78,47	38.441.976.850	97,76	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Program Penataan Bangunan Gedung	15.309.126.904	1.113.142.200	7,27	1.523.536.950	9,95	6.130.003.234	40,04	14.602.999.030	95,39	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	30.048.875.600	0	0,00	0	-	6.009.710.000	20,00	28.585.895.600	95,13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Program Penyelenggaraan Jalan	99.539.417.270	6.459.220.050	6,49	11.228.590.100	11,28	61.017.126.715	61,30	95.354.202.250	95,80	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGSI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
																			PENATAAN RUANG
									Program Pengembangan Jasa Kontruksi	192.000.000	0	0,00	0	-	191.660.000	99,82	191.660.000	99,82	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	781.317.000	67.700.000	8,66	76.700.000	9,82	239.525.000	30,66	667.715.500	85,46	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Program Pengembangan Perumahan	1.805.023.604	173.387.500	9,61	730.235.822	40,46	1.005.171.651	55,69	1.760.564.407	97,54	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Program Kawasan Permukiman	19.559.340.531	2.595.540.300	13,27	7.118.929.300	36,40	11.842.600.550	60,55	19.025.054.021	97,27	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	20.305.000	0	0,00	20.305.000	100,00	20.305.000	100,00	20.305.000	100,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	22.292.612.564	6.053.586.700	27,16	9.975.747.000	44,75	14.170.194.600	63,56	21.798.594.000	97,78	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGSI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNGJAWAB
						Realisasi	%				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
									Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	59.085.000	19.060.000	32,26	39.325.000	66,56	45.235.000	76,56	59.085.000	100,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	136.030.000	14.440.000	10,62	33.610.000	24,71	33.610.000	24,71	135.720.000	99,77	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Program Pengelolaan Tanah Kosong	321.420.000	2.000.000	0,62	236.560.000	73,60	313.260.000	97,46	319.680.000	99,46	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Program Penatagunaan Tanah	355.055.000	10.985.000	3,09	17.870.000	5,03	353.355.000	99,52	353.355.000	99,52	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.023.106.250	2.720.182.851	67,61	3.120.513.206	77,56	3.451.669.886	85,80	3.973.665.983	98,77	DISKOMINFO
									Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	17.182.108.700	3.299.983.318	19,21	9.445.510.386	54,97	12.644.301.029	73,59	16.829.092.708	97,95	DINAS PERHUBUNGAN
									Program Pengelolaan Pelayaran	72.000.000		0,00		-		-	41.380.000	57,47	DINAS PERHUBUNGAN
3	**Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin**		**Indeks Kualitas Lingkun**	**Poin**	**47,79**	**50,61**	**105,90**	**Sangat**		**59.795.767.240**	**8.660.943.318**	**14,48**	**17.050.077.117**	**28,51**	**25.271.742.470**	**42,26**	**57.193.204.106**	**95,65**	

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGSI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
	pembangunan berkelanjutan		**gan Hidup**					**tinggi**											
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	**Jumlah Penanganan Timbunan Sampah**	**%**	**80,00**	**68,15**	**85,19**	**Tinggi**		**44.845.760.590**	**7.183.005.838**	**16,02**	**13.374.866.219**	**29,82**	**18.824.677.302**	**41,98**	**43.020.554.350**	**95,93**	
									Program Perencanaan Lingkungan Hidup	252.218.000	0	0,00	5.920.000	2,35	15.944.000	6,32	212.400.000	84,21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
									Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	835.201.840	80.100.000	9,59	226.550.000	27,13	305.350.000	36,56	736.467.000	88,18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
									Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	65.000.000	0	0,00	7.010.000	10,78	19.500.000	30,00	65.000.000	100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
									Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan LingkUngan Hidup (PPLH)	72.980.000	0	0,00	16.020.000	21,95	46.480.000	63,69	51.380.000	70,40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGSI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
									Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	66.980.000	0	0,00	1.000.000	1,49	21.101.000	31,50	38.659.500	57,72	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
									Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	32.108.750	0	0,00	4.520.000	14,08	8.360.000	26,04	31.308.750	97,51	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
									Program Pengelolaan Persampahan	43.521.272.000	7.102.905.838	16,32	13.113.846.219	30,13	18.407.942.302	42,30	41.885.339.100	96,24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Ketersediaan RTH	**%**	**4,05**	**3,03**	**74,81**	**Sedang**		**10.585.252.250**	**698.310.000**	**6,60**	**1.656.626.190**	**15,65**	**3.547.923.004**	**33,52**	**9.996.057.172**	**94,43**		
									Pengendalian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHAYATI)	10.585.252.250	698.310.000	6,60	1.656.626.190	15,65	3.547.923.004	33,52	9.996.057.172	94,43	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Menurunnya resiko bencana dan meningkatnya ketanggguhan terhadap bencana	**Indeks Resiko Bencana**	**point**	**100,00**	**140,12**	**59,88**	**Sangat tinggi**		**4.364.754.400**	**779.627.480**	**17,86**	**2.018.584.708**	**46,25**	**2.899.142.164**	**66,42**	**4.176.592.584**	**95,69**	
									Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Non Kebakaran	2.406.464.500	351.737.480	14,62	1.111.513.708	46,19	1.587.329.164	65,96	2.378.829.084	98,85	SATPOL PP
									Program Penanggulangan Bencana	1.958.289.900	427.890.000	21,85	907.071.000	46,32	1.311.813.000	66,99	1.797.763.500	91,80	BADAN PENANGGULANGAN

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGSI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
																			BENCANA DAERAH
3	**Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah**		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**5,50**	**4,74**	**86,18**	**Tinggi**		**26.123.899.904**	**2.384.365.324**	**9,13**	**5.471.785.874**	**20,95**	**9.617.618.112**	**36,82**	**25.252.648.468**	**96,66**	
		Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	**Tingkat inflasi daerah**	**%**	**3,00**	**2,11**	**129,67**	**Sedang**		**26.123.899.904**	**2.384.365.324**	**9,13**	**5.471.785.874**	**20,95**	**9.617.618.112**	**36,82**	**25.252.648.468**	**96,66**	
			Indeks daya beli	**Poin**	**79,98**	**80,61**	**100,79**	**Sangat tinggi**											
			PDRB Per kapita	**Juta (Rp)**	**51,67**	**55,04**	**106,52**	**Sangat tinggi**											
			Indeks Gini	**Poin**	**0,346**	**0,306**	**111,56**	**Sangat tinggi**											
			Angka Kemiskinan	**%**	**5,76**	**6,2**	**92,36**	**Sangat tinggi**											
			Tingkat pengangguran terbuka	**%**	**8,96**	**7,45**	**116,85**	**Sangat tinggi**											
									Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	64.980.000	0	0,00	42.790.000	65,85	59.590.000	91,71	60.980.000	93,84	DINKOPUKMINDAG
									Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	77.840.000	7.748.000	9,95	44.092.000	56,64	57.472.000	73,83	77.772.000	99,91	DINKOPUKMINDAG
									Program Pemberdayaan	85.229.500	6.000.000	7,04	12.000.000	14,08	24.800.000	29,10	71.829.500	84,28	DINKOPUKMINDAG

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGSI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
									Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)										
									Program Pengembangan UMKM	154.607.500	0	0,00	42.640.000	27,58	42.640.000	27,58	146.480.000	94,74	DINKOPUKMINDAG
									Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan	26.291.250	0	0,00	0	-	0	-	24.830.000	94,44	DINKOPUKMINDAG
									Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.795.813.750	217.100.000	7,77	744.584.000	26,63	1.356.638.000	48,52	2.719.056.410	97,25	DINKOPUKMINDAG
									Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	278.874.830	9.820.000	3,52	107.967.500	38,72	157.717.500	56,55	250.607.300	89,86	DINKOPUKMINDAG
									Program Pengembangan Ekspor	893.728.000	0	0,00	0	-	239.991.450	26,85	890.825.500	99,68	DINKOPUKMINDAG
									Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	205.273.800	25.200.000	12,28	50.400.000	24,55	80.645.000	39,29	205.017.000	99,87	DINKOPUKMINDAG
									Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	218.735.750	6.200.000	2,83	119.365.000	54,57	134.215.000	61,36	212.431.700	97,12	DINKOPUKMINDAG
									Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	32.089.890	3.000.000	9,35	11.350.000	35,37	31.247.280	97,37	32.089.890	100,00	DKP3

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGSI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
									Program Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.002.526.750	8.625.000	0,86	62.595.000	6,24	86.888.640	8,67	1.002.428.250	99,99	DKP3
									Program Penanganan Kerawanan Pangan	57.393.750	0	0,00	1.900.000	3,31	56.868.640	99,09	57.393.750	100,00	DKP3
									Program Pengawasan Keamanan Pangan	23.325.000	3.000.000	12,86	11.225.000	48,12	22.168.640	95,04	23.325.000	100,00	DKP3
									Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	786.980.000	109.945.000	13,97	263.910.000	33,53	295.978.640	37,61	778.518.800	98,92	DKP3
									Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.891.897.975	74.146.125	3,92	106.446.125	5,63	320.090.265	16,92	1.852.203.725	97,90	DKP3
									Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	230.863.500	11.500.000	4,98	15.510.000	6,72	39.403.640	17,07	229.599.000	99,45	DKP3
									Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.069.500.349	45.693.189	2,21	98.103.189	4,74	141.706.829	6,85	2.062.180.029	99,65	DKP3
									Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.587.167.924	49.093.510	1,90	79.143.510	3,06	130.232.338	5,03	2.474.577.494	95,65	DKP3
									Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	315.832.160	22.900.000	7,25	54.260.000	17,18	90.985.000	28,81	300.916.000	95,28	DKP3

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGSI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
									Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	14.103.000	0	0,00	0	-	14.103.000	100,00	14.103.000	100,00	DKP3
									Program Penyuluhan Pertanian	446.140.280	39.090.000	8,76	242.773.600	54,42	322.873.600	72,37	438.059.280	98,19	DKP3
									Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Parawisata	48.000.000	4.000.000	8,33	4.000.000	8,33	32.000.000	66,67	48.000.000	100,00	DISPORAPAR
									Program Pemasaran Pariwisata	402.278.000	3.000.000	0,75	3.000.000	0,75	126.733.000	31,50	395.867.000	98,41	DISPORAPAR
									Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	128.000.000	4.000.000	3,13	4.000.000	3,13	108.892.000	85,07	124.892.000	97,57	DISPORAPAR
									Program Pengembangan iklim Penanam Modal	120.670.000	6.220.000	5,15	23.140.000	19,18	111.666.500	92,54	119.666.500	99,17	DPMPTSP
									Program Promosi Penanaman Modal	292.442.350	9.210.000	3,15	35.886.800	12,27	107.536.100	36,77	258.269.350	88,31	DPMPTSP
									Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	454.937.000	13.210.000	2,90	128.710.000	28,29	229.520.000	50,45	445.884.500	98,01	DPMPTSP
									Program Pemberdaya Lembaga Kemasyarakata	824.499.830	6.000.000	0,73	185.913.000	22,55	347.028.000	42,09	808.077.750	98,01	DP3AKB

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGSI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
									n, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat										
									Program Pemberdayaan Sosial	152.420.000	0	0,00	57.415.000	37,67	62.235.000	40,83	148.820.000	97,64	DINAS SOSIAL
									Program Rehabilitasi Sosial	2.279.951.650	87.000.000	3,82	255.900.000	11,22	962.970.750	42,24	2.244.819.600	98,46	DINAS SOSIAL
									Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.874.882.750	1.265.240.000	32,65	1.399.840.000	36,13	1.658.885.000	42,81	3.572.208.750	92,19	DINAS SOSIAL
									Program Penanganan Bencana	857.840.250	0	0,00	413.062.500	48,15	459.461.500	53,56	857.149.750	99,92	DINAS SOSIAL
									Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	44.996.200	6.500.000	14,45	24.146.200	53,66	31.246.200	69,44	44.996.200	100,00	DINAS SOSIAL
									Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.046.956.528	188.300.000	17,99	329.467.500	31,47	671.400.000	64,13	993.072.140	94,85	DISNAKERTRANS
									Program Penempatan Tenaga Kerja	872.513.169	87.397.500	10,02	260.045.450	29,80	705.159.600	80,82	842.839.300	96,60	DISNAKERTRANS
									Program Hubungan Industrial	425.316.500	62.998.000	14,81	232.965.500	54,77	263.206.500	61,88	387.441.500	91,09	DISNAKERTRANS
									Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	35.992.719	1.219.000	3,39	2.229.000	6,19	32.412.500	90,05	32.412.500	90,05	
									Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3.008.000	1.010.000	33,58	1.010.000	33,58	1.010.000	33,58	3.008.000	100,00	DISNAKERTRANS
4	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**		**Indeks Reformasi**	**Poin**	**61,50**	**70,97**	**115,40**	**Sangat**		**988.739.527.481**	**20.681.496.616**	**2,09**	**29.552.849.837**	**2,99**	**65.417.152.826**	**6,62**	**922.985.257.123**	**93,35**	

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
	serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi		**Birokrasi Daerah**					**tinggi**											
		Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	**Indeks kepuasan masyarakat (IKM)**	**Poin**	**81,00**	**82,29**	**101,59**	**Sangat tinggi**		**988.739.527.481**	**20.681.496.616**	**2,09**	**29.552.849.837**	**2,99**	**65.417.152.826**	**6,62**	**922.985.257.123**	**93,35**	
			Nilai LPPD Kota	**Poin**	**3,4600**	**3,4302**	**99,14**	**Sangat tinggi**											
			Hasil Evaluasi AKIP	**Poin**	**63,00**	**60,02**	**95,27**	**Sangat tinggi**											
			Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	**Kategori**	**WTP**	**WTP**	**100**	**Sangat tinggi**											
									Program Pemerintahan dan Kesejahteraaan Rakyat	14.553.340.479	249.794.900	1,72	2.052.522.630	14,10	715.936.672	4,92	14.039.786.003	96,47	SEKRETARIAT DAERAH
									Program Perekonomian dan Pembangunan	2.801.414.235	77.305.000	2,76	79.711.500	2,85	24.098.167	0,86	2.759.340.725	98,50	SEKRETARIAT DAERAH
									Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	824.709.518.465	0	0,00	0	-	0	-	766.026.147.402	92,88	SEMUA OPD
									Program Pengelolaan Informasi dan	1.401.985.750	174.954.000	12,48	485.250.000	34,61	812.034.000	57,92	1.392.934.750	99,35	DISKOMINFO

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGSI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
									Komunikasi Publik										
									Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	200.648.750	20.770.000	10,35	37.770.000	18,82	130.910.000	65,24	192.180.750	95,78	DISKOMINFO
									Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	64.723.000	1.088.000	1,68	33.538.000	51,82	34.882.000	53,89	60.522.000	93,51	DISKOMINFO
									Program Pendaftaran Penduduk	535.030.000	73.500.000	13,74	191.269.000	35,75	368.641.000	68,90	531.783.500	99,39	DISDUKCAPIL
									Program Pencatatan Sipil	602.464.750	39.900.000	6,62	106.810.000	17,73	214.354.000	35,58	487.698.750	80,95	DISDUKCAPIL
									Program Pengelolaan Informasi Adminitrasi Kependudukan	601.218.155	38.700.000	6,44	179.920.000	29,93	334.820.000	55,69	544.200.750	90,52	DISDUKCAPIL
									Program Pengelolaan Profil Kependudukan	105.222.710	0	0,00	0	-	81.840.000	77,78	96.840.000	92,03	DISDUKCAPIL
									Program Pelayanan Penanaman Modal	256.510.000	40.610.000	15,83	120.946.000	47,15	167.142.000	65,16	255.225.000	99,50	DPMPTSP
									Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	338.829.206	26.410.000	7,79	131.227.400	38,73	263.249.419	77,69	326.021.441	96,22	DPMPTSP
									Program Pengelolaan Arsip	341.625.500	89.165.000	26,10	78.760.000	23,05	272.165.000	79,67	340.904.000	99,79	DPK
									Program Dukungan Pelaksanaan	40.552.638.601	8.231.070.500	20,30	6.009.379.800	14,82	21.819.732.200	53,81	39.795.522.530	98,13	SEKRETARIAT DPRD

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGSI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
									Tugas dan Fungsi DPRD										
									Program Kepegawaian Daerah	2.384.420.380	104.284.000	4,37	440.939.917	18,49	68.066.800	2,85	2.296.620.280	96,32	BKPSDM
									Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	2.740.921.250	339.391.000	12,38	719.415.000	26,25	423.275.000	15,44	2.724.818.250	99,41	BKPSDM
									Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.790.530.000	67.650.000	3,78	593.700.000	33,16	1.010.250.000	56,42	1.500.678.000	83,81	INSPEKTORAT
									Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	897.139.000	3.750.000	0,42	180.235.000	20,09	198.315.000	22,11	714.520.900	79,64	INSPEKTORAT
									Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.253.241.050	358.753.000	15,92	901.845.250	40,02	1.224.584.250	54,35	1.897.985.100	84,23	BAPPEDA
									Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.610.365.000	339.315.250	13,00	941.099.150	36,05	1.756.586.950	67,29	2.472.088.690	94,70	BAPPEDA
									Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.148.673.100	29.365.000	1,37	326.466.600	15,19	1.316.541.220	61,27	1.668.164.628	77,64	BAPPEDA
									Program Pengelolaan Keuangan Daerah	8.018.924.250	1.108.613.750	13,82	2.910.268.000	36,29	4.533.361.495	56,53	7.357.213.545	91,75	BPKAD
									Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.025.091.550	859.553.310	17,11	1.552.367.310	30,89	2.041.768.660	40,63	3.416.146.050	67,98	BPKAD
									Program Pengelolaan	6.807.647.942	878.730.850	12,91	1.882.485.192	27,65	3.152.641.442	46,31	6.431.265.813	94,47	BAPENDA

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGSI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
									Pendapatan Daerah										
									Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.819.715.750	1.115.080.256	23,14	2.398.428.032	49,76	3.258.358.652	67,60	4.817.726.668	99,96	SATPOL PP
									Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.376.281.308	400.203.500	16,84	638.023.500	26,85	1.331.794.000	56,05	2.307.279.900	97,10	KECAMATAN
									Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	38.285.645.171	5.836.145.800	15,24	4.512.319.766	11,79	13.913.233.514	36,34	37.363.751.813	97,59	KECAMATAN
									Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	81.875.000	0	0,00	4.250.000	5,19	13.020.000	15,90	76.370.000	93,28	KECAMATAN
									Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.832.096.675	177.393.500	9,68	559.128.500	30,52	1.216.371.375	66,39	1.679.416.875	91,67	KECAMATAN
									Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.944.140.680	0	0,00	121.340.040	6,24	1.769.668.760	91,03	1.910.588.760	98,27	KESBANGPOL
									Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengemabangan	16.519.018.524	0	0,00	894.502.000	5,41	2.175.226.500	13,17	16.487.284.500	99,81	KESBANGPOL

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGSI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	TAHUN 2023		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUNG JAWAB
						Realisasi	%				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
									Etika serta Budaya Politik										
									Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	51.645.000	0	0,00	48.425.000	93,77	48.425.000	93,77	48.425.000	93,77	KESBANGPOL
									Program Pembinaaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya	100.048.250	0	0,00	0	-	99.147.500	99,10	99.147.500	99,10	KESBANGPOL
									Program Peningkatan Kewaspadaaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	986.938.000	0	0,00	420.507.250	42,61	626.712.250	63,50	866.657.250	87,81	KESBANGPOL
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**99,78**		**JUMLAH**	**1.614.656.217.614**	**71.329.563.583**	**4,42**	**144.758.520.672**	**8,97**	**375.420.242.152**	**23,25**	**1.508.593.945.639**	**93,43**	**0**

Lampiran 2.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2023

MISI 1 MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN

No.	Tujuan Daerah & Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Formulasi Pengukuran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,09	IPM $= {}^{1}/_{3}\,[X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ Dimana: $X_{(1)}$: Indeks harapan hidup $X_{(2)}$: Indeks pendidikan $= {}^{2}/_{3}$(indeks melek huruf) + ${}^{1}/_{3}$(indeks rata-rata lama sekolah) $X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak Indeks $X_{(i)} = X_{(i)} - X_{(i)min} \,/\, [X_{(i)maks} - X_{(i)min}]$ Dimana: $X_{(1)}$: Indikator ke-i (i = 1, 2, 3) $X_{(2)}$: Nilai maksimum sekolah $X_{(i)}$ $X_{(3)}$: Nilai minimum sekolah $X_{(i)}$

No.	Tujuan Daerah & Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Formulasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	a. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,91	$RLS = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} xi$ dimana: RLS = Rata-rata Lama sekolah Penduduk usia 25 tahun ke atas *xi* = Lama Sekolah Penduduk ke-i yang berusia 25 tahun n = Jumlah Penduduk usia 25 tahun ke atas.
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,98	$HLS\,{}_{a}^{t} = FKx\sum_{i=a}^{n}\frac{E_i^t}{P_i^t}$ Dimana : HLS_a^t = Harapan Lama sekolah pada umur *a* di tahun *t* E_i^t = Jumlah Penduduk usia *i* yang bersekolah pada tahun *t* P_i^t = Jumlah Penduduk usia *i* pada tahun *t* *i* = usia (a, a+1,....n) FK = Faktor Koreksi
	b. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,51	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

MISI 2 : MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Formula Pengukuran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah	Poin	70,00	Nilai diperoleh dari Survei yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang
	a. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Tingkat Kemantapan Infrastruktur wilayah	%	77,14	[50% x {40%(Persentase Panjang Jalan kondisi baik)} + {30%(Presentase Panjang drainase kondisi baik)} + {30%(Presentase Panjang saluran irigasi kondisi baik)} + [30%x{35%(Presentase Luas Pemukiman Layak huni) +{35%(Presentase Luas Pemukiman Tertata)} + {30%(Presentase Lingkungan Sehat dan aman dengan PSU)} + [20% x {50%(Persentase Pemasangan rmabu lalulintas)}+{50%(Persentase Pemasangan PJU)}
2	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	47,79	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) Dimana: IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKL : Indeks Kualitas Lahan
	a. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan	Jumlah Penanganan Timbunan Sampah	%	80,00	$\frac{\Sigma\ Sampah\ yang\ Tertangani}{\Sigma\ Timbunan\ Sampah} x\ 100$

	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ketersediaan RTH	%	4,05	$\frac{Luas\ RTH\ Publik\ yang\ tersedia}{Luasan\ RTH\ Publik\ yang\ seharusnya\ ada} x\ 100$
	b. Menurunnya resiko Bencana dan Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	Point	100	$\frac{Kerentanan}{kapasitas} x\ Bahaya$ Dimana: 6. Bahaya : Probabilitas spasial, fekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunungapi, dan lainnya 7. Kerentanan : parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. 8. Kapasitas : Pendekatan tingkat ketahanan daerah

MISI 3 MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Formulasi Pengukuran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan local daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	**5,50**	**LPE = (PDBt – PDBt-1)/PDBt-1 x 100%** **Dimana:** PDBt = Produk Domestik Bruto pada tahun t PDBt-1 = Produk Domestik Bruto pada tahun sebelumnya
	a. Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	Tingkat Inflasi Daerah	%	3	$[\{(1+\Delta Inf_1)(1+\Delta Inf_2)(1+\Delta Inf_t)\}^{1/t}] - 1$ Dimana : ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi. Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut : $\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} x\ 100\%$ Dimana : Inf_n = nilai inflasi pada tahun n $Inf_{(n+1)}$ = nilai pada 1 tahun berikutnya n = tahun …

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Formulasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Indeks daya beli	Poin	79,98	$Daya\ Beli_j = \prod_{i=1}^{m} \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}}\right)^{1/m}$ Dimana : Pik : Harga komoditas di kota Serang Pij : Harga komoditas di Kota lain M : Jumlah komoditas
		PDRB Per kapita	Juta (Rp)/Jiwa (orang)	51,67	$\frac{PDRB}{\Sigma\ Jumlah\ Penduduk}\ x\ 100\%$
		Indeks Gini	Poin	0,346	$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{y} \qquad 0 < V_w < 1$ Dimana: Untuk kabupaten/kota: Yi = PDRB perkapita di kecamatan I Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota Fi = jumlah penduduk di kecamatan i n = jumlah penduduk di kab/kota
		Angka Kemiskinan	%	5,76	$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^\alpha$ Dimana : α = 0 z = garis kemiskinan. yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Formulasi Pengukuran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Tingkat pengangguran terbuka	%	8,96	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \text{ x } 100\%$

MISI 4 MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Formulasi Pengukuran
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima dan berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	Poin	61,50	Nilai diperoleh dari Evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB
	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	81,00	$\frac{Total\ nilai\ per\ unsur}{Total\ unsur\ yang\ dinilai}\ x\ Nilai\ Penimbang$
		Nilai LPPD Kota	Poin	3.4600	Hasil Evaluasi atas nilai LPPD oleh Kemendagri
		Hasil Evaluasi AKIP	Poin	63,00	Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP oleh KemenpanRB
		Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP	Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SYAFRUDIN, S.Sos., M.Si
Jabatan : WALIKOTA SERANG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Serang, 1 November 2023

WALIKOTA SERANG

H. SYAFRUDIN, S.Sos., M.Si

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2023

MISI 1 : MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Poin**	**73,09**
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,91
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,98
	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,51

MISI 2 : MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah**	**Poin**	**70,00**
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	%	77,14
2.	**Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Poin**	**47,79**
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Penanganan Timbunan Sampah	%	80

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Ketersediaan RTH	%	4,05
	Menurunnya Resiko Bencana dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana	Point	100

MISI 3 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan local daerah**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**5,5**
	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	Tingkat inflasi daerah	%	3-5
		Indeks daya beli	Poin	79,98
		PDRB Per kapita	Juta (Rp)	51,67
		Indeks gini	Poin	O,346
		Angka Kemiskinan	%	5,76
		Tingkat pengangguran terbuka	%	8,96

MISI 4 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi**	**Indeks Reformasi Birokrasi Daerah**	**Poin**	**61,50**
	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	81,00
		Nilai LPPD Kota	Point	3.4600
		Hasil Evaluasi AKIP	Point	63,00
		Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP

Penjabaran dalam Program yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	OPD
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	141.736.305.402	DINDIKBUD
3.	Program Pengembangan Kurikulum	75.000.000	DINDIKBUD
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.929.641.450	DINDIKBUD
5.	Program Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	387.210.000	DISPORAPAR

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	OPD
6.	Program Pengembangan Kapasitas daya saing Keolahragaan	14.451.457.000	DISPORAPAR
7.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000	DISPORAPAR
8.	Program Pembinaan Perpustakaan	2.484.184.404	DPK
9.	Program Pengembangan Kebudayaan	1.045.648.191	DINDIKBUD
10.	Program Pembinaan Sejarah	75.960.000	DINDIKBUD
11.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	50.970.000	DINDIKBUD
12.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	77.220.638.523	DINAS KESEHATAN
13.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1.019.051.501	DINAS KESEHATAN
14.	Program Peningkatan Ketersediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	238.910.000	DINAS KESEHATAN
15.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	786.375.875	DINAS KESEHATAN
16.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	719.583.648	DP3AKB
17.	Program Perlindungan Perempuan	294.452.173	DP3AKB
18.	Program Pemenuhan Hak Anak	113.829.250	DP3AKB
19.	Program Perlindungan Khusus Anak	305.245.034	DP3AKB
20.	Program Pengendalian Penduduk	486.130.000	DP3AKB
21.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	3.324.607.500	DP3AKB
22.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.950.210.000	DP3AKB
23.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	8.777.040.168	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	OPD
			PENATAAN RUANG
24.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum	18.512.001.900	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Limbah	5.693.927.800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
26.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	39.321.819.747	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27.	Program Penataan Bangunan Gedung	15.309.126.904	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
28.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	30.048.875.600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
29.	Program Penyelenggaraan Jalan	99.539.417.270	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
30.	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	192.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
31.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	781.317.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
32.	Program Pengembangan Perumahan	1.805.023.604	DINAS PERUMAHAN

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	OPD
			DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.	Program Kawasan Permukiman	19.559.340.531	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
34.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	20.305.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
35.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	22.292.612.564	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
36.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	59.085.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
37.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	136.030.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
38.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	321.420.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
39.	Program Penatagunaan Tanah	355.055.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
40.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.023.106.250	DISKOMINFO
41.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	17.182.108.700	DINAS PERHUBUNGAN
42.	Program Pengelolaan Pelayaran	72.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
43.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	252.218.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
44.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	835.201.840	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	OPD
45.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	65.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
46.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan LingkUngan Hidup (PPLH)	72.980.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
47.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	66.980.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
48.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	32.108.750	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
49.	Program Pengelolaan Persampahan	43.521.272.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
50.	Pengendalian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHAYATI)	10.585.252.250	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
51.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Non Kebakaran	2.406.464.500	SATPOL PP
52.	Program Penanggulangan Bencana	1.958.289.900	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
53.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	64.980.000	DINKOPUKMINDAG
54.	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	77.840.000	DINKOPUKMINDAG
55.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	85.229.500	DINKOPUKMINDAG
56.	Program Pengembangan UMKM	154.607.500	DINKOPUKMINDAG
57.	Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan	26.291.250	DINKOPUKMINDAG
58.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.795.813.750	DINKOPUKMINDAG

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	OPD
59.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	278.874.830	DINKOPUKMINDAG
60.	Program Pengembangan Ekspor	893.728.000	DINKOPUKMINDAG
61.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	205.273.800	DINKOPUKMINDAG
62.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	218.735.750	DINKOPUKMINDAG
63.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	32.089.890	DKP3
64.	Program Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.002.526.750	DKP3
65.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	57.393.750	DKP3
66.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	23.325.000	DKP3
67.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	786.980.000	DKP3
68.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.891.897.975	DKP3
69.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	230.863.500	DKP3
70.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.069.500.349	DKP3
71.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.587.167.924	DKP3
72.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	315.832.160	DKP3
73.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	14.103.000	DKP3
74.	Program Penyuluhan Pertanian	446.140.280	DKP3
75.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Parawisata	48.000.000	DISPORAPAR
76.	Program Pemasaran Pariwisata	402.278.000	DISPORAPAR

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	OPD
77.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	128.000.000	DISPORAPAR
78.	Program Pengembangan iklim Penanam Modal	120.670.000	DPMPTSP
79.	Program Promosi Penanaman Modal	292.442.350	DPMPTSP
80.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	454.937.000	DPMPTSP
81.	Program Pemberdaya Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	824.499.830	DP3AKB
82.	Program Pemberdayaan Sosial	152.420.000	DINAS SOSIAL
83.	Program Rehabilitasi Sosial	2.279.951.650	DINAS SOSIAL
84.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.874.882.750	DINAS SOSIAL
85.	Program Penanganan Bencana	857.840.250	DINAS SOSIAL
86.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	44.996.200	DINAS SOSIAL
87.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.046.956.528	DISNAKERTRANS
88.	Program Penempatan Tenaga Kerja	872.513.169	DISNAKERTRANS
89.	Program Hubungan Industrial	425.316.500	DISNAKERTRANS
90.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	35.992.719	DISNAKERTRANS
91.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3.008.000	DISNAKERTRANS
92.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraaan Rakyat	14.553.340.479	SEKRETARIAT DAERAH
93.	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.801.414.235	SEKRETARIAT DAERAH
94.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	824.709.518.465	SEMUA OPD
95.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.401.985.750	DISKOMINFO

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	OPD
96.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	200.648.750	DISKOMINFO
97.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	64.723.000	DISKOMINFO
98.	Program Pendaftaran Penduduk	535.030.000	DISDUKCAPIL
99.	Program Pencatatan Sipil	602.464.750	DISDUKCAPIL
100.	Program Pengelolaan Informasi Adminitrasi Kependudukan	601.218.155	DISDUKCAPIL
101.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	105.222.710	DISDUKCAPIL
102.	Program Pelayanan Penanaman Modal	256.510.000	DPMPTSP
103.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	338.829.206	DPMPTSP
104.	Program Pengelolaan Arsip	341.625.500	DPK
105.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	40.552.638.601	SEKRETARIAT DPRD
106.	Program Kepegawaian Daerah	2.384.420.380	BKPSDM
107.	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	2.740.921.250	BKPSDM
108.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.790.530.000	INSPEKTORAT
109.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	897.139.000	INSPEKTORAT
110.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.253.241.050	BAPPEDA
111.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.610.365.000	BAPPEDA
112.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.148.673.100	BAPPEDA
113.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	8.018.924.250	BPKAD
114.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.025.091.550	BPKAD
115.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.807.647.942	BAPENDA

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	OPD
116.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.819.715.750	SATPOL PP
117.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.376.281.308	KECAMATAN
118.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	38.285.645.171	KECAMATAN
119.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	81.875.000	KECAMATAN
120.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.832.096.675	KECAMATAN
121.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.944.140.680	KESBANGPOL
122.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengemabangan Etika serta Budaya Politik	16.519.018.524	KESBANGPOL
123.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	51.645.000	KESBANGPOL
124.	Program Pembinaaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya	100.048.250	KESBANGPOL
125.	Program Peningkatan Kewaspadaaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	986.938.000	KESBANGPOL
	JUMLAH	**1.614.656.217.614**	

WALIKOTA SERANG,

H. SYAFRUDIN,
S.Sos, M.Si

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SERANG